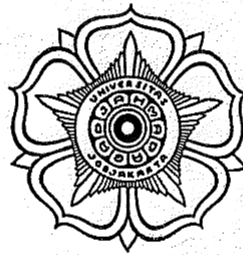


**PEMBERONTAKAN RAKYAT TOLITOLI 1919**

**Tesis**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mencapai derajat Magister

Program Studi Sejarah  
Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora



Diajukan oleh

**JUR A I D**

**NIM:5535/IV-4/372/93**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
1996**

PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS SASTRA  
Universitas Gadjah Mada

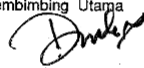
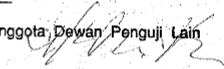
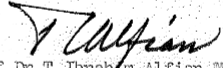
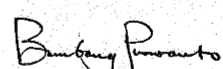
Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

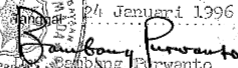
**Tesis**

"PEMBERONTAKAN RAKYAT TOLI TOLI 1919"

dipersiapkan dan disusun oleh  
Drs. Juraid  
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 24 Januari 1996

**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing Utama  Dr. Djoko Suryo Pembimbing Pendamping I  Pembimbing Pendamping II	Anggota Dewan Penguji Lain  Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo   Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian M.A.   Dr. Bambang Purwanto
---	--

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister  
pada tanggal 24 Januari 1996  
  
 Pembimbing  
 Kepala Program Studi Sejarah

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Januari 1996.



Drs. Juraid

Tandatangan dan nama terang

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

## PRAKATA

Studi ini terutama membahas aspek latar belakang, kausalitas, proses, jalannya peristiwa, dan akibat-akibat selanjutnya terhadap masyarakat petani Tolitoli dalam pemberontakan pada bulan Juni 1919, dan perubahan kebijakan politik pemerintah kolonial di Sulawesi Tengah setelah berakhirnya pemberontakan itu. Penulis telah mempelajari gerakan pemberontakan petani Tolitoli 1919 dengan latar belakang kebangkitan kehidupan keagamaan dan peran serta organisasi Sarekat Islam di Tolitoli pada awal Abad XX.

Gerakan pemberontakan terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan secara spasial terletak di lokasi yang juga sangat terbatas, namun gaung dari peristiwanya menandai puncak heroisme yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah yang tersiar beritanya dengan sangat luas. Apa yang saya lakukan ini, moga-moga menjadi awal dari minat penulisan sejarah kritis dan untuk membuka peluang bagi penulisan ilmiah bidang sejarah di Sulawesi Tengah yang belum tersentuh itu. Hal ini juga kiranya dapat membangkitkan pemahaman yang lebih kritis, bahwa pemberontakan petani Tolitoli memiliki implikasi ekonomis, sosial, politis, agama, dan budaya sebagai dampak penetrasi pemerintah kolonial di satu pihak, dan peranan petani dalam membentuk sejarah Indonesia di pihak lain.

Apa yang telah penulis lakukan dalam menyelesaikan karya ini bagaikan sebutir pasir di tengah laut. Terlalu kecil untuk

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

dibesar-besarkan, tetapi tidak akan terjadi yang besar tanpa menyentuh yang kecil terlebih dahulu. Sebab kerap kali yang kecil selalu indah. Untuk menyelesaikan karya ini, penulis tidak mungkin berkerja sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu pertama-tama penulis menyampaikan puji syukur keharibaan Allah Rabbul Alamien yang telah memberikan taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat mempersempahkan karya ini di dalam kelebihan dan kekurangannya.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Dr. H. Djoko Suryo yang telah meluangkan waktunya yang amat berharga guna membimbing penulis dari persiapan proposal sampai dengan selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih dan rasa hormat juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof.Dr. T. Ibrahim Alfian, M.A. Beliau, selain sebagai Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, setiap bertemu, selalu memberikan dorongan dan bimbingan untuk proses penyelesaian penulisan tesis ini, baik di kampus maupun di rumah beliau.

Penulis menyatakan terima kasih kepada Dr. Bambang Purwanto selaku Pengelola S2 Program Studi Sejarah yang amat berbaik hati mengoreksi perbaikan akhir naskah tesis ini dengan penuh ketelitian dan kesabaran di tengah kesibukannya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staf pengajar Program Studi Sejarah Program Pascasarjana UGM., masing-masing kepada : Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Prof. Dr. Umar Kayam, Prof. Dr. Darsiti Soeratman, Prof. Dr. Loekman

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

Soetrisno, Prof. Dr. Sulatin Soetrisno, Prof. Dr. R.M. Soedarsono, Dr. Suhartono, dan Dr. Nasikun.

Kepada Bapak Prof. Dr. H.A. Mattulada, selain sebagai mantan Rektor Universitas Tadulako, beliau adalah guru besar yang mempunyai komitmen kepada dunia ilmu, sehingga setiap saat bertemu, tidak luput dari dorongan dan bimbingan kepada penulis untuk terus belajar dan belajar terus. Adalah sangat pantas apabila rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepadanya. Juga kepada mantan Rektor UNTAD., almarhum Prof. Dr. Musji Amal Pagiling, M.A. dan Prof. H. Aminuddin Ponulele Rektor Universitas Tadulako yang dengan izin dan kemudahannya, penulis dapat menjalani tugas belajar pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada ini, sehingga pada tempatnya pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih.

Kepada teman-teman kolega seangkatan, saya menghaturkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama kuliah. Mereka adalah Suriadi Mappangara, Bambang Subiyakto, Zulqayyim, Supariadi, Tosan Sohastojo, Wakidi, Danil Chaniago, Anggar Kaswati, Dewi Pamungkas, Putri Agus Wijayati, dan Lilik Zulaikha.

Pernyataan terima kasih, saya sampaikan kepada teman-teman anggota KEMAPAS, Hareul Anam, SE. MSi, Ir. Bahrudin, MP. Adik Ir. Ahda Mulyati, M.T., Drs. Lukman /Ir. Mardiah Mangun Syamsul Bahri, SE. MSi., Drs. Muh. Nawawi, MSi., Ir. Gatot Siswo Utomo, dan seluruh anggota KEMAPAS lain yang tak mungkin

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

penulis sebutkan satu persatu di sini.

Khusus kepada Drs. Harto Juwono yang banyak membantu memindahkan bahasa sumber ke dalam bahasa Indonesia, saya tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih, semoga kerja sama ini dapat berlanjut seterusnya. Penulis dengan sangat gembira menyampaikan ucapan terima kasih kepada Staf Pengajar Program Studi Sejarah FKIP Universitas Tadulako atas kerja samanya, sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Khusus kepada Bapak Drs. H. Baso Siodjang yang telah turut membantu penulis baik moril maupun material saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Kehadapan Ibu Dra. Euis Karingningsih, M.S. Ketua Jurusan IPS, adalah pada tempunya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua perhatiannya untuk kemajuan akademik.

Kepada kedua orang tua Penulis, yaitu Ayahanda Abdul Latief dan Ibunda Siti Djamilah, penulis menyampaikan sembah sujud dan terima kasih yang setulus-tulusnya, karena dengan keikhlasan, bimbingan, dan doa keduanya, penulis dapat sampai ke tahap belajar seperti ini.

Terakhir untuk Isteri tercinta, Dra. Nurjaya Juraid, Apt. Nanda Tiara Khairun Nisa, Nanda Riady Ibnu Khaldun, kepada merekalah karya ini penulis persembahkan, semoga obsesi yang telah dicapai ini mendapat petunjuk dan hidayah Allah Rabbal Alamien, sehingga dapat membuka pintu rahmat untuk terus maju dan maju terus dalam memajukan ilmu pengetahuan, Amien.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

## DAFTAR ISI

Prakata .....	i
Daftar Isi .....	v
Keterangan Ejaan .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Singkatan .....	ix
Intisari .....	x
Abstract.....	xi
<b>BAB I. PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup dan Permasalahan.....	4
C. Sasaran Studi .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Pendekatan.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Tinjauan Sumber .....	14
1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	14
2. Sumber-sumber yang Digunakan.....	17
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II. TOLITOLI PADA AWAL ABAD XIX .....</b>	<b>25</b>
A. Letak Geografis .....	25
B. Latar Belakang Sejarah .....	26
C. Keadaan Penduduk.....	29

v

PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS SASTRA  
Universitas Gadjah Mada

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

	D. Kondisi Politik.....	34
	E. Keadaan Sosial Ekonomi.....	45
	F. Hasil Industri dan Komoditi Ekspor .....	49
	G. Tata Hukum dan Keamanan .....	51
	H. Kondisi Hidup di Pedesaan .....	53
	I. Adat-istiadat .....	55
BAB	III. KEBANGKITAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN .....	58
	A. Masuknya Agama Islam .....	58
	B. Penunaian Ibadah Haji.....	66
	C. Sarekat Islam .....	69
BAB	IV. GERAKAN PEMBERONTAKAN RAKYAT TOLITOLI .....	80
	A. Gambaran Umum Sebelum Pemberontakan .....	78
	B. Proses Terjadinya Pemberontakan .....	84
	C. Penerapan Kerja Wajib .....	85
	D. Ideologi Pemberontakan .....	108
	E. Kepemimpinan .....	118
BAB	V. PENUMPASAN PEMBERONTAKAN DAN AKIBATNYA.....	125
	A. Hukuman-hukuman.....	130
	G. Penggantian Pimpinan di Tolitoli .....	133
	1. Pengangkatan Kontrolir Baru .....	133
	2. Pengangkatan Raja Tolitoli.....	134
BAB	VI. KESIMPULAN .....	137
	DAFTAR PUSTAKA .....	145
	Glosarium .....	151
	Lampiran-lampiran .....	152

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

## DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Tolitoli pada Tahun 1919/1920 .....	39
2. Daftar Jemaah Haji Tolitoli pada Tahun 1900-1918.....	67
3. Daftar Keputusan Hakim Landraad Makassar 1921 Tentang Hukuman Penjara bagi Para Pemberontak .....	129

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

## DAFTAR SINGKATAN

ANRI	= Arsip Nasional Republik Indonesia
BH	= Bataviaasch Handelsblad
Bt.	= Besluit
CSI	= Central Sarekat Islam
IG	= De Indische Gids
KT	= Koloniaal Tijdschrift
KV	= Koloniaal Verslag
LK	= De Lokomoteif
PK	= Pangkal Kemadjoean
SAW	= Shalallahu Alaihi Wassalam
SH	= Soerabajaasch Handelsblad
SI	= Sarekat Islam
SN	= Soerabajaasch Nieuwsblad
TBG	= Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde (Tijdschrift Batavia- asch Genootschap van Kunsten en Weten- schappen).
TNI	= Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie.
QS	= Al-Quran Surat (ke-sekian).

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

## ABSTRACT

This study discusses as to the rebellion of Tolitolinese on year 1919. Its discussion involves background, chronology, of events, and its continuedness. The main cause for the incidence of Tolitoli peasant rebellion is initially from the performance of *heerendiensten* (compulsory work) and run by Dutch government without to take into account the condition of Tolitolinese at that time.

The movement of rebellion is happened as a realization of Tolitolinese's rigid refusal to performance of compulsory work imposed to people forcedly. Apart from the incidence of physical rebellion, it also appears the conflicts of social, political, economical, and religious lifes between people and Dutch colonial regime.

The refusal of people ending to the rebellion is a radical attitude implanted by Sarekat Islam organization since its establishment at Tolitoli on year 1916 up to the incidence of rebellion movement on month June, 1919.

The movement of rebellion happens at Salumpaga village situated at North Tolitoli District. In the beginning the Salumpaga people gets their shift to do the compulsory work to make and to rehabilitate the roads at Kalangkangan Labuan Dede as length as three kilometers. To reach the work location, the compulsory workers must walk on foot for 36 hours or if by traditional boat for 12 hours. In addition they must walk for a far distance, they are also forced to supply their foods and drinkwaters by themselves during the compulsory work goes on.

As compulsory workers have no more food-supply left and the Fast month comes soon, they request in order to the compulsory work to be postponed up to the Fast month over. The Controller refuses their request, however, the compulsory workers remain to insist to abandon their work. The compulsory workers are then punished for a forced work due to their brave action abandoning the compulsory work. Imam Hadji Hayyun and Maros as Sarekat Islam leader take a position at back of the compulsory workers. They refuse the action by punishment to the compulsory workers on Fast month as a holy month for the Moslems. The Controller with local tradisional authority remain to hold their principles, that the punishment of a forced work and the continuity of the compulsory work remain to be continued, so that the rebellion of Tolitoli peoples has happened at Salumpaga on June, date 5th, 1919.

In the rebellion, the victims fall in government side 10 personnels were died, each were Controller Angelino, King Tolitoli Mogi Haji Ali, five armed polices, on man Prosecutor Singko, Opas Samaila, and a clerk. The rebellion lasts nine days later.

Although Tolitolinese strives to encourage the rebellion, but because of the strategy and modern armed force of Dutch infantry, finally the people rebellion can annihilated. The rebel are then jailed by colonial regime and four men among them are death sentenced.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

## INTISARI

Studi ini membahas mengenai pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919. Pembahasannya meliputi latar belakang, jalannya peristiwa, dan kelanjutannya. Penyebab utama munculnya pemberontakan petani Tolitoli adalah berawal dari pelaksanaan *heerendiensten* (kerja wajib) yang dijalankan oleh pemerintah Belanda tanpa mempertimbangkan keadaan rakyat Tolitoli pada waktu itu.

Gerakan pemberontakan terjadi sebagai wujud penolakan tegas rakyat Tolitoli terhadap penerapan kerja wajib yang dibebankan kepada rakyat dengan cara paksa. Selain terjadinya pemberontakan fisik, muncul pula benturan kehidupan sosial politik, ekonomi, budaya, dan agama antara rakyat dengan rezim kolonial Belanda.

Penolakan rakyat yang berakhir dengan pemberontakan adalah sikap radikal yang ditanamkan oleh organisasi Sarekat Islam semenjak masuknya di Tolitoli pada tahun 1916 hingga meletusnya gerakan pemberontakan pada bulan Juni 1919.

Gerakan pemberontakan terjadi di kampung Salumpaga yang terletak di Distrik Tolitoli Utara. Pada awalnya rakyat Salumpaga mendapat giliran melaksanakan kerja wajib untuk membuat dan memperbaiki jalan di Kalangkangan Labuah Dede sepanjang tiga kilometer. Untuk mencapai lokasi pekerjaan, para pekerja wajib harus menempuh dengan jalan kaki selama 36 Jam atau bila naik perahu layar selama 12 Jam. Selain harus menempuh perjalanan dengan jarak jauh, rakyat juga diharuskan menyediakan bekal makanan dan minuman sendiri selama kerja wajib berlangsung.

Ketika para pekerja wajib kehabisan bekal dan bulan Puasa semakin dekat, mereka mengajukan supaya kerja wajib ditunda sampai berakhirnya bulan Puasa. Kontrolir tidak menerima permintaan itu, namun para pekerja wajib tetap bersikeras meninggalkan pekerjaannya. Para pekerja wajib kemudian dihukum kerja paksa atas keberaniannya meninggalkan kerja wajib. Imam Haji Hayyun dan Maros sebagai tokoh SI berada dibelakang para pekerja wajib. Mereka menolak tindakan hukuman terhadap para pekerja wajib pada bulan Puasa sebagai bulan suci bagi umat Islam. Kontrolir bersama dengan penguasa tradisional setempat tetap pada prinsipnya, bahwa hukuman kerja paksa dan lanjutan kerja wajib tetap diteruskan, sehingga terjadilah pemberontakan rakyat Tolitoli di Salumpaga pada tanggal 5 Juni 1919.

Dalam pemberontakan tersebut, telah jatuh korban di pihak pemerintah 10 orang tewas, masing-masing Kontrolir Angelino, Raja Tolitoli Mogi Haji Ali, lima orang polisi bersenjata, seorang Jaksa Singko, Opas Samaila, dan seorang juru tulis. Pemberontakan itu berakhir sembilan hari kemudian.

Meskipun rakyat Tolitoli berusaha meneruskan pemberontakan, namun karena strategi dan kekuatan senjata moderen dari infanteri Belanda, akhirnya pemberontakan rakyat dapat ditumpas. Para pemberontak kemudian dipenjarakan oleh rezim kolonial dan empat orang di antaranya dijatuhi hukum mati.

x

## BAB I PENGANTAR

### A. Latar Belakang

Studi ini membahas mengenai pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919. Pemberontakan itu terjadi di kampung Salumpaga yang terletak di distrik Tolitoli Utara. Meskipun pemberontakan berlangsung sangat singkat, namun konflik yang mendahului peristiwa tersebut sangat penting ditelusuri untuk mengetahui latar belakang, proses, dan kelanjutannya.

Arti penting studi ini bukanlah karena dampaknya terhadap situasi politik pemerintah kolonial di Sulawesi Tengah pada saat itu, namun oleh karena para pelaku pemberontakan adalah para petani yang selama ini dianggap sebagai kalangan bawah yang tidak mampu berbuat apa-apa terhadap penetrasi kolonial.

Masyarakat petani yang pada umumnya hidup dan berdomisili di desa selalu dianggap sebagai masyarakat miskin, bersifat apatis, dan nasibnya tidak pernah berubah. Itulah paling tidak anggapan dari kebanyakan orang tentang keadaan masyarakat desa di Indonesia. Pandangan itu sebenarnya tidak saja kurang tepat, tetapi juga merupakan sikap kurang tanggap dalam mencermati bagaimana kondisi dan dinamika masyarakat petani di desa sesungguhnya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Michael Adas, Ratu Adil Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa (Terj.). (Jakarta : CV. Rajawali Pers, 1988).

Masyarakat petani di pedesaan justeru memiliki dinamika untuk berusaha memperbaiki keadaan dan nasibnya. Oleh sebab pengaruh informasi yang datang dari luar menyebabkan para petani menjadi kritis terhadap gagasan-gagasan yang ditawarkan kepada mereka. Sikap kritis yang mereka miliki dapat berakhir dengan tindakan pemberontakan, kerusuhan, dan huru-hara.<sup>2)</sup>

Akan tetapi gerakan sosial yang dilakukan oleh petani biasanya tidak ditopang oleh ideologi yang kongkrit. Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sering kali tidak jelas dan kadang mengandung harapan akan datangnya Ratu Adil sebagai penyelamat. Harapan rakyat tradisional akan datangnya juru selamat juga dikenal sebagai mesianisme dan milenarisme.<sup>3)</sup>

Peristiwa pemberontakan petani sebagai bentuk gerakan sosial merupakan wujud perlawanan yang terjadi akibat penertasi politik pemerintah kolonial terhadap sendi-sendi kehidupan rakyat tradisional. Hal itu juga menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik yang mengubah tatanan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, sehingga dalam kenyataannya menjadi masyarakat transisi antara keadaan tradisional yang melekat dengan konsep masyarakat modern yang ditumbuhkembangkan oleh pemerintah kolonial.

Dalam tradisi penulisan sejarah konvensional gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat petani tidak banyak

---

<sup>2)</sup> Sartono Kartodirdjo, *Protes Movements in Rural Java*. (Kualalumpur : Oxford University Press/PT. Indira, 1973).

<sup>3)</sup> Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta : Sinar Harapan, 1984), hlm. 26.

mendapat perhatian. Perhatian yang lebih banyak ditekankan pada masalah sejarah politik yang menonjolkan tokoh-tokoh besar penguasa istana, panglima perang dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa jalannya sejarah ditentukan oleh kejadian-kejadian politik, perang, diplomasi, serta tindakan-tindakan tokoh politik.<sup>4)</sup>

Sejarah politik selama satu abad lebih dianggap sebagai bentuk tertinggi pemikiran historis, bahkan sejarah juga diberi definisi sebagai politik masa lampau (*past politics*),<sup>5)</sup> sehingga tema penulisan sejarah yang dominan adalah tema politik. Hal itu terbukti dengan banyaknya jumlah karya sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan Indonesia dewasa ini. Paling kurang, ada dua alasan mengapa tema politik lebih mendominasi penelitian dan penulisan sejarah Indonesia. *Pertama*, tema politik selalu terkait dengan semua aktivitas kehidupan manusia dalam sebuah negara dan bangsa, bahkan menjadi panglima bagi semua aktivitas kehidupan manusia lainnya. *Kedua*, akibat penjajahan yang diderita oleh bangsa Indonesia lebih dari 300 tahun, terutama di Jawa, bagaimanapun tetap menjadi isu yang selalu aktual di dalam tema kajian historis, baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal.

Munculnya orientasi pembaharuan dalam penelitian dan pe-

---

<sup>4)</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. (Jakarta : PT. Gramedia, 1982) hlm. 17-18.

<sup>5)</sup> Sartono Kartodirdjo dalam William Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia*. (Jakarta : LP3ES, 1991) hlm. 66.

nulisan sejarah dewasa ini telah melahirkan penemuan baru yang menunjukkan, bahwa tradisi penulisan sejarah konvensional mulai ditinggalkan. Hal itu juga menunjukkan, bahwa orientasi terhadap kajian terhadap masyarakat pedesaan sebagai golongan bawah seperti gerakan petani semakin banyak diminati dalam penelitian dan penulisan sejarah Indonesia.<sup>69</sup>

#### B. Ruang Lingkup dan Permasalahan

Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang dan sebab-sebab terjadinya pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919 dan akibat-akibatnya bagi masyarakat setempat di kemudian hari. Kajian mengenai gerakan sosial di Indonesia terutama di Jawa secara komprehensif telah dilakukan dengan sangat baik oleh Sartono Kartodirdjo pada tahun 1966 yaitu Pemberontakan Petani Banten 1888. Selain Pemberontakan Petani Banten 1888, telah terjadi juga pemberontakan petani di berbagai wilayah di luar Jawa terhadap penetrasi politik pemerintah kolonial. Kajian mengenai gerakan sosial diberbagai wilayah di luar Jawa terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI) belum semuanya mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam.

Di antara peristiwa pemberontakan petani sebagaimana yang terjadi di Banten, terdapat pula peristiwa pemberontakan di daerah Tolitoli yang kiranya memiliki pula arti penting

<sup>69</sup>Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia. Diterjemahkan oleh Hasan Basari, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1984).

untuk diungkapkan dan dipahami sebagai bagian dari kajian sejarah Indonesia.

Peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919 telah membawa korban pada kedua belah pihak, baik di pihak Belanda maupun pada pihak rakyat Tolitoli sendiri. Gerakan pemberontakan melawan pemerintah kolonial, dilakukan oleh sejumlah penduduk pedesaan di Tolitoli. Seperti juga di tempat lain di Indonesia, pemberontakan rakyat Tolitoli dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial dengan kekuatan militer yang lebih besar dan lebih modern. Akibat penumpasan itu, selain pemberontakan rakyat dapat dipadamkan, korban dan kerugian bagi rakyat Tolitoli tidak dapat dihindari.

Dalam mengkaji gejala protes masyarakat bawah dan pemberontakan petani di Indonesia seperti yang terjadi daerah Sulawesi, sangat menarik kiranya peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli yang terjadi pada tahun 1919 diangkat untuk bahan kajian penulisan tesis ini.

Pokok masalah yang akan dikerjakan dalam penelitian ini terfokus kepada pemberontakan yang meletus di Tolitoli yang dilakukan oleh para petani di kampung Salumpaga yang dipimpin oleh Imam Haji Hayyun dan Maros pada bulan Juni tahun 1919. Peristiwa itu meletus terutama setelah masuk dan berkembangnya organisasi Sarekat Islam di wilayah Tolitoli.

Sebagai upaya untuk melacak sumber-sumber yang kemudian dibahas dan ditulis menjadi sebuah penelitian ilmiah, maka dapat dirumuskan masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : Pertama, faktor-faktor apa yang

menyebabkan terjadinya peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kedua, bagaimana proses dan jalannya peristiwa pemberontakan itu sebagai satu perjuangan rakyat yang memiliki arti bagi rakyat Sulawesi Tengah. Ketiga, sejauh mana peranan utama Sarekat Islam turut membangkitkan semangat rakyat untuk melakukan gerakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Keempat, apa akibat-akibat yang timbul setelah terjadinya pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919 baik di pihak penduduk maupun bagi rezim kolonial Belanda.

### C. Sasaran Studi

Sejarah lokal senantiasa merupakan persoalan di Indonesia. Salah satu persoalan yang paling penting adalah terjadinya tumpang tindih antara batas-batas etnik kultural dan batas-batas pemerintahan ( daerah ).<sup>7)</sup>

Tulisan ini merupakan bidang kajian sejarah lokal yang berusaha menjelaskan detail-detail peristiwa sejarah dengan analitis, sehingga tumpang tindih antara batas-batas etnik kultural dan pemerintahan daerah itu tidak terjadi. Secara temporal penelitian ini mengungkapkan peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919 yang secara spasial atau lokasi kejadiannya berada di wilayah Sulawesi Tengah.

---

<sup>7)</sup> Taufik Abdullah dan Abdurrachman Suryomihardjo, Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif. (Jakarta : PT. Gramedia, 1985), hlm. 31.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

7

Meskipun kejadiannya amat singkat, akan tetapi proses, struktur, dan akibat dari kejadian itu memiliki nilai spesifik untuk ditelaah dan dikaji melalui perspektif historis.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa masalah pokok sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dengan berusaha mengungkapkan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. untuk mengungkapkan kondisi, sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan rakyat Tolitoli tahun 1919.
- b. untuk mengetahui peran pokok Sarekat Islam dalam memberi motivasi dan membangkitkan semangat pemberontakan rakyat terhadap penetrasi pemerintah kolonial.
- c. supaya proses dan jalannya pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919 dapat dijelaskan berdasarkan sumber data yang tersedia dan dapat dipercayai kebenarannya baik dari autentisitasnya maupun kredibilitasnya.
- d. setiap ada gerakan perlawanan atau pemberontakan rakyat setempat terhadap pemerintahan kolonial Belanda sudah barang tentu mempunyai akibat dan perubahan, penelitian ini tidak luput dari usaha mengangkat dan menjelaskannya menjadi satu kajian sejarah.

## 2. Manfaat Penelitian

Usaha yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan sejarah mengenai pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919 adalah ingin memberi eksplanasi terhadap sebab-sebab pencetus peristiwa tersebut, proses dan jalannya pemberontakan, dan akibat-akibatnya di kemudian hari. Dengan demikian, maka manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

*Pertama*, dapat memberikan horizon yang luas terhadap penelitian dan penulisan tentang gerakan sosial secara lokal sekaligus dapat memperkaya penulisan sejarah nasional.

*Kedua*, penelitian dan penulisan ini akan menambah khazanah karya sejarah yang masih sangat dirasakan kurang terutama di daerah Sulawesi Tengah.

*Ketiga*, kebangkitan solidaritas yang spontan dari rakyat untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial merupakan suatu tindakan teramat berani untuk menegakkan ketentraman dan kedaulatan rakyat Tolitoli. Studi ini berusaha mengkaji peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat.

## F. Kerangka Teori dan Pendekatan

Untuk mencapai tujuan penulisan sejarah yang optimal, peranan teori dan metodologi sama sekali tak dapat diabaikan. Teori dan metodologi adalah hal pokok dalam penulisan sejarah, sehingga hasil penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan menceritakan kejadian secara kronologis prosesual saja, tetapi juga bermaksud menerangkan dengan mengkaji sebab-sebab atau

kausalitasnya, kondisi lingkungannya, konteks sosial-kulturalnya, dengan secara mendalam hendak diadakan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.<sup>8)</sup> Selain masalah kausalitas atau sebab-akibat yang menarik perhatian, tetapi juga dan kerap kali sangat penting dikemukakan adalah karakter apa yang bisa dilukiskan terhadap peristiwa sejarah yang hendak ditulis. Sebagai seorang ilmuwan, maka amat penting untuk menentukan ukuran-ukuran tertentu dalam memberikan karakter itu. Inilah yang biasa disebut konseptualisasi.<sup>9)</sup>

Dalam melakukan penelitian tentang gerakan sosial di Tolitoli pada tahun 1919, sudah barang tentu digunakan teori dan metodologi sejarah, agar supaya faktor-faktor kausalitas, proses, dan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan pemberontakan itu dapat diterangkan secara jelas.

Penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan pendekatan historis dimaksudkan agar mampu menjadi explanatory power terhadap peristiwa sejarah yang hendak diteliti. Dalam hal ini menunjukkan kepada dimensi mana yang akan disoroti termasuk anasir-anasir yang akan diungkapkan. Hasil pengungkapannya akan ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai.<sup>10)</sup>

<sup>8)</sup> Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. (Jakarta : Gramedia, 1982), hlm. 3.

<sup>9)</sup> Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 312.

<sup>10)</sup> Sartono Kartodirdjo, op. cit., hlm. 4.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

10

Pemberontakan rakyat Tolitoli merupakan reaksi terhadap perlakuan pemerintah kolonial yang melakukan penindasan kepada rakyat tanpa mengenal batas-batas kemanusiaan. Tindakan eksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan di pihak kaum kolonial itu membuat rakyat Tolitoli seakan bangun dari tidur dan secara sporadis melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang menimbulkan akibat jatuhnya korban dari kedua belah pihak yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan sumber yang tersedia, peneliti lebih mungkin dapat menafsirkan dengan cermat terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi tidak ada penafsiran tanpa fakta, oleh karena yang pokok adalah fakta. Untuk menjelaskan tentang pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919, mau tidak mau peneliti harus melakukan proses kerja yang diuraikan di atas sebagai konsekuensi logis dari penulisan sejarah kritis.

Dalam upaya melakukan kajian historis terhadap pemberontakan rakyat Tolitoli 1919, maka salah satu teori yang relevan digunakan adalah "teori konflik" sebagaimana diuraikan oleh Olsen dalam karyanya yang berjudul *The Process of Social Organization* yang diterbitkan pada tahun 1968. Olsen dalam karyanya itu tidak saja membahas tentang konflik yang terjadi dalam organisasi sosial, melainkan juga membahas mengenai sebab-sebab terjadinya konflik dan akibat yang ditimbulkannya.

Konflik dalam pengertian yang lebih luas menurut Olsen adalah meliputi semua bentuk pertentangan, dan ia terjadi apabila ada pertentangan antara dua pelaku atau lebih di dalam proses organisasi sosial. Oleh karena itu konflik adalah proses

umum yang memiliki banyak tipe. Di antaranya adalah kompetisi, agresi, *hostility* (sikap permusuhan) dan *cleavages* (keretakan antar kelompok).<sup>11)</sup>

Berdasarkan tipe-tipe konflik itu, menurut Olsen terdapat beberapa dimensi teoretis sekaligus merupakan klasifikasi mengenai konflik sosial yaitu, *instrumental conflict versus expressive conflict* (pendorong konflik lawan pernyataan konflik), *inherent versus induced conflict* (konflik dari dalam lawan penyebab konflik), *ideological conflict versus operational conflict*, (ideologi konflik melawan perwujudan konflik), *direct versus indirect conflict*, (konflik langsung melawan konflik tidak langsung), dan *institutionalized versus non-institutionalized conflict* (konflik yang berinstitusi melawan konflik yang tidak berinstitusi). Kelima tipe konflik di atas menggambarkan keseluruhan tipologi konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dapat dikaji menurut pola dan kecenderungan yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu.

Berangkat dari teori Olsen sebagaimana digambarkan di atas dapat disebutkan, bahwa konflik yang terjadi di Tolitoli antara penduduk pribumi dengan pemerintah kolonial yang melahirkan gerakan pemberontakan rakyat, merupakan suatu konflik *inherent* berhadapan dengan konflik yang sengaja dibuat dan direncanakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.<sup>12)</sup>

<sup>11)</sup> Marvin E. Olsen, *The Process of Social Organizations* (New Dheli : Oxford & Publishing Co., 1968), hlm. 134.

<sup>12)</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

Konflik sosial juga bisa beragam bentuknya tergantung kepada perbedaan dimensi empiriknya yang secara garis besar meliputi, frequency (berapa banyak konflik itu terjadi), scope (cakupan pelaku atau bagian-bagian yang terlibat konflik), duration (berapa lama konflik itu berlangsung, dan expression (melalui apa konflik itu terjadi).<sup>19)</sup> Apakah suatu konflik berfungsi atau tidak, tergantung tipe isu yang menjadi subyek konflik, menjadi fungsional positif bila konflik itu tidak mempermasalahkan dasar-dasar hubungan, dan akan fungsional negatif bila dalam konflik yang terjadi menyerang nilai inti.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian sejarah, yaitu yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan sumber tertulis yang memuat mengenai peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919. Bahan-bahan tersebut, terutama berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan pemerintah, dan penerbitan resmi yang memuat peristiwa pada saat itu, antara lain : arsip, laporan pemerintah, surat kabar, dan terbitan-terbitan resmi lainnya.

Mengingat peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli terjadi pada tahun 1919, maka sumber-sumber laporan dari pemerintah kolonial dan sumber-sumber lain yang waktunya berdekatan

<sup>19)</sup> Ibid., hlm. 136-137.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

13

dengan peristiwa yang diteliti, dipakai sebagai usaha untuk memperoleh fakta-fakta menjadi data yang lebih dijamin kebenarannya. Dalam melakukan penelitian sumber-sumber tersebut, penulis banyak menemui kesukaran dalam memperoleh arsip dan dokumen pemerintah, sehingga dirasakan belum semua bahan-bahan tertulis dapat dikumpulkan. Sekalipun demikian, bahan-bahan yang penting yang telah dikumpulkan, dapat memadai untuk merekonstruksi peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli yang menjadi obyek studi ini. Dengan demikian, fakta-fakta yang terkumpul dan tersedia itu dapat diolah melalui kerangka pemikiran penelitian ini, sehingga gambaran dan rekonstruksi peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919 dapat diungkapkan sebagaimana adanya.

Penggunaan teori dan pendekatan sebagaimana yang disebutkan di atas itulah yang lazim digunakan dalam metode sejarah terutama pada periode zaman kolonial. Teori dan pendekatan itu pulalah yang digunakan dalam mengkaji peristiwa pemberontakan Tolitoli pada tahun 1919. Teori dan pendekatan tersebut sangat membantu dalam menelaah peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli yang menjadi tujuan penelitian ini.

Dokumen-dokumen tertulis, laporan-laporan pemerintah, berbagai surat kabar, dan penerbitan resmi lainnya yang terdapat di Arsip Nasional, Perustakaan Nasional, Perpustakaan KITLV LIPI, dan di perpustakaan lainnya telah dikumpulkan sebatas yang bisa dicapai. Apa yang telah terkumpul tersebut, tentu saja masih dirasakan kurang. Hal itu disebabkan karena terbatasnya waktu, dana, daya, dan kurangnya kemampuan bahasa

untuk memahami semuanya, sehingga bahan yang tersedia tidak dapat menjangkau secara tuntas dan menyeluruh.

#### F. Tinjauan Sumber

##### 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Buku-buku atau hasil penelitian yang berhubungan dengan peristiwa pemberontakan Tolitoli, dapat dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, adalah Skripsi S1 yang ditulis oleh Lukman yang berjudul, Perlawanan Rakyat Salumpaga terhadap Belanda. Skripsi tersebut merupakan tugas akhir pada Program Studi S1 Sejarah FKIP Universitas Tadulako pada tahun 1991. Dalam tulisannya tersebut, Lukman telah menguraikan mengenai perlawanan rakyat Salumpaga pada tahun 1919. Sumber yang dipakai, selain beberapa buku hasil penelitian sebelumnya juga melakukan wawancara dengan tokoh yang dianggap mengetahui peristiwa perlawanan rakyat Salumpaga. Skripsi ini tidak menggunakan sumber arsip, laporan pemerintah, dan penerbitan resmi yang terbit di sekitar peristiwa yang ditulis. *Kedua*, buku Mengenal Buol Tolitoli yang ditulis oleh Tim dari Pemerintah Daerah Tingkat II Tolitoli pada tahun 1983. Dari judulnya saja dapat diketahui, bahwa isinya hanya menjelaskan sejarah pembentukan daerah Tolitoli, asal-usul nama Tolitoli, raja yang berkuasa di Tolitoli pada masa lampau, dan pembangunan di Tolitoli. Sangat sedikit mengulas mengenai peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919.

Adalah sulit penulis menyebutnya sebagai sebuah buku, oleh karena sama sekali tidak menyebut metode yang digunakan, sumber-sumber yang dipakai, dan bahkan tidak mempunyai daftar pustaka. Hal itu mungkin disebabkan karena tanpa perencanaan yang matang, tanpa melibatkan ahli yang lebih memahami teori dan pendekatan sejarah, dan karena mungkin dikerjakan dengan agak terburu-buru. *Ketiga, Pemberontakan Tolitoli (3 Kaum SI Mati Digantung)* yang ditulis M. Lubis, anggota DPRD Kotamadya Manado pada tahun 1969. Buku ini, selain tidak memiliki daftar pustaka, juga tidak menjelaskan sumber yang dipakai dalam penulisannya, bahkan sama sekali tidak menggunakan teori dan pendekatan sebagaimana lazim dalam penulisan sejarah. Yang lebih banyak disoroti adalah mengenai pelaksanaan hukuman di tiang gantungan terhadap pelaku pembunuhan dalam peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli. *Keempat, Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Tengah* yang ditulis oleh Nurhayati Nainggolan dan kawan-kawan sebagai Tim dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1982/1983. Buku ini menguraikan sepintas tentang perlawanan rakyat Salumpaga terhadap Belanda dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. *Kelima, Sejarah Daerah Sulawesi Tengah* yang ditulis oleh Tim dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1984. Buku ini seperti juga Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Tengah dan hanya mengulas sepintas mengenai pemberontakan Tolitoli 1919 dengan

memakai metode wawancara dengan keluarga para pelaku sejarah dan studi pustaka. *Keenam*, Buku dokumentasi pribadi Hasan Tawil seorang cucu dari Imam Haji Hayyun, pemimpin Pemberontakan Tolitoli tahun 1919. Oleh karena sifatnya dokumentasi pribadi yang berisi catatan wawancara Hasan Tawil dengan beberapa orang pelaku pemberontakan yang kembali ke Tolitoli setelah menjalani hukuman penjara di Nusa Kambangan, maka hanya berupa lembaran yang tidak diterbitkan. Buku catatan tersebut ditulis oleh Hasan Tawil pada tahun 1970. Hasan Tawil adalah cucu dari Imam Haji Hayyun penasehat SI Salumpaga dan pemimpin pemberontakan Tolitoli 1919.

Meskipun buku-buku dan catatan yang telah dipaparkan di atas memiliki kelemahan metodologis apabila ditinjau dari penulisan sejarah kritis, akan tetapi apa yang telah dilakukan oleh para peneliti dan penulisnya sangat berarti untuk memulai dan mengembangkan minat penulisan sejarah Tolitoli dan Sulawesi Tengah yang masih sangat langka itu. Buku-buku dan hasil penelitian tersebut juga berguna untuk menelaah studi penulis mengenai pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919. Selain itu dan tentu saja studi ini hendak melakukan kajian historis yang lebih komprehensif dengan menggunakan teori dan pendekatan sejarah. Bahan-bahan yang menjadi sumber sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab metodologi penelitian adalah arsip, dokumen laporan pemerintah, surat kabar dan majalah, dan terbitan resmi lain yang terbit pada periode kolonial atau ketika terjadinya peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919.

## 2. Sumber-sumber yang Digunakan

Sejarah merupakan kumpulan peristiwa yang saling berhubungan yang membuat masa sekarang berbeda dengan masa lampau dan akan membuat masa sekarang berbeda dari masa depan.<sup>14)</sup>

Peristiwa-peristiwa yang berhubungan itu kemudian dikumpulkan dan ditulis berdasarkan sumber data yang dapat dijamin kebenarannya baik autentisitas maupun kredibilitasnya. Sesungguhnya peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu dapat menjadi informasi yang amat baik bagi kita di masa sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang. Informasi tentang peristiwa pada masa lampau terekam dalam dokumen-dokumen sebagai jejak dari kejadian yang sebenarnya. Jejak-jejak yang terekam yang memberi informasi tentang peristiwa sejarah dinamakan sumber sejarah.

Sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan tesis ini adalah arsip, memori laporan umum tahunan pemerintah kolonial, Koloniaal Verslag, Koloniaal Tidschrift, besluit, staatsblad, majalah, surat kabar, dan buku-buku.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan sejarah, maka sumber arsip merupakan sumber utama (primer), oleh karena arsip dibuat hampir bersamaan dengan peristiwa sejarah yang hendak diteliti, sehingga kadar obyektivitasnya lebih terjamin

<sup>14)</sup> Robert E. Neil dalam D.C. Korten & Syahrir (Penyunting) Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 46.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

18

apabila dibandingkan dengan sumber tertulis seperti buku.

a) Laporan Umum Tahunan Residen Celebes en Onderhorigheden tahun 1860 dalam Bundel Makassar koleksi ANRI nomor 1/6 yang menjelaskan situasi kultural, sosial ekonomi, dan sosial politik di Tolitoli pada Abad XIX.

b) Staatsblad van Nederland-Indie nomor 504 dan 7711 yang memuat tentang peraturan pelaksanaan kerja wajib di wilayah Karesidean Menado yang ditetapkan pada tahun 1912.

c) Besluit nomor 27 yang dikeluarkan di Buitenzorg pada tanggal 27 Nopember 1914 yang menetapkan mengenai kekuatan Armada laut di Tolitolidan sekitarnya, koleksi ANRI nomor 2367/14.

d) Besluit nomor 30 yang ditetapkan Buitenzorg pada tanggal 12 Maret 1919 yang memuat tentang pengawasan terhadap keamanan di Tolitolidan sekitarnya, koleksi ANRI nomor 6342/19.

e) Besluit Residen Menado nomor 63 yang dikeluarkan di Batavia pada tanggal 13 Desember 1919 yang berisi pengangkatan Yale Haji Muhammad Saleh menjadi Raja Tolitoli sebagai pengganti Mogi Haji Ali yang wafat dalam pemberontakan rakyat Tolitoli pada tanggal 5 Juni 1919, koleksi ANRI nomor 2951/19.

f) Besluit nomor 8 yang dikeluarkan di Cipanas pada tanggal 8 Oktober 1920 tentang penjelasan peta dan wilayah Tolitoli, koleksi ANRI nomor 1489/26.

g) Sumber dari Koloniaal Verslag tahun 1920, 1921, dan 1922 yang merupakan laporan pemerintahan kolonial yang cukup penting untuk menjelaskan peristiwa pemberontakan rakyat

Tolitoli. Dalam laporan tahunan itu pemerintah kolonial juga melakukan pengamatan tentang berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, baik sosial politik, sosial ekonomi, dan kehidupan sosial keagamaan yang mempengaruhi keberadaan pemerintah kolonial di Tolitoli. Dalam laporan tersebut, Sarekat Islam dan perannya dalam kehidupan keagamaan politik sangat menjadi perhatian dari rezim kolonial.

h) Koloniaal Tijdschrift tahun 1919, 1920 dan 1921 yang memuat tentang laporan Tuan Ziesel dan tanggapan terhadap laporan Tuan Ziesel tentang peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli di Salumpaga pada tahun 1919.

i) Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kusten en Wetenschappen (TBG) yang diterbitkan pada tahun 1912. Isinya menyangkut keadaan Tolitoli pada awal Abad ke-20.

j) Tijdschrift van de Vereeniging van Gediplomeerde Gezaghebbers (TVGG) nomor 13 yang diterbitkan pada bulan Februari 1921 dan nomor 14 yang diterbitkan pada bulan Maret 1921. Tijdschrift van de Vereeniging van Gediplomeerde Gezaghebbers yang diterbitkan sejak 23 Agustus 1918 di Batavia atau Jakarta sekarang. Tijdschrift nomor 13 dan 14 yang telah disebutkan di atas menulis tentang Sarekat Islam di Tolitoli berikut peran sertanya dalam menanamkan pemahaman keagamaan dan membangkitkan jiwa kebangsaan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah kolonial.

k) Majalah de Indische Gids terbitan tahun 1919 dan 1920 dengan pemimpin redaksi E.A.A. van Heekeren. Sebuah majalah

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

20

yang juga banyak memuat tentang peranan Sarekat Islam dalam pemberontakan rakyat Tolitoli, termasuk juga di dalamnya mengenai kunjungan Abdul Muis wakil ketua CSI berikut pidatonya yang sangat mempengaruhi kebangkitan semangat rakyat Tolitoli terhadap penetrasi pemerintah kolonial.

l) Majalah Koloniaal Tijdschrift terbitan tahun 1919 yang memuat tentang "In Memoriam Johannes Petrus de Kat Angelino" controlir di Tolitoli yang terbunuh dalam pemberontakan rakyat Tolitoli pada bulan Juni 1919 di kampung Salumpaga yang terletak di wilayah Distrik Tolitoli Utara.

m) Surat Kabar Pangkal Kemadisean terbitan tanggal 15 Juni 1919 dan terbitan 15 Juli 1919 memuat tentang pembunuhan atas diri Kontrolir J.P. de Kat Angelino yang diakibatkan oleh hierendiensten dan ketidakmampuannya menjalankan pemerintahan di Tolitoli.

n) Surat Kabar De Locomotief yang terbit pada tanggal 10 Juni dan 13 Juni 1919 yang memuat tentang terjadinya pembunuhan terhadap J.P. de Kat Angelino berikut riwayat pekerjaan dan keberhasilannya selama ia bertugas di Manado, Bolang Mangodow, Gorontalo, dan Tolitoli.

o) Surat Kabar Djawa Tengah yang terbit pada tanggal 29 Desember 1919. Djawa Tengah tanggal 29 Desember 1919 memuat mengenai pelaksanaan hukuman penjara dan hukuman mati bagi para pelaku pemberontakan Tolitoli pada bulan Juni 1919.

p) Surat Kabar Bataviaasch Handelsblad, tanggal 11, 12, 14, 20, dan 21 Juni 1919.

q) Surat Kabar Soerabajasch Handelsblad, 20 Juli 1919.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

21

- r) Surat Kabat Soerabajasch Nieuwsblad, 11 Juni 1919.
- s) Surat Kabar Warta Hindia, 18 Juni 1919. Keempat surat kabar yang disebutkan terakhir, semuanya memuat mengenai gerakan pemberontakan rakyat Tolitoli pada bulan Juni 1919.
- t) Memorie van Overgave dari Residen Manado, Logeman pada bulan September 1922 yang menjelaskan serah terima jabatan dan di dalamnya menguraikan tentang meninggalnya Kontrolir J.P. de Kat Angelino, Haji Muhammad Ali Raja Tolitoli, dan sejumlah anggota polisi pada peristiwa pemberontakan 5 Juni 1919.
- u) Rapport Assisten-Resident van Donggala, 5 Desember 1919, koleksi ANRI nomor 1025/12.
- v) Rapport de Controleur van Tolitoli, 6 Mei 1919 koleksi ANRI nomor 152/Geheim Onderwerp : SI.
- w) Rapport De Mantri Politie, 20 Juni 1919, koleksi ANRI nomor 127/12.

Selanjutnya buku-buku sebagai sumber yang perlu dicatat antara lain : Politiek-Politioneele Overzichten van Nederlandsch-Indie, Bronnen publikatie, Deel I, 1927 - 1928, Bewerkt en ingeleid door *Harry A. Poeze*, yang diterbitkan oleh Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, 1982.

Meskipun buku ini secara temporal membahas peristiwa pada tahun 1927-1928, akan tetapi juga menjelaskan masalah yang melatar belakangnya, sehingga amat penting untuk dipakai sebagai sumber pendukung penelitian ini.

Buku yang merupakan disertasi dari A. P.E. Korver yang berjudul, Sarekat Islam 1912-1918 yang diterbitkan oleh Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam pada

tahun 1982 yang menarik untuk diperhatikan, oleh karena mengungkapkan dengan amat cermat tentang Organisasi Sarekat Islam yang merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang lengkap dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Organisasi ini pula yang jumlah anggotanya tidak ada yang mampu tandingi. Selain dilihat dari segi jumlah anggotanya, Sarekat Islam juga merupakan organisasi politik modern pertama yang muncul kemudian berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Kemenonjolan dari kehadiran Sarekat Islam adalah cita-cita emansipasi dan usaha mewujudkan *ratu adil*. Kedua hal itu telah menjadikan Sarekat Islam dapat menyebar sampai ke pelosok tanah air dalam waktu singkat, termasuk sampai di Tolitoli Sulawesi Tengah.

Buku The Emergence of Modern Indonesian Elite, yang ditulis oleh Prof. Robert van Niel, 1960, cukup penting untuk dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini, oleh karena mengungkapkan tentang bangkitnya elit modern Indonesia yang digerakkan dengan konsep emansipasi Sarekat Islam, peranannya amat besar. Buku ini telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Jaya pada tahun 1984 dengan judul Munculnya Elit Modern di Indonesia.

Buku The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942 yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1973, kemudian Deliar Noer, penulisnya sendiri telah menterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1912 yang diterbitkan pertama kali oleh Pustaka LP3ES sejak tahun 1980. Isinya sangat komprehensif dalam

memaparkan kiprah kehadiran organisasi Sarekat Islam.

Gerakan moderen Islam di Indonesia pada periode 1900-1942 dapat dikatakan sebagian besar berasal dari pembaharuan pemikiran dan sikap yang ditumbuhkan oleh Sarekat Islam terutama di bidang Politik.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis mengenai pembahasan tesis yang dimulai dari pengantar sampai dengan kesimpulan. Dalam Bab I, menyajikan tentang latar belakang pemikiran yang melandasi penulisan tesis. Dalam uraian latar belakang akan dijelaskan juga mengenai kerangka pemikiran, ruang lingkup dan permasalahan, sasaran studi, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan sumber, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II, akan dipaparkan tentang Tolitoli pada awal Abad ke-20 yang meliputi, latar belakang sejarah Tolitoli, keadaan alam dan letak geografis, keadaan penduduk, sosial ekonomi, sosial budaya, agama, sistem pertanian, dan kondisi kehidupan pedesaan.

Mengenai gambaran kebangkitan kehidupan keagamaan akan diuraikan dalam Bab III. Kebangkitan kehidupan keagamaan yang diuraikan tersebut mencakup masuknya Agama Islam di Tolitoli, naik haji, serta masuk dan berkembangnya organisasi Sarekat Islam sebagai organisasi modern pertama di Tolitoli.

Selanjutnya di dalam Bab IV adalah bab pembahasan. Dalam pembahasan tesis ini akan dijelaskan tentang keadaan masyarakat sebelum meletusnya peristiwa pemberontakan, proses terjadinya pemberontakan rakyat Tolitoli, penerapan kerja wajib sebagai penyebab utama pemberontakan. Bab IV selanjutnya juga membahas mengenai ideologi pemberontakan, kepemimpinan dalam pemberontakan, penumpasan pemberontakan oleh pemerintah dan akibat-akibat selanjutnya. Bab V membahas secara khusus penumpasan pemberontakan yang dilakukan oleh rezim kolonial. Bab V kemudian diakhiri dengan urai mengenai penggantian pimpinan di Tolitoli setelah pemberontakan berakhir, baik pimpinan dari pemerintah kolonial Belanda maupun pimpinan Kerajaan Tolitoli.

Pada Bab VI merupakan rangkuman kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab kesimpulan, dijelaskan dasar pikiran mengenai sebab-sebab utama terjadinya pemberontakan, sedikit mengenai jalannya peristiwa, upaya penumpasan, dan akibat-akibatnya di kemudian hari.

## BAB II TOLITOLI PADA AWAL ABAD XX

### A. Letak Geografis

Wilayah Tolitoli berada di sebelah utara garis khatulistiwa dalam koordinat  $0,35^{\circ}$ - $1, 20^{\circ}$  Lintang Utara dan  $120^{\circ}$ - $122, 09^{\circ}$  Bujur Timur yang terletak di ujung barat laut Pulau Sulawesi. Di sebelah Timur berbatasan dengan sungai Lakuan dan di sisi Barat dengan Ogoamas. Di sebelah Utara terdapat laut dan di sebelah Selatan dibatasi oleh pegunungan Tengah (Bukit Tolitoli). Sungai Lakuan sejak dulu menjadi batas antara daerah ini dengan Buol. Luas wilayah Tolitoli seluruhnya mencapai  $\pm$  5.000 kilometer persegi.<sup>43</sup>

Daerah Dondo dan Dampal yang kini termasuk Tolitoli, pada mulanya terpisah dengan daerah Tolitoli dan berada pada wilayah kekuasaan masing-masing, tapi tiba-tiba harus mengakui supremasi Tolitoli dan Banawa. Untuk membuat kekuatan wilayah yang besar dan luas, maka Dampal dan Dondo kemudian bergabung dengan Tolitoli. Mengenai batas di bagian selatan yang masih tidak berpenghuni sebagai garis pemisah alami antara kedua wilayah itu yaitu Dampal dan Dondo dan di wilayah seberangnya terletak di Teluk Tomini.

---

<sup>43</sup>Uraian lebih konprehensif mengenai keadaan dan geografis Tolitoli lihat Ronkel, "Nota betreffende het Landschap Tolitoli" dalam TEG 1912, hlm. 30. Lihat juga laporan Residen Manado nomor 4657 (1920) lampiran 2 yang dimuat dalam Besluit GG. Hindia Belanda No. 8. koleksi ANRI nomor 6/10.

## B. Latar Belakang Sejarah

Tolitoli menurut legenda masyarakat berasal dari kata Totolu yang berarti tiga orang.<sup>2)</sup> Tiga orang yang dimaksud adalah tiga manusia kayangan yang dipercayai turun ke bumi sebagai manusia pertama yang menghuni wilayah Tolitoli. Tiga manusia itu masing-masing Olisan Bulan, Bumbang Lanjat, dan Ue Saka. Dari ketiga nama itu kemudian menjadi sebutan Tontoli, namun setelah awal abad XX, nama itu jarang digunakan untuk selanjutnya tergantikan dengan sebutan Tolitoli sampai sekarang.<sup>3)</sup>

Pemerintah Belanda mulai memasuki wilayah Tolitoli pada tahun 1855. Piet Broogh merupakan orang pertama yang menginjakkan kakinya di tanah Tolitoli sebagai petugas yang ditunjuk oleh Residen Manado untuk melihat keadaan masyarakat dan wilayah Tolitoli.<sup>4)</sup>

Setelah Residen Manado mendapat laporan tentang keadaan masyarakat dan wilayah Tolitoli, maka Tolitoli kemudian dimasukkan menjadi bagian dari Karesidenan Manado dan berada di bawah afdeling Sulawesi Tengah. Penggabungan itu bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan pengaturan wilayah-wilayah yang secara geografis berada di dalam wilayah Karesidenan Manado.

<sup>2)</sup> Tjoek Soedarmadji, Mengenal Buol Tolitoli, (Tolitoli : Penda Tingkat II Tolitoli, 1983), hlm. 63.

<sup>3)</sup> Ibid.

<sup>4)</sup> Ronkel dalam TBG, 1912, op. cit., hlm. 27.

Selain itu, pemerintah kolonial juga berusaha mendapatkan wilayah baru yang dianggap potensial dalam meningkatkan perluasan keberadaan pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Utara dan Tengah. Pada tahun 1858 Tolitoli digabungkan dengan Karesidenan Celebes dan sekitarnya. Penggabungan itu bermaksud untuk memudahkan usaha menumpas perompak yang sangat mengganggu wilayah perairan. Penumpasan perompak selanjutnya dilakukan dengan memperkuat pangkalan Armada Laut di dekat Tolitoli. Sementara di Labuan Dede yang terletak di dekat Kampung Baru, telah dibangun sebuah gudang Batubara untuk memenuhi berbagai kebutuhan.<sup>5)</sup>

Pada tahun 1858, juga dibuat sebuah kontrak politik antara pemerintah dengan Raja Bantilan Safiuddin saat itu, untuk mengakui supremasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Tetapi mengingat hubungan pemerintahan Karesidenan Manado dengan daerah Tolitoli belum terlalu intensif, maka realisasi pelaksanaan ketentuan dalam kontrak itu tidak dapat berjalan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian.

Pada tahun 1868 Tolitoli kembali digabungkan dengan Karesidenan Manado dan berada dibawah Afdeling Sulawesi Tengah. Selanjutnya setelah Abdul Hamid wafat, ia kemudian digantikan oleh saudaranya yaitu Haji Ismail sebagai Raja Tolitoli dan dengan demikian kendali kerajaan selanjutnya berada di bawah kekuasaan Haji Ismail yang dianggap sangat

---

<sup>5)</sup> Ibid., hlm. 31.

cakap dalam menjalankan tugas.<sup>69</sup>

Sejak tahun 1862, kekuasaan pemerintahan di Tolitoli dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas yang ditunjuk oleh Residen Manado, namun setelah tahun 1865 tugas itu diambil alih oleh penguasa umum yang tugas pokoknya merupakan pengawas pangkalan batubara di Labuan Dede. Pangkalan itu dihapuskan pada tahun 1866, kemudian menjadi Pos Reserse. Pada tahun 1867 Raja Bantilan Safiuddin meminta kepada pemerintah supaya kekuasaan pemerintahan tradisional atas daerah Tolitoli dapat diserahkan kepemimpinannya kepada Abdul Hamid, walaupun bukan dari keturunannya sendiri. Penyerahan itu dilakukan karena Bantilan sudah tua dan sakit-sakitan. Pelimpahan tugas kepada orang lain yang bukan dari keturunannya pada saat itu disebabkan karena tidak ada anggota keluarga yang dianggap mampu. Mungkin hal itu bertentangan dengan adat setempat, karena seorang raja semasa hidupnya digantikan oleh orang lain seperti Abdul Hamid, namun dalam kenyataannya dapat diterima.

Meskipun Abdul Hamid merupakan pengganti raja pada saat itu, namun dalam kenyataannya Bantilan Safiuddin yang digantikannya masih tetap menjalankan kekuasaan. Rupanya penggantian itu hanya merupakan permainan agar pemerintah Belanda tidak dapat mengatur kekuasaan raja dengan seenaknya.<sup>70</sup>

Jika pada awal kehadirannya di Tolitoli, pemerintah Belanda tidak melakukan campur tangan dengan menonjol, maka

---

<sup>69</sup>Ibid.

<sup>70</sup>Ibid.

pada awal abad ke-20 campur tangan terjadi di hampir seluruh kehidupan sosial dan politik. Campur tangan tersebut dimulai dengan penandatanganan plakat pendek secara ketat. Sistem pemerintahan pada tingkat afdeling dan onder-afdeling diperbaharui dan disempurnakan. Plakat pendek bertujuan selain mengikat kekuasaan raja, juga guna memudahkan mengatur kebijaksanaan pemerintah terhadap penguasa pribumi dan penduduk setempat. Dengan demikian lebih banyak memungkinkan untuk mencampuri kondisi dalam negeri sebuah wilayah daerah dan bisa saja mengurangi kewibawaan raja yang dianggap kurang memperhatikan kemajuan dan kesejahteraan penduduk.<sup>8)</sup>

### C. Kedaaan Penduduk.

Penduduk Tolitoli terdiri atas dua kelompok, yaitu : *pertama*, penduduk asli, *kedua*, penduduk pendatang yang kemudian berdiam dan menetap untuk seterusnya, dan *ketiga*, penduduk pendatang namun tidak menetap seterusnya di Tolitoli. Penduduk yang termasuk kelompok pertama adalah suku Tolitoli, Dondo, dan Toraja, dan yang termasuk kelompok kedua adalah orang Bugis, Bajo, Kaili, Tomalasa, dan beberapa orang Mandar dan Gorontalo, sementara yang ketiga adalah para pedagang dan pendatang yang sekedar mengunjungi daerah Tolitoli.

Penduduk yang mendiami wilayah Dampal pada umumnya berasal dari suku Dampelas, sedangkan Dampelas merupakan

<sup>8)</sup>Nota van Toelichting Betreffende het Landschap Tolitoli dalam Besluit GG koleksi ANRI nomor 1065/8.

bagian dari wilayah Banawa yang menjadi pusat kerajaan Donggala. Penduduk yang berasal Dampelas tersebut mendiami wilayah Dampal diperkirakan pada awal abad ke-19.<sup>9)</sup>

Selain Dampal terdapat pula daerah Sojol yang didiami oleh penduduk suku Tinombo yang memiliki bahasa yang berbeda dengan penduduk Tolitoli dan Bugis yaitu menggunakan bahasa Lauie.

Penduduk suku Tolitoli pada umumnya tinggal daerah yang terletak di antara Sikotong dan Buol. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Gega yang juga digunakan oleh suku Moutong yang terletak di teluk Tomini. Sementara Suku Dondo memiliki kemiripan kepribadian dengan suku Moutong, namun menggunakan dialek bahasa yang berbeda yaitu bahasa Tiaie. Suku Dondo mendiami daerah pantai sepanjang teluk Banaga sampai Sikotong yang letaknya di sebelah utara Salomaraja. Jadi mereka berdiam di daerah Laisi, Malomba Tinabogan, dan Salomaraja.

Orang Toraja tinggal di bagian utara Tolitoli, yaitu di Tende, Bajugang, Binontoan. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Tiaie seperti orang Dondo. Pada awalnya orang Tolitoli adalah penghuni pantai, sedangkan suku Dondo kebanyakan mendiami wilayah pegunungan, namun setelah perkembangan waktu selanjutnya kebiasaan itu saling berubah dan keduanya saling membaaur baik di pingir pantai maupun di wilayah pegunungan.

Hubungan antara kedua suku itu cukup baik kecuali kadang-terjadi konflik kecil yang melibatkan keturunannya sebagai

---

<sup>9)</sup> Ibid.

akibat perkawinan antara kaum bangsawan Tolitoli dengan wanita suku Dondo. Akan tetapi suku Dondo yang sedikit terbelakang peradabannya dibandingkan suku asli Tolitoli yang lebih maju dan sederhana sifatnya.

Suku Toraja masih menganut kepercayaan animisme secara turun-temurun. Walaupun pemerintah kolonial telah beberapa tahun berada di Tolitoli dan turut berusaha mendekati mereka, namun sangat sulit menyesuaikan diri, bahkan cenderung mengisolasi diri dari kehidupan masyarakat lainnya.

Orang Bugis merupakan suku yang menonjol di berbagai bidang kehidupan, baik dari segi budaya, ketrampilan, etos kerja, dan kepribadian. Mereka kebanyakan adalah para pedagang yang membeli hasil hutan dari penduduk dan memasukkan barang keperluan di Tolitoli. Sebahagian di antara mereka adalah petani dan tukang kebun yang rajin, sehingga hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka memiliki kebun kelapa dan sawah yang bisa mereka nikmati hasilnya. Mereka terutama tinggal di Banaga, Buntoli, Sitadong, Kampung Baru, Malosong, Tende, Bajugang, dan Lingadang. Suku Bajo sebagai orang pelaut hampir semuanya tinggal di pantai. Mereka hidup dalam perahu dan mencari ikan. Di beberapa tempat mereka tinggal di pelabuhan (terutama peranakan Bajo) dan sebahagian membuka kebun kelapa dan juga berusaha mencari hasil hutan. Ini terjadi di Salumpaga, Kapasa, Galumpang, Lingadang, dan di pulau Tampilakang. Di antara suku peranakan Bajo cukup banyak yang lahir dari perkawinan orang Bajo dengan wanita dari suku lain. Suku Kaili yang termasuk tinggal di teluk

Palu penyebarannya hanya sampai di daerah Laisi. Mereka menggunakan bahasa Ledo. Suku Tomalasa tinggal dalam jumlah kecil di Liborang di utara teluk Banagan dan di selatan ujung Babanji dan kemudian di pulau Sunatang. Bahasa suku ini adalah "Dau". Di atas Kasimbar dan Santigi di teluk Tomini juga tinggal suku Tomalasa. Suku Mandar dan Gorontalo merupakan suku yang jumlahnya amat sedikit dibandingkan dengan suku-suku lain yang ada di Tolitoli. Mereka bertempat tinggal di Sinabaga dan Sioman.

Sementara orang asing adalah orang Cina, Arab, dan bangsa Belanda yang tinggal di Kampung Baru ibukota Tolitoli.<sup>40)</sup> Kehadiran orang lain di Tolitoli baik suku lain di luar Tolitoli maupun suku asing seperti Arab, Cina, dan Eropa selalu diterima baik oleh penduduk asli. Hal itu menunjukkan ciri keramahan dan sikap persaudaran yang baik bagi penduduk asli Tolitoli.

Pinsip tersebut berdasarkan anggapan bahwa kedatangan orang lain sudah barang tentu menambah pengalaman pengetahuan bagi penduduk asli. Dari etos kerja orang Bugis misalnya dapat dipelajari dan ditiru dalam meningkatkan usaha pada bidang petanian dan perdagangan. Adalah mungkin pula suku lain yang datang ke Tolitoli dapat menimba pengalaman kepada penduduk asli Tolitoli dalam berbagai hal dan begitu pula sebaliknya.

---

<sup>40)</sup>Ibid.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

33

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Tolitoli pada Tahun 1919/1920.<sup>41)</sup>

No.	Nama Kampung	Jumlah Jiwa	Keterangan
1.	Lakuan	170	
2.	Binontoan	511	
3.	Pinjan	153	
4.	Salumpaga	595	
5.	Laolalang	256	
6.	Santigi	318	
7.	Lingadang	728	
8.	Kapas	317	
9.	Galumpang	905	
10.	Bajugan	600	
11.	Tende	590	
12.	Lalos	480	
13.	Kalangkangan	503	
14.	Kampung Baru	1214	
15.	Nalu	1172	
16.	Pulias	75	
17.	Kabetan	244	
18.	Labuan Lobo	218	
19.	Bilo	137	
20.	Buga	220	
21.	Kamalu	300	
22.	Salugan	317	
23.	Lampasio	155	
24.	Talud	172	
25.	Malalang	373	
26.	Tinabogan	594	
27.	Elbalomba	451	
28.	Laisi	601	
29.	Salumbia	557	
30.	Banagan	897	
31.	Tompo	268	
32.	Batumpolas	157	
33.	Sematang	386	
34.	Bambapula	408	
35.	Ogotua	576	
36.	Dampal	389	
Jumlah Total =		16007 Jiwa	

<sup>41)</sup> Lihat Salinan Besluit GG. No. 8 (1920) koleksi ANRI 1065/8, *op. cit.*, hlm. 1-2.

#### D. Kondisi Politik

Tolitoli sebagai sebuah daerah yang terletak antara sungai Lakuan dan kampung Sikotong, berada di bawah kekuasaan langsung seorang raja yang berkedudukan di Nalu. Raja juga disebut Sultan Tolitoli, sedangkan gelar daerahnya disebut kalangan. Proses pewarisan kekuasaan raja diatur dengan tradisi setempat. Apabila raja meninggal dunia, maka anggota keluarga yang tertua akan menggantikannya. Bilamana anggota keluarga dari saudaranya tidak ada, yang menggantikannya adalah anak sulung dari seorang raja yang meninggal dunia.

Suku Tolitoli dan suku lain sejak sebelum masuknya rezim Belanda harus menyerahkan seper sepuluh dari hasil hutan yang mereka miliki untuk diberikan kepada raja. Mereka juga harus membantu raja dengan uang dan makanan apabila raja merayakan pesta. Pajak teratur sebesar f 2 perkeluarga dipungut untuk kepentingan raja. Rakyat juga diharuskan bekerja membuka kebun dan membangun rumah. Penduduk Laisi, Malomba, Tinabogan, Salomaraja, dan Dampal menyerahkan beras putih dan uang sebagai tanda tunduk dan rasa hormat kepada Raja Tolitoli.<sup>12)</sup>

Pelaksanaan wajib kerja bakti juga dilaksanakan oleh penduduk Tolitoli sebagai bentuk pengabdian rakyat kepada rajanya. Setelah masuknya pemerintah Belanda, tradisi kerja bakti yang bersifat pengabdian kepada raja itu kemudian diganti menjadi kerja wajib untuk membangun jalan dan jembatan

<sup>12)</sup> Ibid, hlm. 3.

umum di bawah pengawasan pemerintah Belanda. Di samping wajib kerja bakti dan pungutan pajak, juga ada semacam persembahan uang kepada raja apabila hasil pertanian penduduk melimpah. Raja menganggap wilayah daerah kekuasaannya sebagai hak miliknya. Setelah masa kolonial masuk di Tolitoli, bentuk dan sifat pengabdian penduduk berubah dan bertambah berat, karena selain pengabdian kepada raja, juga harus ditambah lagi dengan adanya kewajiban terhadap perintah kolonial berupa kerja wajib dan pembayaran pajak. Penambahan beban rakyat sudah barang tentu menyebabkan semakin beratnya resiko yang menimpa penduduk pribumi Tolitoli.

Penghasilan penduduk dan pemerintah mulai diubah dan diatur berdasarkan administrasi modern di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Dalam keadaan seperti itu para penduduk tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan lain kecuali menuruti apa adanya.

Raja dibantu oleh beberapa pejabat di bawahnya yaitu sebagai wakil raja adalah raja muda. Selanjutnya berturut-turut di bawahnya adalah iogugu, svahbandar, kapitan laut, todaka, mavor, kapten raja, anak kupuno, dan sulea.<sup>13)</sup> Pekerjaan mereka adalah membantu raja. Mereka tidak berhak memberikan perintah kecuali raja muda mempunyai hak perintah apabila raja berhalangan. Para pembantu raja itu diangkat oleh raja sesuai pilihan raja sendiri berdasarkan kemampuannya. Mereka digaji oleh raja berdasarkan uang pajak dan upeti yang

---

<sup>13)</sup>Lihat Ronkel dalam TBG (1912), *op. cit.*, hlm. 44.

berasal dari penduduk. Suku lain sebenarnya juga memiliki rajanya masing-masing yang disebut *olongian*, namun mengakui kekuasaan Raja Tolitoli. Para *olongian* itu dijumpai di Laisi, Malomba, Salomaraja, dan Tinabogan, sedangkan raja Dampal disebut *ardika*. Sementara di kampung-kampung dipimpin oleh para kepala. Kepala wilayah yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial terletak antara gunung Bulu Labuan Dede, Bulu Kampung Baru, Bulu Sambulengang, Sungai Lonte, dan Teluk Tolitoli. Mereka memiliki gelar kepala sedangkan wakilnya disebut *ado*.

Orang-orang Bugis dan suku Bajo yang tinggal di Sioman dan Tampele kang berada di bawah kepalanya sendiri, tetapi mereka harus berhubungan dengan para kepala pribumi setempat atau di tempat mereka berada. Para kepala Bugis disebut kepala sedang yang dari Bajo disebut *jogugu* dan *kepala*. Para kepala kampung diangkat oleh raja dan mereka juga mendapat upah 10 % dari pajak penghasilan yang dipungut dari penduduk.

Ketika pemerintah kolonial Belanda masuk di Tolitoli, raja yang memegang kekuasaan pada saat itu adalah Bantilan Syaifuddin (1859-1867).<sup>14)</sup> Pada awalnya Raja Bantilan menyambut baik kedatangan pemerintah kolonial Belanda sebagai tamu asing yang layak mendapat penghormatan. Oleh karena pemerintah kolonial Belanda bersikap mau mencampuri pemerintahannya, maka Raja Bantilan mulai menunjukkan sikap tidak bersahabat. Pemerintah Belanda misalnya sudah mulai mengajukan berbagai

---

<sup>14)</sup>Tjoek Soedarmadji (1983), *op. cit.*, hlm. 76.

tuntutan terhadap wilayah daerah dan pemerintahan Tolitoli. Raja Bantilan berusaha menolak semua tuntutan itu, namun oleh karena pemerintah Belanda mengancam dengan agresi militer yang didukung dengan polisi dan fasilitas senjata modern, maka Raja Bantilan harus menyetujui dan menandatangani Lange Contract (kontrak panjang) pada tanggal 5 Juli 1858 dengan Kontrolir Dirk Francois.<sup>15)</sup> Kontrak tersebut selanjutnya disetujui dan disahkan dengan keputusan residen Manado nomor 25 pada tanggal 8 Januari 1859. Berdasarkan surat keputusan Residen Manado tersebut barulah Raja Bantilan mulai menjalankan kekuasaannya sebagai raja.

Kontrak yang ditandatangani Bantilan berisi tentang pengakuan Raja Tolitoli terhadap kekuasaan pemerintah Belanda atas seluruh wilayah Tolitoli. Akan tetapi mengenai urusan kerajaan tetap sepenuhnya di bawah kekuasaan Raja Tolitoli, sedangkan urusan dengan wilayah, masyarakat, keamanan, dan hubungan luar berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Raja Bantilan Syaifuddin meninggal dunia pada akhir tahun 1867 dan sebagai pengantinya adalah Haji Abdul Hamid yang mulai berkuasa secara sah pada tahun 1869-1901. Pada masa kepemimpinan Raja Haji Abdul Hamid Bantilan, selain melakukan kerja sama dengan pemerintah Belanda, Raja Tolitoli itu mulai merintis kontak hubungan dengan penduduk luar wilayah Tolitoli dalam usahanya mengirim barang dagangan hasil bumi di daerahnya. Daerah-daerah yang dihubungi itu, seperti Makassar,

<sup>15)</sup> TBG (1912), op. cit hlm. 45.

Ternate, Banjarmasin, dan lain sebagainya. Daerah- daerah yang dituju itu juga diharapkan dapat mengirim hasil daerahnya ke Tolitoli yang dibutuhkan. Dengan lancarnya hubungan dagang dengan daerah lain, maka mulai pada saat itulah orang Cina mulai masuk di daerah Tolitoli karena mereka melihat ada peluang untuk mengembangkan usaha dagang, sedangkan pendatang Arab terlebih dahulu masuk Tolitoli bersamaan dengan mulai berkembangnya Agama Islam di Tolitoli.<sup>16)</sup>

Setelah Raja Haji Abdul Hamid Bantilan meninggal dunia pada tahun 1901, penggantinya tidak langsung diangkat menjadi raja, melainkan dijabat sementara oleh raja muda sampai dengan tahun 1908. Pada tahun 1908 Haji Ismail Bantilan diangkat menjadi Raja Tolitoli setelah menandatangani Korte Verklaring nomor 1 pada tanggal 12 Pebruari 1908 dengan pemerintah Belanda.<sup>24)</sup>

Penandatanganan Plakat Pendek selain merupakan pengakuan terhadap kehadiran dan kekuasaan pemerintah Belanda di Tolitoli, tetapi juga merupakan tanda bahwa raja yang diangkat harus mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda.

Isi Plakat Pendek nomor 1 yang ditandatangani oleh Haji Ismail Bantilan Raja Tolitoli pada tanggal 12 Pebruari 1908

---

16)

Orang Cina yang pertama sekali tinggal dan berada di Tolitoli adalah Hong Bie dan usaha dagangnya begitu cepat berkembang karena dengan kerja keras dan juga karena mendapat perlindungan dari pemerintah Belanda, sedangkan pendatang Arab tidak diketahui siapa dan kapan waktu awal kedatangannya, yang jelas setelah Agama Islam berkembang di Tolitoli. Baca Tjoek Soedarmadji (1983), *op. cit.*, hlm. 77.

meliputi : Pertama, daerahnya adalah bagian dari Hindia Belanda yang berada di bawah kekuasaan Induk Negeri Belanda dan sebagai pemimpinnya adalah Gubernur Jenderal. Kedua, tidak akan mengadakan hubungan politik dengan negara-negara asing yang berseteru dengan Negeri Belanda. Ketiga, Akan memenuhi dan mempertahankan semua peraturan yang dilakukan atas nama Ratu Belanda, Gubernur Jenderal atau wakilnya. Keempat, Kerajaan Tolitoli tidak boleh melakukan hubungan politik dengan kerajaan lainnya tanpa izin dan persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda. Kelima, segala kebijakan kekuasaan Raja Tolitoli harus bersumber dan berdasar dari kebijakan pemerintah Belanda.<sup>17)</sup>

Sesuai dengan lima isi plakat pendek yang ditandatangani oleh Haji Ismail Bantilan, maka kekuasaan Raja Tolitoli sangat terbatas dan kedudukan sebagai raja hanya merupakan lambang. Akan tetapi, Raja Haji Ismail selalu melanggar isi perjanjian itu sebagai sikap perlawanan terhadap penindasan pemerintah kolonial yang dianggap sangat merugikan kekuasaan raja dan masa depan rakyatnya. Tindakan pelanggaran Raja Haji Ismail menunjukkan bahwa ia merupakan Raja Tolitoli yang berani melawan pemerintah kolonial Belanda, walaupun wujud perlawanan itu tidak dalam bentuk pemberontakan fisik. Sejarah mencatat, bahwa di antara semua Raja Tolitoli yang dibahas dalam penelitian ini, Raja Haji Ismail merupakan sosok

---

<sup>17)</sup> Ibid., hlm. 77-78.

raja yang terus terang dan berani melakukan perlawanan terhadap Belanda walaupun dalam bentuk sikap dan kebijakannya sebagai Raja Tolitoli. Akibat keberaniannya itu Raja Haji Ismail pernah ditahan oleh pemerintah Belanda selama enam bulan di Donggala namun dibebaskan kembali.<sup>18)</sup>

Raja Haji Ismail Bantilan memiliki empat putra yaitu, Haji Muhammad Ali, Haji Muhammad Saleh, Achmad, dan Muhammad. Setelah Haji Ismail Bantilan wafat, sebagai penggantinya adalah Haji Muhammad Ali, namun banyak pihak keluarga yang tidak menginginkan kenaikannya sebagai Raja Tolitoli oleh karena berbagai sebab, termasuk Haji Ismail ayahnya sendiri. Haji Ismail menginginkan agar Raja Muda Tegelan menjadi raja karena dianggap banyak pengalaman untuk memangku jabatan. Pada tahun 1915 Mogi Haji Ali mengunduran diri sebagai pegawai pemerintah kolonial kemudian menyatakan diri sebagai putra mahkota (raja muda). Ketika itu Mogi Haji Ali berupaya tampil sebagai pewaris tahta kerajaan dan menyatakan diri sebagai pengganti ayahnya Haji Ismail, sehingga ia tidak disenangi. Meskipun banyak pihak keluarga setuju pada Raja Muda Tegelan, tetapi Kontrolir J.P. de Kat Angelino menganggap Haji Muhammad Ali atau dikenal dengan panggilan Mogi Haji Ali sangat tepat menduduki kursi Raja Tolitoli. Dukungan kontrolir pada saat itu merupakan penentu siapa yang bakal menjadi Raja Tolitoli dan Mogi Haji Ali dengan sendirinya kemudian terpilih dan dilantik sebagai Raja Tolitoli pada tahun 1918. Ketidaksetuju-

---

<sup>18)</sup>

Ibid.

uan berbagai pihak terhadap pengangkatan Mogi Haji Ali selain karena unsur politis, juga oleh karena yang bersangkutan mempunyai sikap kerja sama dengan pemerintah Belanda dan berbeda dengan pendahulunya Haji Ismail yang sangat kuat dalam mempertahankan prinsip. Selain itu Mogi Haji Ali juga adalah Ketua SI Daerah Tolitoli yang seharusnya banyak memperjuangkan kepentingan rakyat pribumi yang selalu mendapat tekanan dan penindasan dari pemerintah kolonial.

Pada tanggal 27 Juli 1918 Mogi Haji Ali menandatangani Plakat Pendek sebagai pengesahan dan persetujuan untuk diangkat menjadi Raja Tolitoli menggantikan Haji Ismail Bantilan.<sup>159</sup> Pada masa kepemimpinan Raja Mogi Haji Ali inilah terjadi banyak kegiatan SI Tolitoli, oleh karena Raja Mogi Haji Ali juga merupakan Ketua (Presiden) SI Tolitoli. Dalam keadaan seperti itu Raja Mogi Haji Ali menghadapi dilema antara tuntutan anggota SI yang selalu radikal terhadap kebijaksanaan pemerintah Belanda dan keberadaan dirinya sebagai bagian dari kekuasaan Belanda di Tolitoli yang telah menyetujui dan menandatangani perjanjian dalam plakat pendek tahun 1918. Pada masa kepemimpinan Raja Mogi Haji pulalah pelaksanaan heerendiensten dan belasting (kerja wajib dan pungutan pajak) sangat meningkat. Tidak dilaporkan bagaimana dan berapa perbedaan kerja wajib dan pungutan pajak pada masa itu dibandingkan dengan sebelum Mogi Haji Ali menjadi Raja Tolitoli, yang jelas peningkatan tersebut sangat dirasakan

<sup>159</sup> Lihat Memori van Overgave (MVO), Residen Manado pada bulan November 1918.

oleh rakyat yang mengalaminya. Dua program itu adalah aturan pemerintah Belanda yang tidak bisa ditolak oleh Raja Tolitoli yang dasar kepemimpinannya sesuai dengan isi Korte Verklaring yang ditandatangani oleh Raja Mogi Haji Ali ketika yang bersangkutan diangkat menjadi Raja Tolitoli. Sementara Raja Mogi Haji Ali sebagai Ketua SI juga dituntut untuk mengurangi beban penduduk, bahkan bila perlu menghapuskannya sama sekali dari kerja wajib dan pungutan pajak yang amat memberatkan itu. Dilema seperti demikian menjadi beban pikiran bagi Raja Mogi Haji Ali, namun dalam kenyataannya ia lebih memilih berpihak kepada kemauan pemerintah karena lebih berhubungan dengan keberadaannya sebagai Raja Tolitoli dari pada memilih untuk berpihak pada tanggung jawabnya sebagai Ketua SI.

Pada masa kepemimpinan Raja Mogi Haji Ali sebagai Raja Tolitoli, pengurus Central Sarekat Islam (CSI) mengadakan kunjungan ke Daerah Tolitoli seperti Sostro Kardono Sekretaris Jenderal CSI dan Abdul Muis Wakil Ketua CSI. Abdul Muis mengadakan kunjungan pada bulan Mei 1919 dan mengadakan openbaar di hadapan anggota SI dan masyarakat Islam Tolitoli. Kunjungan Abdul Muis inilah sebagai penyebab meletusnya pemberontakan Tolitoli 1919 yang akan diuraikan dalam tesis ini pada bab pembahasan.

Raja Mogi Haji Ali kemudian gugur pada tanggal 5 Juni 1919 dalam pemberontakan rakyat yang terjadi di kampung Salumpaga. Ketika itu, ia bersama Kontrolir Angelino mengadakan perjalanan dinas menyelesaikan pembangkangan para

pekerja wajib dari Salumpaga yang meninggalkan kewajibannya. Mogi Haji Ali gugur bersama Kontrolir Angelino dan delapan anggota rombongan lainnya dalam pemberontakan rakyat yang bersejarah itu. Untuk melanjutkan roda kepemimpinan Kerajaan Tolitoli, maka Kontrolir Hoerklotz menunjuk Yale Haji Muhammad Saleh sebagai pengganti almarhum Mogi Haji Ali sebagai Raja Tolitoli. Kontrolir Hoerklotz merupakan kontrolir Tolitoli yang menggantikan J.P. de Kat Angelino yang turut gugur dalam pemberontakan rakyat Tolitoli di kampung Salumpaga. Yale Haji Muhammad Saleh menjadi Raja Tolitoli pada tahun 1920-1922. Pengangkatan Yale Haji Muhammad Saleh Bantilan berdasarkan Plakat Pendek yang ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 1920.<sup>20)</sup>

Terpilihnya Haji Muhammad Saleh merupakan keberuntungan yang bersangkutan setelah lolos dari ancaman pembunuhan oleh kaum pemberontak pada peristiwa 5 Juni 1919. Muncul pertanyaan mengapa bukan Raja Muda Tagelan yang menjadi Raja Tolitoli? Jawaban ada dua. Pertama, dalam tradisi penggantian Raja Tolitoli, bahwa yang berhak menggantikan raja adalah saudara dari raja yang diganti atau anak dari raja yang diganti. Sementara Tagelan tidak termasuk dari kriteria tersebut, melainkan hanya saudara sepupu dari Mogi Haji Ali. Kedua, yang menentukan siapa yang menjadi raja pada saat itu adalah kontrolir setelah berkonsultasi dengan Residen Manado, sehingga Yale terpilih atas pertimbangan tersebut di atas.

---

<sup>20)</sup>Lihat Rongke dalam TBG (1921), *op. cit.*, hlm. 57.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

44

Raja Tolitoli yang baru Yale Haji Muhammad Saleh menghadapi situasi yang berbeda dengan pendahulunya. Perbedaan situasi tersebut berkenaan dengan terjadinya pemberontakan 1919. Satu hal yang amat berubah, misalnya pemerintah kolonial untuk sementara waktu tidak melaksanakan program kerja wajib, sedangkan pungutan pajak kepada penduduk tetap berjalan.

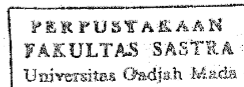
Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang bersifat serimonial tidak dilakukan oleh masyarakat kecuali ritual terutama pada awal-awal kepemimpinan Raja Tolitoli Yalle Haji Muhammad Ali dan Kontrolir Herkloez. Hal itu merupakan bentuk kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya kembali gerakan pemberontakan rakyat. Organisasi Sarekat Islam beserta para pengurus yang telah dibekukan oleh pemerintah kolonial tidak tampak, sekalipun dalam pembicaraan biasa di tengah masyarakat. Selain kewaspadaan pemerintah terhadap kemungkinan munculnya kembali gerakan pemberontakan, rakyat juga pada umumnya tidak menginginkan terulangnya peristiwa berdarah tersebut.

#### E. Keadaan Sosial Ekonomi

Pada awal Abad XX keadaan sosial ekonomi penduduk Tolitoli masih sangat memprihatinkan, karena pada umumnya penduduk berada dalam kemiskinan. Sumber utama kehidupan penduduk sangat tergantung dari sawah dan kebun yang menjadi lahan garapannya. Sumber lain yang berasal dari hasil hutan dan sebagai nelayan tradisional tidak banyak membantu meningkatkan taraf hidup rakyat, karena pencarian hasil hutan dan penangkapan ikan merupakan pekerjaan sampingan. Hanyalah suku Bajo yang lebih banyak menekuni pekerjaan sebagai nelayan namun mereka juga tetap menggarap sawah atau kebun sebagai sumber yang dapat menyediakan makanan pokok berupa beras dan jagung.

Bahwa pada awal Abad XX penduduk Tolitoli telah menemukan hasil hutan berupa kayu, rotan, dan damar yang dapat diekspor dan diantarpulaukan. Usaha menanam pohon kelapa mulai pula dikerjakan penduduk. Harga rotan per pikul sebesar f 10, sedangkan harga damar sebesar f 12, 50 per pikul. Tanduk rusa yang menjadi hasil buruan penduduk laku dijual dengan f 12, 50 per seratus batang.<sup>21)</sup> Akan tetapi usaha-usaha mendapatkan hasil hutan yang disebutkan di atas tidak banyak membantu meningkatkan taraf hidup penduduk, karena selain sifatnya insidental, juga hasil-hasil tersebut lebih banyak menjadi hak dan keuntungan pemerintah. Sementara rakyat hanya mendapat

<sup>21)</sup> TBG (1912), *ibid.*, hlm. 33.



upah sesuai dengan jumlah pekerjaannya.

Sebenarnya jumlah curah hujan di Tolitoli melebihi curah hujan rata-rata di Sulawesi yaitu sebanyak 175 MM per bulan, namun karena penduduk tidak memiliki ketrampilan mengolah pertaniannya dengan baik dan ditambah lagi terbatasnya waktu yang mereka miliki, maka hasil pertanian sebagai kebutuhan pokok selalu tidak mencukupi. Keterbatasan waktu yang dimaksud adalah karena tenaga kerja para petani lebih banyak dieksploitasi oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan mereka.

Raja memiliki tanah sawah dan kebun yang amat luas. Tanah milik raja biasanya ditanami padi dan jagung seperti tanah rakyat pada umumnya, namun pelaksanaan penanaman, perawatan hingga panen dibebankan kepada rakyat. Walaupun rakyat yang ditugaskan untuk mengurus pertanian raja mendapat bagian dari hasil pertanian tersebut, selain jumlahnya amat sedikit, tetapi juga cukup memberatkan dan banyak menyita waktu maupun tenaga kerja rakyat petani.

Pada awal abad ke-20 jumlah produksi beras dan jagung tidak mencukupi kebutuhan penduduk, sehingga harus diimpor dari daerah lain. Keadaan seperti itu tentu saja sangat memperhatikan, sebab setiap tahun harus menghadapi masa krisis dan selalu mengharapkan pemasukan beras sebagai bahan makanan pokok dari daerah lain.

Belakangan ini justeru terbalik, sawah sudah mulai banyak dibuka. Tujuannya jelas agar semua penduduk memiliki sawah sendiri untuk memproduksi beras. Dengan mengubah kebijaksanaan

itu tampaklah sawah di berbagai kampung terutama di Banagan, Malalang, Kampung Baru, Libo, dan Kapas. Kampung-kampung itu menjadi lumbung beras bagi daerah Tolitoli. Dalam pengolahan sawah mulai digunakan alat bajak dengan bantuan tenaga kerbau. Di ladang ditanami juga padi dan jagung secara tumpang sari. Sayur-sayuran juga ditanami di ladang. Apabila beras kekurangan, maka jagung menjadi makanan pengganti, begitu pula sagu merupakan pengganti apabila stok beras dan jagung tidak tersedia. Pohon sagu kebanyakan tumbuh sendiri di daerah-daerah basah, rawa-rawa, di dataran rendah dekat sungai.

Tanaman tembakau terdapat di Tende, Salumpaga, Binantoan, dan Lakuan, namun jumlahnya sedikit. Oleh karena cara pengolahannya tidak baik, tembakau tersebut selain jumlahnya sedikit, juga mutunya sangat rendah, sehingga terdesak oleh tembakau yang dikirim dari Jawa. Meskipun bibit tembakau pernah didatangkan dari Payakumbuh, tapi hasilnya juga tidak memuaskan. Tanaman tebu dilakukan oleh sebagian kecil penduduk di ladang hanya sebagai pemanis mulut. Tanaman lain yang ada berupa coklat, kopi, mangga, durian, pisang, langsung, nangka, pepaya, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Di Tende dijumpai pohon pala dan aren. Yang terakhir itu, sebagai bahan pembuat gula yang terdapat juga di Lalos, Keko, Kalangkangan, Ogomoli, Galumpang dan Tinabogan. Hasil produksi gula itu dibawa ke Berouw, Bulungan, Sumalata, dan Ternate. Sementara pohon kelapa terdapat di sepanjang kepulauan yang ada di seluruh Tolitoli dan tanah untuk tanaman itu disediakan amat luas. Di pulau Kabitan terdapat konsesi pertanian milik orang

Belanda yang ditanami pohon kelapa yang tenaga kerjanya didatangkan dari Jawa.<sup>22)</sup>

Jumlah ternak di Tolitoli tidak begitu banyak. Pada tahun 1905 sampai dengan tahun 1910 jumlahnya cukup banyak, tapi karena wabah penyakit tak diketahui, banyak ternak yang mati, terutama kambing dan kuda. Ternak sapi populasinya sedikit, sedangkan kerbau lebih banyak, terutama di Kampung Baru, Bajungan, Kapas, dan Bonagan. Kerbau dipelihara terutama untuk keperluan membajak sawah. Ada juga kerbau liar, tapi kepemilikannya khusus untuk raja dan syahbandar.

Populasi kuda juga tidak banyak. Sistem peternakannya tidak teratur dan sangat tradisional, sementara sistem peternakan yang baik belum mereka ketahui dan tidak digunakan penduduk. Tentang perunggasan seperti itik dan ayam jumlah pemeliharannya cukup banyak. Terutama ayam hampir semua warga masyarakat setempat memilikinya, namun dipelihara secara tradisional. Suku Bajo merupakan penduduk yang menggemar menangkap ikan baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual. Alat penangkapnya berupa jala dan pancing. Dengan penerangan lampu obor, ikan-ikan kecil ditangkap dengan jala pada malam harinya.<sup>23)</sup>

Pada tahun 1908 ekspor ikan kering, teripang, kerang mutiara, dan kapi-kapi dengan harga sebagai berikut : f 3-10 per 100 potong, f 7-40 per pikul, atau f 7,50-15 per kati, f 6

---

<sup>22)</sup> Ibid., hlm. 34-36.

<sup>23)</sup> Ibid.

per pikul, dan f 30 per pikul.

Kondisi harga ternak, baik penjualan di tempat maupun ekspor adalah sebagai berikut : sapi f 30, kuda f 40, kerbau seharga f 45, domba f 6-10, dan kambing f 3.<sup>24)</sup>

Dari setiap penduduk, pajak dipungut sebesar 3 % dari pendapatan tahunan yang hasilnya mencapai sekitar f 17 ribu. Dari jumlah itu, pajak penghasilan diserahkan ke kas daerah yang dikelola sendiri dan digunakan bagi pengeluaran yang diperlukan untuk kepentingan setempat. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan pembayaran pajak, baik individu maupun pajak usaha. Pajak-pajak yang terkumpul tidak untuk kepentingan untuk mengisi kas lokal melainkan untuk kepentingan negara. Penetapan pajak penghasilan terutama pajak yang dilakukan oleh penguasa lokal bersama pimpinan yang terkait. Sementara kepala yang terkait mengawasi pemungutan pajak yang dimaksud. Untuk pemungutan pajak itu, kepala menerima 7 % dan untuk pajak penghasilan 10 % dari jumlah pajak yang masuk.<sup>25)</sup>

#### F. Hasil Industri dan Komoditi Ekspor

Industri pembangunan rumah maupun perahu dibuat dan dilakukan oleh penduduk setempat. Pembuatan perahu dikerjakan di kampung-kampung dekat pantai. Perahu yang ada terbuat dari pohon besar yang ada dalam hutan. Bentuk perahu biasanya

<sup>24)</sup> Ibid., hlm. 40.

<sup>25)</sup> Ibid., hlm. 44.

dilengkapi dengan sayap. Untuk pelayaran pantai yang dilakukan oleh kapal uap, dibuatkan juga perahu model bebas. Daya muatnya berbeda-beda antara 5 sampai 50 pikul. Tukang kayu yang ada amat kurang dan apabila ada cara kerjanya masih tradisional dan amat kasar. Para pandai besi, emas, dan perak kebanyakan orang asing yang datang dari Banjarmasin. Kerajinan kayu dan tanduk dibuat untuk keris dan golok, jumlahnya pun tidak banyak, sedangkan kain ditenun oleh ibu rumah tangga dan gadis dengan pola sederhana. Pola-pola yang halus dan lebih maju didatangkan dari Makassar dan dikerjakan di Tolitoli, sehingga hasilnya menyenangkan untuk dipakai. Sementara seni membuat jala dilakukan oleh banyak penduduk di berbagai kampung. Industri kerajinan anyaman tikar, hiasan, dan sebagainya ada juga dengan jumlah terbatas. Demikian pula dengan pembuatan pot dari tanah liat disertai dengan ukiran sedang, terdapat di Keko dan Malambisu. Untuk produksi garam hanya sedikit dilakukan oleh penduduk setempat, padahal kebutuhan lainnya didatangkan dari Makassar dengan harga jual f 5 per pikul.

Produksi hutan seperti rotan, damar, dan mengkudu dikumpulkan oleh penduduk di pegunungan kemudian dibawa ke pantai untuk mendapatkan pembeli. Penduduk pengumpul terutama bagi mereka yang telah menerima uang muka dari pedagang. Rotan diekspor sebanyak 5627 pikul. Terdapat 12 jenis rotan yaitu, tongka, ronti, salumpia, malike, danna, batu cala, lanun, pulu, ombolo, taimanu, dan sabu. Tiga jenis yang disebutkan pertama adalah yang amat bermutu.

Jenis rotan mengkudu diekspor dengan teratur selama tahun

1908 sampai sebanyak 13 pikul. Mengingat pengumpulan damar amat sulit dan harganya sangat rendah, maka pengumpulannya kurang mendapat perhatian dari penduduk. Pada tahun 1908 harga per pikul sebesar f 12,50. Ekspor tanduk rusa, kulit, tempausu tidak begitu baik, namun yang terpenting adalah ekspor kopra. Ekspor kopra pada tahun 1908 sejumlah 15392 pikul dengan per-pikul f 9-10.<sup>26</sup>

Meskipun Tolitoli belum banyak disentuh oleh kemampuan dan ketrampilan manusia yang lebih baik pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, namun hasil alam berupa hasil hutan dari tumbuhan industri seperti rotan, damar cukup tersedia. Hasil kebun berupa kopra menjadi komoditi ekspor selain kulit dan tanduk rusa.

#### G. Tata Hukum dan Keamanan

Sebelum masa kolonial, raja dan kaum bangsawan menguasai hukum. Hukuman kebanyakan terdiri atas denda. Jika denda itu tidak dibayar, maka terdakwa diikat untuk bekerja selama beberapa tahun sebagai abdi pada penuntut. Hukuman matipun ditetakkan. Terdakwa mati dipenggal atau ditusuk dengan keris. Akan tetapi kebanyakan mereka memiliki hukum sendiri sejauh terjadi kasus penghinaan, penipuan, atau kerugian lain terhadap penuntut lewat pembunuhan.

Jika kasus itu tidak diungkapkan maka sumpah diambil yang

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 47.

dilakukan sebagai berikut : "Apabila saya tidak jujur, maka saya tidak lagi bisa hidup, atau roh saya tidak akan bersatu dengan leluhur".

Pada tahun 1908/1909, apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan ringan, maka pemerintah menegakkan dan memutuskan hukuman yang dilaksanakan oleh pengadilan di Tolitoli, dan terhadap hukum kerajaan yang dilaksanakan oleh badan peradilan yang terdiri atas raja, raja muda, jogugu, dan syahbandar atas seizin atau di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Hukum sedapat mungkin disesuaikan dengan pemahaman yang dimiliki oleh penguasa Belanda. Konsep hukumnya lebih bagus dari pelaksanaannya.

Jumlah kasus pidana yang diajukan di Tolitoli amat sedikit. Pada tahun 1908 hanya 6 kasus, termasuk 2 kasus pencurian dan 1 pembunuhan. Tuntutan perdata kebanyakan diajukan sebagai akibat tidak dibayarkannya hutang yang berasal dari transaksi dagang. Dari kasus perdata itu, maka pada tahun 1908 diajukan 4 kasus.<sup>27)</sup>

Penduduk daerah Tolitoli selalu dalam keadaan tenang dan baik, sehingga keamanan dan ketertiban mudah dipertahankan. Pelanggaran besar jarang terjadi. Meskipun terdapat kasus pencurian, perampokan dan pembakaran, hal itu terutama berkaitan dengan keluarga raja. Tentang pencurian terutama banyak terjadi, karena para pejabat menerima sebagian dari denda, sehingga para pelanggar bisa meneruskan tindakannya.

---

<sup>27)</sup>

Ibid., hlm. 43-46.

Masuknya sistem hukum berdasarkan aturan penguasa kolonial tidak dapat memberi jaminan sepenuhnya terhadap berbagai pelanggaran atau kasus hukum. Sebab sebenarnya rakyat lebih memahami pendekatan budaya tradisional dalam penanganan kasus-kasus hukum dari pada memperkenalkan sistem pengawasan hukum yang sangat ketat sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial dalam kehidupan masyarakat.

#### H. Kondisi Hidup di Pedesaan

Sebagian besar penduduk Tolitoli tinggal di wilayah pedesaan. Mereka berdomisili di desa-desa yang relatif dekat dengan sawah dan kebun. Pada mulanya rumah penduduk di pedesaan semrawut dan tidak teratur. Rumah-rumah dibangun menurut kemauan sendiri-sendiri. Kebanyakan rumah itu dibuat sedapat mungkin berdekatan dengan lokasi sawah atau kebun mereka. Selain berdekatan dengan lokasi pertanian, juga memiliki sumber air berupa sungai atau lokasi yang mungkin dapat dibuat sumur-sumur tradisional.

Setelah adanya pengaruh luar yang masuk, mulailah usaha perbaikan dan pengaturan pembangunan rumah penduduk. Selain perbaikan letak dan arah bangunan, juga lorong-lorong di kampung-kampung ditata sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada.<sup>20)</sup>

Bangunan milik umum tidak ada selain mesjid. Rumah-rumah

<sup>20)</sup>

Ibid., hlm. 48-49.

penduduk terbuat dari kayu dan ditopang dengan tonggak. Kualitas kayu bangunan sesuai dengan kemampuan pemiliknya. Pintu rumah selalu berada di samping. Bangunan tambahan biasanya tanpa atap dan pagar dengan lantai terbuat dari batang bambu.

Lantai kebanyakan memang terbuat dari batang bambu, tetapi bagi orang yang mampu terbuat dari papan. Atap terdiri atap rumbia, daun nipah, atau papan. Kebanyakan rumah memiliki dinding di atas yang berfungsi sebagai penyimpanan barang. Rumah juga terdiri atas beberapa kamar termasuk dapur yang selalu berada di belakang. Beberapa rumah dijumpai dapurnya pada bangunan tambahan di belakang. Rumah orang Toraja merupakan gubuk rendah dengan ketinggian satu meter dengan atap gelagah tanpa dinding. Bagian dalam hanya cukup untuk dua orang.

Orang Bugis dan suku lain yang berasal dari luar Tolitoli selanjutnya hidup dan menetap di kampung-kampung bersama dengan penduduk asli. Pada umumnya orang Bugis memiliki rumah yang luas dan lebar dari pada rumah penduduk lainnya. Sementara orang Bajo kebanyakan hidup dalam kelompok sukunya sendiri. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki rumah tempat tinggal, kecuali di perahu mereka. Sementara mereka yang memiliki rumah merupakan gubuk sepanjang pantai terutama pada musim mencari ikan.

Di ladang dan kebun juga dijumpai rumah-rumah. Para pemiliknya tinggal sementara untuk mengolah dan menjaga tanamannya. Rumah-rumah itu terbuat dari kayu dan bentuknya

amat primitif dan layaknya disebut pondok atau gubuk.

#### I. Adat-istiadat

Cara berpakaian penduduk asli maupun pendatang pada umumnya mengikuti cara berpakaian orang Bugis. Kaum pria mengenakan celana panjang atau pendek, sarung, baju dan ikat kepala. Ada juga yang memakai kopiah. Kaum wanita memakai baju ketat, sarung, dan howoong (ikat leher untuk melindungi kepala). Sebagai perhiasan mereka memakai cincin, gelang tangan, gelang kaki, anting, dan rantai yang terbuat dari batu mulia.

Senjata asli penduduk terdiri atas, tombak, pisau, keris dan martil. Senjata-senjata itu sampai tahun 1912 masih digunakan, selain senjata impor seperti senapan. Ketika masa perang sebelumnya, orang juga memakai lila, walau masa perang itu sendiri hampir tidak diketahui. Di antara penduduk dari berbagai suku sejak awal saling berhubungan baik, kecuali ada sedikit permusuhan dengan suku Toraja yang sering melakukan perompakan.

Perkawinan dilakukan baik di antara suku maupun sesama suku. Dalam peristiwa perkawinan kebanyakan mengikuti syariat Islam dan adat setempat. Pelaksanaan perkawinan ditentukan oleh kedua belah pihak. Orang tua mempelai pria pada awalnya melamar kepada orang tua mempelai wanita. Bila tidak ada keberatan, maka perayaan pesta perkawinan diadakan sesuai

dengan tingkat dan kedudukan kedua pihak keluarga mempelai. Mas kawin tertinggi yang biasanya dari keluarga raja sebesar f 1.000, dan berkurang untuk orang biasa sebesar f 100. Sebagian dibayar kontan dan yang lain dengan barang atau ternak.

Seorang gadis sering dinikahkan pada usia masih amat muda. Orang tua gadis berhak mendapatkan bantuan dan dukungan dari orang tua pria, sedangkan ikatan kawin masih berlanjut dan diperhitungkan berkenaan dengan mas kawin dalam wujudnya.

Upacara akad nikah dilakukan bersamaan dengan pesta. Pada saat itu mempelai wanita dan pria disandingkan dihadapan warga kampung yang menghadiri undangan. Pelaksanaan pernikahan pada umumnya merujuk kepada syariat Islam. Dalam perkawinan suku Bajo mempelai pria dan wanita apabila telah usai acara pernikahan dibawa ke sebuah perahu kemudian mereka meninggalkan mempelai pria selama beberapa hari. Ketika berada dalam perahu dia berkeliling di sepanjang pantai beberapa hari lamanya kemudian kembali ke kampung.

Melalui ikatan perkawinan, kekayaan pria dan wanita dipadukan. Hanya pakaian dan perhiasaan wanita tetap menjadi miliknya dan akan jatuh ke tangan ahli warisnya setelah ia wafat. Wanita membantu pria dalam pekerjaannya di ladang dan di kebun untuk mendapatkan modal kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Wanita juga bertugas menyiapkan makanan, minuman, dan menenun sarung di rumah. Kaum wanita yang akan menikah diusahakan sedapat mungkin jauh dari pemuda dan orang asing.

Kasus perceraian banyak terjadi akibat berbagai masalah. Perceraian dilakukan menurut aturan hukum Islam yang disebut

talak. Seorang anak yang baru lahir dilakukan kewajiban memotong rambut yakni pada hari ke tujuh dari kelahirannya. Kewajiban itu disebut *aqieqah* yang disertai dengan pemotongan satu kambing bagi anak wanita dan dua ekor kambing bagi anak pria. Bagi kaum bangsawan atau raja mandi pertama dilakukan oleh 40 orang wanita muda dengan pakaian pesta. Pada saat itu anak juga diberikan nama yang terbaik menurut kedua orang tuanya. Akan tetapi nama itu dapat diganti setelah anak itu disunat atau ketika anak itu menderita sakit yang sulit disembuhkan. Penggantian nama tersebut sebagai harapan akan mendapatkan kesembuhannya.

Bagi wanita yang akan menikah biasanya dilakukan pengikiran gigi, namun hal itu tidak semua dilakukan untuk setiap wanita tergantung dari keinginannya terhadap pelaksanaan adat setempat, sedangkan pada anak pria pengikiran gigi sama sekali tidak dilakukan. Apabila terjadi perceraian, anak yang masih kecil dan masih perlu perawatan akan ikut ibunya, kecuali kalau sudah besar, anak-anak dapat memilih di antara ayah atau ibunya. Dalam kasus kematian, pengurusan mayat hingga penguburannya mengikuti ketentuan dan syariat Islam. Hak harta waris juga diatur dan dibagi menurut syariat Islam, tetapi masih ada juga sebagian yang mengatur menurut kekeluargaan dan adat setempat.<sup>29)</sup>

---

<sup>29)</sup>*Ibid.*, hlm., 49-51.

### BAB III KEBANGKITAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN

#### A. Masuknya Agama Islam

Agama Islam pertama-tama masuk di Tolitoli pada tahun 1655. Sebagai penyebar Agama Islam yang pertama adalah Datu Bandang yang berasal dari Kesultanan Ternate. Bukti yang memperkuat proses masuknya Agama Islam di Tolitoli pada paruh kedua Abad XVII dari Ternate adalah dengan adanya hubungan kerja sama yang baik antara Kesultanan Ternate dengan Kerajaan Tolitoli. Bahkan setelah hubungan itu semakin dekat, Kerajaan Tolitoli selanjutnya disebut Kesultanan Tolitoli.<sup>1)</sup> Meskipun kesultanan kemudian kembali diganti dengan istilah kerajaan, namun unsur Islam dan budaya Ternate tetap dominan. Hal itu dapat dilihat melalui anasir-anasir kekuasaan seperti jabatan di bawah raja yaitu, raja muda, jogugu, syah-bandar, kapitan laut, todaka, mavor, kaptan raja, anak kupuno, dan sulea.<sup>2)</sup>

Setelah hubungan antara kedua kerajaan itu semakin erat, Raja Tolitoli kemudian mengakui kekuasaan Kerajaan Ternate dan apabila ada seorang raja yang naik tahta pada Kerajaan Tolitoli, maka penobatannya diselenggarakan di Ternate sebagai pengesahan untuk menjadi Sultan Tolitoli. Hal itu dilakukan

---

<sup>1)</sup> Lihat Ronkel, "Nota betreffende het Landschap Tolitoli" dalam TBG. deel LIV, 1912, hlm. 27.

<sup>2)</sup> Ibid.

berdasarkan derasnya pengaruh dan pengakuan terhadap kehadiran Islam di Tolitoli. Bahwa Tolitoli merupakan sebuah kerajaan yang otonom dan rakyatnya mengakui dan mendukung keberadaan kerajaan sebagai pemimpinnya merupakan kenyataan. Di samping itu mereka juga mengakui bahwa kehadiran Agama Islam dari Ternate sebagai basis penyebarannya sekaligus merupakan sebuah Kerajaan Islam di wilayah timur Indonesia pada saat itu yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap beberapa wilayah kerajaan di sekitarnya juga merupakan kenyataan historis. Adalah semestinya pula apabila Kerajaan Tolitoli menunjukkan pengakuannya terhadap Ternate dengan cara terlebih dahulu menerima penobatan raja di Kesultanan Ternate. Hal itu dilatarbelakangi oleh kebesaran dan kejayaan Ternate dalam proses penyebaran dan pengembangan Agama Islam di kawasan Timur Indonesia.

Sebelum Agama Islam masuk di Tolitoli, penduduk setempat menganut agama tradisi nenek moyang dan tidak mengenal agama Hindu seperti daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Agama Islam dengan demikian merupakan agama wahyu yang pertama masuk dan dipeluk oleh penduduk Tolitoli. Kehadiran Agama Islam telah membawa perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat setempat.<sup>9)</sup>

Dalam penyebaran Islam di Tolitoli seperti juga penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara melalui proses perdamaian tanpa melalui kekerasan dan paksaan. Hal itu berjalan

---

<sup>9)</sup> Ibid., hlm. 28-29.

sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kepada sikap hikmah, bijaksana, dan teladan yang baik. Proses islamisasi berjalan bukan saja karena ajaran yang dimilikinya sangat baik, melainkan juga dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara dan sikap seseorang *Dai* menyampaikannya kepada orang lain. Penerima pesan seakan-akan dengan sendirinya sadar bahwa ajakan yang disampaikan kepadanya merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Pembawa pesan sudah barang tentu harus mampu menunjukkan kepada orang lain, bahwa pesan yang dibawanya sangat berarti bagi diri siapapun sebagai bekal perjalanan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Agama Islam masuk dan menyebar di Indonesia dengan sangat cepat oleh karena masuk dan menyebar melalui enam saluran sebagaimana yang dijelaskan oleh Uka Tjandrasasmita.<sup>5)</sup> *Pertama, saluran perdagangan*, proses islamisasi yang paling awal adalah melalui perdagangan. Aktivitas perdagangan yang terjadi pada Abad ke-7 sampai dengan Abad ke-16 Masehi menjadikan pedagang-pedagang muslim Arab, Persia, dan India yang terlibat dalam perdagangan dari negeri-negeri Asia Barat, Asia Tenggara, dan Asia Timur sekaligus menyebarkan Agama Islam di Indonesia. Saluran islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham.

---

<sup>4)</sup> Hikmah mengandung arti sebagai perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan benar (Quran Surat An-Nahl ayat 125).

<sup>5)</sup> Uka Tjandrasasmita (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid III (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1984), hlm. 188-195.

Menurut Tome Pires yang dikutip oleh Uka Tjandrasasmita, bahwa para pedagang muslim menyebarkan Agama Islam terutama di wilayah pesisir pantai. Sementara di Tolitoli para pedagang yang juga selaku penyebar Islam bermukim dan membaur dengan masyarakat Tolitoli yang belum beragama itu. Pada saat mereka menjual keperluan hidup sehari-hari kepada masyarakat, ketika itu pulalah ajaran Islam disampaikan dengan cara berdialog akrab dan penuh kekeluargaan. Setelah para pemuka masyarakat masuk Islam satu-persatu, maka dengan mudah masyarakat lainnya turut masuk Islam.

Proses penyebaran Agama Islam yang demikian mudah dan cepat tersebut memungkinkan upaya bersama masyarakat untuk mendirikan tempat ibadah berupa bangunan mesjid sederhana. Mesjid yang pertama di bangun di kampung Nalu itulah kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Tolitoli. Tidak diketahui tahun berapa persisnya mesjid itu dibangun, tetapi dapat diperkirakan tidak lama setelah Agama Islam masuk di Tolitoli. Fungsi mesjid selain sebagai tempat ibadah adalah sebagai pusat syiar Islam termasuk menyebarkan Agama Islam kepada orang lain. Pemanfaatan fungsi mesjid sebagai pusat penyebaran Agama Islam dengan mengundang muballig dari Ternate dan dari Makassar menyebabkan jumlah pemeluk Islam dalam waktu singkat semakin banyak.

Faktor hubungan ekonomi dan perdagangan antara pedagang muslim dan para kaum keluarga Raja Tolitoli merupakan saluran islamisasi yang strategis. Teori Islamisasi yang berkenalan masyarakat Jawa, rupanya juga berlaku di daerah Tolitoli dan

Sulawesi Tengah pada umumnya. Strategi melalui hubungan ekonomi dan perdagangan dikembangkan oleh penziar-penziar Islam dari Ternate dan Makassar yang tujuan utamanya sebenarnya berdagang. *Kedua, saluran perkawinan*, oleh karena para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dibandingkan dengan kaum pribumi berdasarkan kemampuan ekonomi maka dengan mudah dapat mengawini gadis-gadis Tolitoli. Sebelum para pedagang mengawini gadis-gadis Tolitoli, gadis-gadis tersebut diislamkan terlebih dahulu. Dari hasil perkawinan itu mereka kemudian melahirkan keturunan yang makin lama makin banyak jumlahnya, sehingga muncullah lingkungan selanjutnya menjadi kampung-kampung dan wilayah muslim. Saluran perkawinan sangat menguntungkan terutama apabila terjadi perkawinan antara pedagang muslim dengan puteri bangsawan atau anak raja yang dengan mudah dapat mempengaruhi masyarakat awam secara berantai, sehingga penyebaran Islam semakin cepat. *Ketiga, saluran Tasawuf*, para sufi sebagai pengajar tasawuf dapat mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Para pengajar tasawuf itu sangat mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Para pengajar tasawuf itu ada juga di antara mereka yang mengawini puteri-puteri bangsawan yang tentu saja juga merupakan peluang untuk melakukan islamisasi. Dengan tasawuf, konsep ajaran Islam yang disebarluaskan kepada penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut kepercayaan animisme, sehingga agama baru itu mudah dimengerti

dan diterima. Namun proses islamisasi melalui tasawuf tidak banyak dilakukan di Tolitoli, karena pengajar tasawuf dari Ternate dan Makassar tidak banyak. *Keempat, saluran pendidikan* proses islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pengajian-pengajian yang disampaikan oleh guru-guru agama, ulama, dan para kiyai. Pada lembaga pendidikan keagamaan yang paling tua, yaitu pesantren, guru agama, ulama, dan kiyai mendapat pendidikan dan pembinaan Agama Islam. Hasil didikan dan binaan di pesantren itu kemudian menyebar ke kampung masing-masing untuk mengembangkan syiar Islam dengan *berdakwah* atau *tablig*. *Kelima, saluran kesenian*. Saluran kesenian juga memiliki kekuatan pengaruh dalam proses islamisasi di Indonesia, namun dalam penyebaran Agama Islam di Tolitoli saluran kesenian tidak begitu dikenal. *Keenam, sarana politik*, para penduduk di Sulawesi dan Maluku pada umumnya memeluk Agama Islam setelah raja atau para pemimpin mereka terlebih dahulu masuk Agama Islam. Pengaruh raja atau pemimpin lainnya demikian besar dalam membantu penyebaran Agama Islam di kedua daerah tersebut. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan seluruh kawasan timur Indonesia, untuk kepentingan politik kerajaan-kerajaan Islam telah memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam yang berakhir dengan kemenangan dan secara politis dapat menarik penduduk dari kerajaan non-Islam untuk memasuki Agama Islam.

Daerah Tolitoli sebagai bagian dari wilayah Sulawesi, Agama Islam terlebih dahulu dipeluk oleh tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, sehingga dengan mudah mempengaruhi

masyarakat awam untuk ikut pula memeluk Agama Islam. Penyebaran syiar Islam dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat kedudukan, darah keturunan, dan atau tanggung jawab. Islam justeru memberikan hak yang sama kepada umatnya untuk menyampaikannya kepada orang lain. Apabila dibandingkan dengan Agama Hindu, maka yang berhak menjadi penyebar agama hanyalah dari Kasta Brahmana yang merupakan kasta tertinggi dalam Agama Hindu. Siapapun umat Islam oleh karena itu dapat melakukan penyebaran Islam di mana, dan kapan saja, sehingga tidaklah heran apabila hampir seluruh penduduk Tolitoli dalam waktu singkat telah memeluk Agama Islam. Agama Islam yang telah diterima sebagai agama mayoritas di Tolitoli bagaimanapun telah pula membawa perubahan pola pikir dan pola sikap masyarakat, sebab Agama Islam memiliki pedoman yang jelas tentang pola pikir maupun pola sikap untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi apabila ditinjau dari aspek pelaksanaan Agama Islam yang sebenarnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW., maka belumlah berjalan sebagaimana adanya. Dalam kenyataannya masyarakat yang telah memeluk Agama Islam masih mencampur-baurkan dengan kepercayaan tradisional dari nenek moyang mereka. Hal itu berjalan terus sampai dengan datangnya para muballig dan Dai' dari Jawa dan Sumatera yang mengajarkan pengetahuan dan pengamalan Agama Islam yang sebenarnya. Para muballig tersebut mulai masuk bersamaan dengan masuknya organisasi keagamaan yang pertama di Tolitoli yaitu Sarekat Islam.

Setelah Agama Islam masuk dan berkembang dalam

kehidupan masyarakat Tolitoli terjadilah perubahan sosial yang sangat cepat terutama dalam penilaian terhadap status dan kedudukan seseorang. Apabila sebelum masuk Islam status dan kedudukan seseorang ditentukan oleh darah kebangsawanan dan kepemilikan harta, maka setelah masuknya Agama Islam kepemilikan harta benda tidak berubah, tetapi kedudukan pendatang Arab yang semuanya beragama Islam berikut negerinya sebagai asal usul kedatangan Agama Islam dan para haji yang telah memenuhi rukun Islam yang ke lima menjadi sangat terhormat di tengah masyarakat setara dengan ulama dan para haji.<sup>6)</sup>

Pada tahun 1900, di Tolitoli baru dijumpai satu mesjid yaitu di kampung Nalu, sebuah surau di Kampung Baru, satu surau di Lakuan, dan satu surau Binontoan, sedangkan di Banagan terdapat sebuah langgar.<sup>6)</sup> Jumlah penduduk yang sudah naik haji dari tahun 1900 sampai tahun 1918 sebanyak 259 orang dan kebanyakan orang Bugis dan penduduk asli Tolitoli. Mereka menjadi panutan di tengah masyarakat, karena telah menunaikan rukun Islam yang kelima. Dalam Agama Islam menjalankan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat yang mampu dan juga merupakan tingkat kesempurnaan bagi yang melaksanakannya setelah empat rukun Islam lainnya, yaitu mengucapkan kalimat dua syahadat, mendirikan shalat 5 waktu, menjalankan puasa di bulan suci Ramadhan, dan mengeluarkan zakat fitrah. Setelah pulang dari ibadah haji, masyarakat amat menghormati para haji, baik kata-katanya, maupun sikap dan perbuatannya.

<sup>6)</sup> Besluit GG. nomor 8 koleksi ANRI nomor 1489/26 tahun 1920, hlm. 5.

### B. Penunaian Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukum Islam yang hukumnya wajib dikerjakan bagi umat Islam yang mampu.<sup>7)</sup> Meskipun ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang mampu, akan tetapi dalam kenyataannya ada juga sebahagian orang memaksakan diri melaksanakannya.<sup>8)</sup> Fenomena yang demikian ini sangatlah menarik, karena sebahagian orang yang telah menunaikannya merasa mendapat status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.

Yang menarik dari penunaian ibadah haji bagi umat Islam adalah bahwa orang-orang yang telah menjalankannya, memiliki nilai lebih dibandingkan dengan orang lain yang belum mampu melaksanakannya. Kelebihan itu selain mereka mampu membiayai perjalanan dari Indonesia ke tanah suci Mekkah pulang pergi dan telah menyelesaikan rukum Islam yang kelima, para haji itu pada umumnya memiliki kedudukan terhormat dan dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin spritual, bahkan juga sosial.

Seperti juga di Nusantara pada umumnya, maka masyarakat di Tolitoli memberi tempat khusus bagi para haji (hujaj) se-

<sup>7)</sup> Mampu dalam melaksanakan ibadah haji, selain memiliki kemampuan finansial, juga harus mempunyai kemampuan fisik dan mental dalam menjalankan ibadah dengan sempurna. Untuk keterangan selanjutnya periksa QS. Al-Baqarah ayat 196.

<sup>8)</sup> Pemaksaan diri untuk menunaikan ibadah haji dengan menjual harta bendanya dengan harapan setelah kembali mereka akan mendapatkan harta benda yang lebih banyak.

bagai pemimpin spritual yang amat dihormati. Para hujai selain melaksanakan ibadah haji sebagai tujuan utama mereka di tanah suci Mekkah, mereka juga menggunakan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan Agama Islam. Pengetahuan Agama Islam yang telah mereka peroleh tersebut sekembalinya di tanah air selanjutnya didakwahkan dan diajarkan kepada jamaah muslim melalui mesjid-mesjid, langgar-langgar, dan tempat-tempat pengajian yang ada di Tolitoli. Kehadiran para hujai dengan demikian bukan saja telah mampu memenuhi kewajiban penunaian rukum Islam yang kelima bagi dirinya melainkan juga menjadi lampu penerang bagi kehidupan keagamaan bagi umat Islam lain yang ada di daerah.

Peranan para hujai untuk membangkitkan dan mengembangkan kehidupan keislaman di Tolitoli sangat penting selain para muballig dan ulama yang datang dari Ternate, Donggala, Makasar secara insidental melakukan kunjungan dakwah di Tolitoli. Pada umumnya para hujai itulah yang menjadi ulama dan imam yang rutin berperan untuk meningkatkan kehidupan keagamaan pada masyarakat Tolitoli. Selain masalah keagamaan, dalam masalah sosial dan ekonomi, mereka adalah lapisan yang hidup mapan dalam masyarakat Tolitoli. Dengan demikian hambatan dalam melaksanakan aktivitas dakwah tidak banyak menjadi masalah, oleh karena kedudukannya di tengah masyarakat sebagai golongan terhormat.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

68

Tabel 2 :

Daftar Jamaah Haji Asal Tolitoli pada Tahun 1900-1918.<sup>8)</sup>

No.	T a h u n	J u m l a h	Keterangan
1.	1900	11 orang	Tidak ada Jamaah Haji.
2.	1901	12 orang	
3.	1902	10 orang	
4.	1903	17 orang	
5.	1904	12 orang	
6.	1905	13 orang	
7.	1906	11 orang	
8.	1907	-----	
9.	1908	14 orang	Total = 259 orang Jemaah Haji
10.	1909	16 orang	
11.	1910	17 orang	
12.	1911	13 orang	
13.	1912	18 orang	
14.	1913	16 orang	
15.	1914	12 orang	
16.	1915	17 orang	
17.	1916	14 orang	
18.	1917	15 orang	
19.	1918	21 orang	

<sup>8)</sup> Besluit GG. No. 8 tahun 1920, op. cit. Lihat juga Koloniaal Verslag tahun 1920 dan 1921.

### C. Sarekat Islam

Sarekat Islam didirikan pada awal tahun 1912 di Surakarta oleh Haji Samanhudi seorang pengusaha batik terkenal pada saat itu. Sebelum didirikan Organisasi Sarekat Islam, di kalangan pedagang Indonesia telah dibentuk perkumpulan yang bernama Sarekat Dagang Islamiyah pada tahun 1909 dengan pemrakarsa R.M. Tortoadisuryo seorang wartawan asal Surakarta yang menjadi pemimpin redaksi surat kabar Medan Priyayi di Bandung. Pada tahun 1911 ia mendirikan juga Sarekat Dagang Islam (SDI) di Bogor. Bentuk dari kedua perkumpulan tersebut pada awalnya berupa koperasi dagang pengusaha-pengusaha batik yang bertujuan merobohkan monopoli pedagang Cina sebagai penyedia bahan baku bagi perusahaan batik.<sup>9)</sup>

Pada tanggal 10 September 1912 setelah mendapat pengesahan Anggaran Dasarnya melalui akte notaris di Surakarta, maka kata *dagang* dihapus untuk kemudian menjadi *Sarekat Islam* yang tujuannya tidak terbatas kepada kalangan pedagang saja tetapi untuk seluruh umat Islam dengan tujuan membina dan memajukan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Islam bangsa Indonesia. Dengan demikian Sarekat Islam merupakan perkumpulan emansipasi yang lebih luas tidak hanya kalangan pedagang saja melainkan untuk memajukan umat Islam Indonesia yang didirikan pada

---

<sup>9)</sup>Sartono Kartodirdjo et al., Sarekat Islam Lokal (Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975), hlm. IX. X

tahun 1912.<sup>10)</sup>

Organisasi Sarekat Islam selain memiliki kesadaran untuk memajukan kesejahteraan dan kualitas hidup anggota, juga berusaha menciptakan sebuah sistem kekuasaan yang mampu menciptakan cita-cita kesejahteraan umat. Kiprah Sarekat Islam sangat cepat menyentuh masyarakat elit perkotaan maupun masyarakat kelas bawah terutama petani di daerah pedesaan. Dalam waktu singkat jumlah anggota organisasi Sarekat Islam sangat banyak, bahkan tidak tertandingi oleh organisasi lain baik sebelum maupun sesudahnya. Kehadiran Sarekat Islam di Indonesia dapat memberikan pelajaran dan pengalaman bagi kaum pribumi tentang kesadaran terhadap keterbelakangan di bidang sosial dan ekonomi dibandingkan dengan golongan-golongan yang diberi keistimewaan oleh pemerintah kolonial seperti orang-orang Eropa dan Cina. Padahal status dan kedudukan mereka sebagai pendatang, sementara kaum pribumi dinomorduakan di negerinya sendiri. Kesadaran itu meskipun terlambat, namun dapat mengilhami rakyat berbuat sesuatu untuk mengubah keadaan mereka sendiri.<sup>11)</sup>

Organisasi Sarekat Islam merupakan suatu gerakan reformasi Islam yang berpengaruh dan tumbuh di Indonesia sebagai suatu bagian yang hakiki dari pergerakan nasional yang muncul pada awal abad ke-20. Proses kelahirannya diilhami oleh

<sup>10)</sup> A.P.E. Korver, *Sarekat Islam 1912-1916* (Amsterdam : Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, 1982) hlm. 7. Lihat juga Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. (Singapura, 1973).

<sup>11)</sup> Periksa A.P.E. Korver, *ibid.* hlm. 24.

pemikiran dari ahli pikir Islam yang berhaluan modern seperti Muhammad Abduh (1849-1905) dan Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897).<sup>12)</sup>

Gerakan yang dilakukan Sarekat Islam dalam bidang spritual adalah menyangkut reformasi dari Islam tradisi yang telah bercampur dengan ajaran di luar Islam kepada konsepsi pengamalan Islam sesuai dengan dasar Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Selain itu diupayakan untuk menyelaraskan konsepsi Islam dengan kondisi peradaban dunia modern.

Oleh karena peranannya tidak saja di bidang spritual, maka Sarekat Islam juga mendominasi keseluruhan gerakan Nasionalis Indonesia sampai permulaan tahun 1920-an.<sup>13)</sup>

Jiwa nasionalisme yang radikal pada awal Abad ke-20 paling aktif dinyatakan oleh Sarekat Islam terutama selama dan sesudah Perang Dunia Pertama. Pertumbuhan organisasi ini sangat cepat sejak berdirinya dan menyatakan anggotanya berjumlah lebih dari dua juta orang, sehingga Sarekat Islam merupakan organisasi gerakan massa pertama di Indonesia. Pemimpin-pemimpin Sarekat Islam merupakan bagian pula dari elit Indonesia yang potensial dan dengan demikian problematika organisasionalnya memperjelas perkembangan elit Indonesia pada permulaan abad kedua puluh.<sup>14)</sup>

<sup>12)</sup> A.P.E. Korver, dalam Colin Wild dan Peter Carey, *Gelora Api Revolusi, Sebuah Antologi Sejarah* (Jakarta : Gramedia, 1986), hlm. 20.

<sup>13)</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>14)</sup> Robert van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesia Elite*. (Den Haag : NV. Uitgeverij W. van Hoeve, 1960), hlm. 140

Ketika menghadapi kebangkitan kaum buruh, Sarekat Islam telah menghasilkan pembaharuan pemikiran dengan ideologi Islam yang kokoh. Hal itu terjadi pada awal abad ke-20 yaitu Islam keluar dari "sejarah alamiah" dan mencoba "mereka-yasa" sejarah, tetapi rupanya kurang berhasil. Kekurangberhasilan itu disebabkan karena Sarekat Islam yang terbiasa dengan perjuangan *wong cilik* yang umum telah berusaha menanggapi kepentingan *wong cilik* khusus yang bernama buruh.<sup>15)</sup> Selain itu dan yang paling penting adalah kecepatan dari ideologi sosialisme Marxisme yang dibawa oleh Snevlit tahun 1914 di Semarang telah berhasil mendahului Sarekat Islam kemudian menginjeksi pemikiran para tokoh SI-Merah untuk menguasai kaum buruh.

Pendekatan Sarekat Islam untuk memperkuat basis terhadap golongan bawah merupakan indikator dalam keberpihakan pada kepentingan jumlah terbanyak dari warga bangsa Indonesia. Hal itu tidak berarti bahwa Sarekat Islam melupakan kelas menengah dan kaum elit, justeru para pemimpin Sarekat Islam adalah kaum elit yang sangat peduli kepada masa depan bangsanya. Dengan kecerdasan dan segala kemampuan mereka, para kaum buruh dapat digerakkan untuk melakukan tuntutan dengan sikap dan tindakan yang terbaik pada zamannya.<sup>16)</sup>

Tokoh-tokoh utama Sarekat Islam selain Samanhudi sebagai perintis utama adalah Umar Said (HOS) Cokroaminoto, Goenawan,

---

<sup>15)</sup> Kuntowijoyo dalam Kompas tanggal 7 Juni 1995, hlm. 1.

<sup>16)</sup> Ibid.

Abdul Muis, Agus Salim, dan lain-lain. Mereka selain memiliki kemampuan menjalankan roda organisasi modern pertama di Indonesia, mereka juga merupakan singa podium yang mampu berbicara dan berpropaganda rakyat supaya dapat menerjunkan diri ke dalam Sarekat Islam dan melakukan yang terbaik untuk memajukan rakyat dan bangsa Indonesia kepada kehidupan yang sejahtera lahir dan batin.

Sarekat Islam berkenalan dengan masyarakat Islam Tolitoli pada bulan April 1916 yang langsung diresmikan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, Ketua Central Sarekat Islam (CSI).<sup>17)</sup> Sarekat Islam masuk di Sulawesi Tengah setelah dua tahun sebelumnya masuk di daerah Sulawesi Selatan. Sebelum ketua dan sekretaris CSI masing-masing HOS. Cokroaminoto dan Sostro Kardono berkunjung ke Tolitoli untuk meresmikan berdirinya organisasi Sarekat Islam, para pengurus, anggota dan simpatisan SI telah mempersiapkan diri menyambut kedatangan dua tokoh tersebut. Kedua tokoh CSI tersebut selain meresmikan SI Tolitoli, juga sekaligus memberikan penerangan dan dakwah kepada umat Islam pada umumnya dan anggota Sarekat Islam khususnya. Dakwah yang disampaikan terutama agar umat Islam dapat menjalankan ajaran Islam dengan baik sesuai dengan syariat Islam serta ikut memajukan dan mengembangkan aktivitas sosial atau kemasyarakatan sesuai dengan program SI.

Kehadiran Sarekat Islam sebagai organisasi yang memiliki anggota terbesar di Indonesia pada masanya merupakan

---

<sup>17)</sup>Lihat Ziesel dalam IG (1921), *op. cit.*, hlm. 497.

organisasi modern pertama di Tolitoli. Kehadiran organisasi ini telah membawa perubahan dan pembaharuan, baik dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, maupun dalam kehidupan sosial politik. Di bidang keagamaan misalnya, telah terjadi peningkatan pengamalan ibadah bagi umat Islam mulai dari shalat lima waktu, puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Untuk menunjang pelaksanaan ibadah itu, bangunan ibadah seperti mesjid, surau, dan langgar yang sebelumnya keadaannya sangat sederhana, maka dengan masuknya Sarekat Islam kualitasnya ditingkatkan menjadi lebih baik. Jumlah penduduk yang merencanakan untuk menunaikan ibadah haji pun semakin banyak. Meskipun tidak dapat diketahui berapa jumlahnya, namun karena ibadah haji juga merupakan kewajiban bagi orang Islam mampu mendorong orang Islam setempat untuk segera menjalankannya. Hal tersebut tentu saja didorong oleh semakin tingginya kesadaran beragama ditambah dengan kemampuan ekonomi sebagai pendukung utama dalam pembiayaan.

Pada tahun 1919 wakil ketua CSI Abdul Muis berkunjung ke Sulawesi Utara dan Tengah. Ketika berada di Tolitoli, Abdul Abdul Muis menyampaikan pidato dengan menarik dan berapi-api tentang pentingnya menjalankan perintah agama Islam dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Abdul Muis menjelaskan juga mengenai pelaksanaan *heerendiensten* dan *belasting* yang dibebankan oleh pemerintah kolonial terhadap masyarakat pribumi Tolitoli.<sup>18)</sup>

<sup>18)</sup> Nurhayati Nainggolan et.al., Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Tengah, (Jakarta : Proyek IDKD Depdikbud, 1982), hlm. 121.

Kunjungan wakil ketua CSI itu sangat memberikan semangat bagi kebangkitan kehidupan keagamaan dan kesadaran politik penduduk Tolitoli. Dengan demikian Sarekat Islam dapat dikatakan sebagai organisasi Islam pertama masuk di Tolitoli sebagai pembaharu kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial. Apabila sebelumnya kehidupan keagamaan tidak mengalami perkembangan, maka setelah kedatangan Sarekat Islam kehidupan keagamaan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Pembaharuan kehidupan keagamaan yang juga dikembangkan oleh Sarekat Islam adalah pemurnian ajaran Islam dari pengaruh adat dan budaya tradisional yang masih melekat dalam kepercayaan penduduk Tolitoli. Apabila kondisi kehidupan keagamaan sebelumnya masih bercampur baur dengan adat dan budaya tradisional sehingga pengamalannya dalam kehidupan pribadi maupun kolektif masyarakat masih belum berjalan sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya, maka dengan kehadiran organisasi Sarekat Islam dapat memperbaharui dan meningkatkan pengamalan keagamaan sesuai dengan petunjuk Kitab Suci Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW. Selain peningkatan pengamalan dan peningkatan pemurnian dari sekedar memeluk agama Islam yang bercampur dengan pengaruh adat dan budaya, melainkan juga telah terjadi kenaikan penghargaan masyarakat terhadap pemeluk agama Islam yang lebih mantap. Bagi masyarakat Tolitoli yang mengetahui dan memahami agama Islam lebih baik berarti mendapatkan pengakuan lebih baik pula dari masyarakat. Dalam hal ini, para haji, ustadz, dan ulama adalah figur yang mendapat tempat tersendiri di tengah masyarakat. Mereka juga merupakan

pemimpin informal yang ikut menentukan keputusan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pemimpin informal, para haji, *ustadz*, dan ulama merupakan kaum elit yang ditaati, sehingga raja setempat menempatkan mereka sebagai penasehat pemerintahan kerajaan.

Sebagaimana garis pokok dari kelahiran Sarekat Islam di Nusantara adalah memajukan usaha para pedagang muslim, sehingga mampu bersaing dengan dominasi para pedagang Cina yang mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial, maka golongan yang menjadi tulang punggung bagi kehadiran dan pengembangan Sarekat Islam di Tolitoli, bukan saja kaum pedagang, tetapi juga mendapat dukungan luas dari kaum petani. Oleh karena itu usaha yang pertama didirikan di Tolitoli untuk mendukung tegaknya organisasi ini adalah dengan mendirikan koperasi.<sup>20</sup> Satu hal yang menarik diamati mengenai keberadaan Sarekat Islam di Tolitoli adalah terjadinya jalinan kerja sama antara para pedagang dengan para petani yang diikat oleh rasa persaudaraan sebagai umat Islam. Kedua golongan tersebut menjadikan Sarekat Islam sebagai pembawa syiar untuk umat Islam. Dari dasar pemikiran itu para petani Tolitoli sebagai masyarakat mayoritas yang juga mayoritas beragama Islam sangat mendukung keanggotaan Sarekat Islam. Dukungan tersebut menjadi modal yang kuat bagi perkembangan Sarekat Islam selanjutnya.

Setelah organisasi Sarekat Islam resmi berdiri di Tolitoli, maka CSI melakukan pengedaran kartu anggota organisasi.

---

<sup>20</sup> KV (1920), *op. cit.*, hlm. 499.

Kartu anggota tersebut diberikan kepada anggota organisasi SI sebagai kartu identitas dan sebagai bukti penerimaan uang sumbangan anggota. Dalam kartu anggota SI bergambar seekor banteng di samping bintang dan bulan sabit. Selain terpampang lambang, terdapat pula tulisan *Innamal Mukminuna ikhwatun* yang artinya, "Semua orang Islam adalah bersaudara". Maknanya kalimat dalam lambang tersebut jelas yaitu yang berkaitan dengan agama sangat diutamakan. Tampaknya digambarkan sebuah hati yang di dalamnya terdapat seekor banteng yang siap tempur (seekor banteng yang bernafsu, tanduk runcing, dan kepala tertunduk). Pada banteng itu tertulis, mardika, kuwasa, keterangan, kekuatan, dan ketegaran.<sup>21)</sup>

Kehadiran Sarekat Islam di Tolitoli dengan berbagai atribut dan misi yang diembannya tertangkap makna kesadaran hati yang tumbuh pada masyarakat pribumi yang sebelumnya mau diperlakukan sewenang-wenang, tapi kini siap untuk merebut kembali haknya. Dalam hatinya tertanam ungkapan prinsip dalam berbagai jenis senjata tradisional sebagai lambang keberanian dan kekuatan dari semua suku bangsa di daerah kepulauan itu. Di atas senjata mereka tertulis, "billahi fie sabilil haq" (Bersama Allah di jalan kebenaran). Di bawah hati ada suluh, timbangan batang padi dan aren yang diikat dengan tali dengan tulisan Arab yang artinya, "Suatu iman bagi orang lain bagaikan bangunan yang saling memperkuat". Maknanya jelas dan tidak perlu diperdalam. Akhirnya pada tali itu terdapat

<sup>21)</sup> Lihat laporan Ziesel dari Tolitoli yang dimuat dalam (IG) *op. cit.*, 1921, hlm. 364-365.

gambar tokoh puncak CSI Cokroaminoto.<sup>22)</sup>

Pernyataan dari rakyat yang telah masuk menjadi anggota Sarekat Islam, bahwa meskipun mereka kehilangan jalan keluar, senjata akan bersedia mengarahkannya (menghadapi perang), sehingga kata *sabil* yang berada di belakangnya merupakan jalan Allah (*Sabilillah*) yang harus dipertahankan.

Daerah-daerah yang dikunjungi oleh wakil ketua CSI Muis di Sulawesi Tengah pada tahun 1919 adalah daerah Donggala, Wani, Palu, dan Tolitoli. Dalam kunjungannya tersebut, selain mengadakan rapat umum di Tolitoli yang sangat terkenal itu, Abdul Muis juga mengadakan rapat umum di daerah Wani yang terutama membahas mengenai masalah yang muncul dalam kongsi dagang di daerah setempat. Pembicaraan mengenai kongsi dagang dengan para pemegang saham, akhirnya berubah menjadi percek-cokan yang menyebabkan kongsi dagang tersebut tidak dapat berjalan sesuai harapan. Abdul Muis juga membicarakan masalah Sarekat Islam di Donggala yang mengalami perpecahan. Kehadiran wakil ketua SI itu memiliki arti sangat penting bagi persatuan kembali SI Donggala.

Sementara di Tolitoli terdapat tiga kelompok masing-masing penguasa otonom Raja Tolitoli Haji Ismail Bantilan, Syahbandar, dan Raja Muda Tolitoli. Akibat dari usaha pengurus SI dalam hal pajak, kerja wajib, dan dalam bidang politik, maka para pejabat Eropa memperketat pengawasan terhadap aktivitas dan tindakan SI dengan jalan mendekati penguasa

---

<sup>22)</sup> *Ibid.*, hlm. 365.

pribumi lokal yang sebahagian tidak mendukung kehadiran SI. Tindakan pengawasan yang dilakukan terhadap SI, menjadi sebab bagi anggota SI untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah kolonial.<sup>23)</sup>

Pada tahun 1918 J.P. de Kat Angelino diangkat menjadi kontrolir di Tolitoli menggantikan pejabat lama yang telah berakhir tugasnya. Pada awal tugasnya Kontrolir Angelino melakukan orientasi dan penelitian dengan menemukan keadaan yang masih perlu banyak dibenahi termasuk upaya menghadapi penolakan penduduk terhadap program kerja wajib yang dipropaganda oleh SI lokal. Kontrolir Angelino dituntut untuk menetapkan aturan yang mengatur hubungan tradisional antara negori di sepanjang pantai Tolitoli tidak hilang. Dari hasil orientasi yang dilakukannya terutama menemukan perlunya membuat jalan di ibukota termasuk di Labuan Dede, sampai dengan jalan sepanjang pantai yang melingkari kota Tolitoli. Pembuatan dan perbaikan jalan yang direncanakan untuk mencapai kelancaran dan kemajuan pertanian dan perdagangan.<sup>24)</sup>

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas telah menggambar kan, bahwa kehadiran Sarekat Islam sebagai organisasi keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik, selain mampu membawa perubahan di bidang sosial, dan politik, melainkan juga yang lebih utama adalah kebangkitan kehidupan keagamaan bagi penduduk Tolitoli.

<sup>23)</sup> Ibid., hlm. 366

<sup>24)</sup> Ibid., hlm. 367.

#### BAB IV

### GERAKAN PEMBERONTAKAN RAKYAT TOLITOLI

#### A. Gambaran Umum Sebelum Peristiwa Pemberontakan

Pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919 sangat monumental bagi rakyat Sulawesi Tengah, karena peristiwa itu menandai puncak perjuangan rakyat dalam melawan penetrasi pemerintah kolonial di daerah ini. Peristiwa lain yang pernah terjadi sebelumnya, seperti gerakan perlawanan rakyat Biromaru 1905, perlawanan rakyat Kulawi 1904, perjuangan rakyat Mori 1907, gerakan sosial di Peore 1907, perlawanan rakyat Moutong 1902, semuanya sangat terbatas dan dapat ditumpas oleh Belanda sebelum perlawanan-perlawanan tersebut dapat berkembang lebih jauh.<sup>4)</sup>

Sebelum peristiwa pemberontakan 1919 meletus, akar-akar konflik antara masyarakat Tolitoli dengan pemerintah kolonial telah tumbuh semenjak masuknya SI pada tahun 1916. SI sebagaimana di wilayah lain di Indonesia merupakan organisasi yang anti terhadap penindasan, anti monopoli terhadap kaum kapitalis Eropa dan Cina. Sikap anti penindasan dan monopoli terhadap pemerintah kolonial Belanda dan bangsa Cina, tumbuh dan berkembang begitu cepat di kalangan penduduk peribumi Tolitoli. Percepatan itu selain oleh karena adanya unsur radikalisme yang ditanamkan oleh para tokoh CSI dan SI lokal,

<sup>4)</sup> Juraid (Ed.), Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (Palu : Bapeda Tingkat I Sulawesi Tengah, 1991).

tetapi juga disebabkan oleh rasa senasib dan sepenangungan umat Islam yang tidak memiliki kebebasan berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.

Rasa kebencian masyarakat terhadap rezim Belanda telah tumbuh secara diam-diam akibat penindasan dan sikap mengeksploitasi tenaga penduduk untuk mengurus kepentingan pemerintah kolonial. Rasa kebencian itu lebih kuat lagi dengan keadaan ekonomi penduduk pada masa kolonial yang sangat memprihatinkan. Para petani yang umumnya tergantung pada tanah sawah dan kebun sebagai lahan garapan untuk mempertahankan hidupnya harus pula tersita waktu dan tenaganya untuk melayani kepentingan pemerintah. Akan tetapi keadaan seperti itu tidak dilaporkan oleh kontrolir maupun residen. Justeru yang dilaporkan adalah penduduk Tolitoli memiliki keadaan sosial ekonomi yang relatif baik. Bahkan Kontrolir Angelino pernah melaporkan, bahwa ketika seluruh wilayah Hindia Belanda mengalami musim paceklik, Tolitoli justeru dapat menghasilkan beras dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Prestasi itu juga dilaporkan sebagai kemampuan penduduk Tolitoli dan keberhasilan kepemimpinan Kontrolir J.P. de Kat Angelino dalam memacu kegiatan pertanian rakyat Tolitoli.<sup>2)</sup>

Kontrolir J.P. de Kat Angelino mulai bertugas di Tolitoli pada bulan Pebruari 1918. Pada awal kepemimpinannya, Angelino mendorong seluruh penduduk untuk membuka lahan persawahan

---

<sup>2)</sup>Tentang keadaan sosial ekonomi termasuk kemampuan Tolitoli dalam menghasilkan beras, periksa KT (1919) hlm. 694 dan periksa juga *De Loconotief*, 13 Juni 1919.

dengan menanam padi sebagai sumber penghasil dan persediaan beras. Angelino mendorong pembukaan lahan pertanian baru bagi penduduk, tetapi di sisi lain, Angelino juga menerapkan kerja wajib terhadap penduduk Tolitoli tanpa mengenal kompromi, bahkan dalam pelaksanaannya disertai dengan cara paksa.<sup>3)</sup> Bahwa penduduk Tolitoli telah berhasil menambah perluasan areal lahan sawah dan kebun mereka adalah kenyataan, akan tetapi apabila dilaporkan, bahwa keadaan ekonomi penduduk Tolitoli relatif baik adalah bertentangan dengan kenyataan. Sebab penduduk berada dalam keadaan paceklik, sedangkan lahan yang tersedia tidak dapat diolah dengan baik oleh karena tenaga kerja mereka juga harus lebih banyak melayani kepentingan kerja wajib dari pemerintah kolonial yang tidak boleh ditolak.

Kontrolir Angelino lebih mengutamakan jalan kekerasan untuk tujuan kepemimpinannya. Hal itu merupakan kepribadian Angelino yang akhirnya menyebabkan dirinya mati terbunuh oleh pemberontakan rakyat pada bulan Juni 1919 yang akan diuraikan dalam bab ini selanjutnya.<sup>4)</sup>

Secara tradisional rakyat Tolitoli berada di bawah kepemimpinan Kerajaan Tolitoli dan setelah masuknya Agama Islam pada Abad ke-17 istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, sedangkan raja kemudian disebut sultan. Pengaruh tersebut berasal dari Kesultanan Ternate. Kedudukan Sultan berada di Nalu sebuah kampung di wilayah kota Tolitoli. Sultan

<sup>3)</sup>Lihat Pangkal Kemadisean, 15 Juni 1919.

<sup>4)</sup>Ibid.

dalam bahasa asli daerah setempat disebut Kalangan.<sup>5)</sup>

Masuknya Sarekat Islam di Tolitoli pada tahun 1916 merupakan pendorong semakin tingginya rasa solidaritas penduduk terutama dengan tumbuhnya kesadaran untuk bekerja sama dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera lahir batin. Dalam membangun dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik itu jangan sampai ditentukan oleh orang lain atau pendatang asing seperti Belanda dan Cina yang bagaimanapun mereka pasti mendahulukan kepentingannya sendiri. Sarekat Islam menghendaki agar kaum bumi putera mengupayakan perbaikan nasibnya sendiri. Hal itu merupakan rasa sentimen yang ditanamkan oleh Sarekat Islam kepada para anggota dan simpatisannya di seluruh Indonesia termasuk di Tolitoli yang bertujuan dapat meningkatkan modal dan kemampuan ekonomi. Salah satu jalan adalah mampu bersaing, bahkan dapat menumbangkan monopoli para pedagang Cina yang ulet dan mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial pada saat itu.

Orang yang mendapat tempat khusus di tengah masyarakat adalah para alim ulama yang mempunyai pengetahuan luas tentang Agama Islam dan para hujai yang telah menunaikan ibadah haji dari kota suci Mekkah dan daerah pelaksanaan haji lain di sekitarnya. Masyarakat luas di Tolitoli menganggap kata-kata dan anjuran para ulama dan hujai sebagai yang terbaik dilaku-

<sup>5)</sup> Meskipun kalangan merupakan istilah daerah setempat, tetapi yang lebih membudaya dalam penggunaannya adalah kerajaan atau kesultanan. Hal itu diperkuat lagi dengan masuknya Agama Islam pada paruh kedua Abad ke-17. Keterangan lebih rinci dapat diperiksa dalam TBG (1912), op. cit., hlm. 40.

kan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.<sup>9</sup> Imam Haji Hayyun sebagai pemimpin pemberontakan yang akan ditentang dalam bab ini selanjutnya merupakan sosok ulama, haji, dan imam yang sangat dihormati di tengah masyarakat pengikutnya. Sebagai penasehat pengurus Sarekat Islam di kampung Salumpaga, ia berhasil mengatur dan mengarahkan semua permasalahan yang tengah di hadapi oleh para anggota dan simpatisannya. Dengan model kepercayaan yang amat tinggi itu, masyarakat yakin bahwa pada diri ulama, haji, dan imam itu selalu terjaga dari tindakan yang terlarang atau yang bertentangan ajaran Islam. Terhadap keyakinan masyarakat di atas, Imam Haji Hayyun menunjukkan kepribadian utuh tanpa cacat, sehingga memiliki kredibilitas pribadi yang tinggi.

#### B. Proses Terjadinya Pemberontakan

Sejak masuknya Sarekat Islam di Tolitoli pada tahun 1916 pada khususnya dan di Sulawesi Tengah pada umumnya, kondisi kehidupan sosial mengalami perubahan terutama di kalangan umat Islam sebagai pendukung organisasi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam senantiasa menggodok para anggotanya agar bersifat kritis terhadap semua persoalan yang dihadapi kepadanya, termasuk bersikap kritis kepada pemerintah.

Kehadiran Sarekat Islam di wilayah Manado, Gorontalo,

<sup>9</sup>Para ulama yang pada umumnya juga haji, menjadi keharusan untuk ditaati kata-kata dan fatwanya, sebab mereka adalah pewaris *nabi-nabi*, lihat penjelasan mengenai ulama sebagai pewaris nabi dalam Sartono Kartodirdjo, Elite dalam Perspektif Sejarah (Jakarta : LP3ES, 1991), hlm. 129.

Donggala, dan Tolitoli, selain membawa pembaharuan kehidupan sosial dan keagamaan, terjadi pula pertentangan antara rakyat Tolitoli dengan pemerintah dan antara keluarga kerajaan dengan anggota Sarekat Islam. Semangat mempertahankan kelompok semakin berkembang terutama para penguasa tradisional otonom yang menguasai kepemimpinan Sarekat Islam. Sejak awal tujuan propoganda Sarekat Islam adalah keterlibatan organisasi itu dalam masalah perpajakan, peraturan kerja wajib, tuntutan hukum, dan bagaimana cara untuk mengatur keuangan setempat.<sup>7)</sup> Tuntutan itu seringkali bertentangan dengan para penguasa otonom yang bertindak sebagai penguasa feodal yang sejak lama telah memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri permasalahannya. Dari kedua belah pihak, baik penguasa setempat maupun dari pengurus Sarekat Islam segera disadari bahwa penyelesaian terhadap perselisihan itu merupakan penyerahan dari salah satu pihak. Pada dasarnya pertentangan itu dimulai secara langsung oleh perhimpunan kekuatan keluarga raja yang didirikan di bawah perlindungan para penguasa otonom yang bertujuan untuk memerangi pengaruh organisasi Sarekat Islam.

Para penguasa otonom mencoba memperkuat pengaruhnya terhadap seluruh penduduk dengan maksud mempertahankan dominasi kekuasaan, sementara pemimpin Sarekat Islam mencoba menanamkan pendekatan keagamaan dan meluaskan pengaruhnya di tengah masyarakat untuk memperkuat basis politik bagi organisasi tersebut.<sup>8)</sup>

<sup>7)</sup> Lihat (IG) tanggal 10 & 13 Juni 1919

<sup>8)</sup> Ibid.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

86

Pertentangan itu dilancarkan terhadap para tokoh penduduk yang terlibat tanpa memiliki kepentingan langsung bagi diri mereka sendiri. Sikap Raja Tolitoli ketika itu menunjukkan bahwa mereka tidak melihat organisasi Sarekat Islam sebagai organisasi yang dapat memberi bantuan untuk menaikkan kemakmuran dan meluaskan pengetahuan penduduk, tetapi juga sebagai saingan politik. Sarekat Islam kemudian segera menerima dasar yang kuat untuk melakukan tuntutan dalam bidang pajak dan kerja wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal itu segera mendapatkan sambutan penduduk di mana-mana. Dalam situasi seperti itu, banyak kalangan penguasa otonom di satu pihak yang ingin memanfaatkan kepemimpinan tradisional yang ditujukan untuk melawan Sarekat Islam, dan para tokoh tertentu di pihak lain yang menghendaki kejatuhan penguasa tradisional otonom sangat membutuhkan bantuan Sarekat Islam.

Pada tanggal 5 Mei 1919 Abdul Muis tiba di Tolitoli dalam kunjungannya di wilayah Sulawesi Utara dan Tengah. Abdul Muis adalah anggota Volksraad dan wakil ketua Central Sarekat Islam (CSI). Dalam kunjungannya, Abdul Muis menyampaikan pidato di depan ribuan penduduk yang sengaja datang karena sangat haus dengan ceramah dari seorang tokoh besar di bidang pengetahuan keislaman dan sosial politik. Kehadirannya memang telah dinanti-nantikan oleh penduduk Tolitoli. Penduduk berduyun-duyun mendatangi tempat diadakannya pidato openbaar yang berlangsung pada tanggal 18 Mei 1919. Meskipun sebahagian dari penduduk harus meninggalkan kesibukan mereka di sawah dan ladang, namun karena ingin langsung mendengarkan pidato seorang

tokoh Islam dan politik yang sangat terkenal, maka untuk kesempatan berharga seperti itu biarlah kesibukan di sawah dan ladang ditinggalkan sementara waktu. Dalam uraian pidatonya, Tuan Abdul Muis menjelaskan tentang persamasalahan yang dihadapi umat Islam yang harus dibangun dan ditingkatkan adalah mengenai pemantapan Agama Islam, penindasan rezim kolonial terhadap rakyat, pelaksanaan kerja wajib, tuntutan SI dalam anggaran dan pajak, pendidikan, dan pandangan SI tentang tata hukum.<sup>9)</sup>

Keenam hal yang dijelaskan oleh Abdul Muis adalah sebagai berikut : Pertama, agama. Abdul Muis mengingatkan tentang ancaman bagi umat Islam terhadap kegigihan dan ketekunan zending Agama Kristen yang mendapat dukungan dari pemerintah. Zending mencari tempat-tempat yang strategis sebagai pusat pengembangan Agama Kristen. Oleh karena itu Muis mengingat umat Islam di Tolitoli untuk menyebarkan dan memperkuat iman untuk membendung bahkan dapat menyaingi kekuatan para zending dengan jalan membangun lembaga pendidikan di setiap daerah dan cabang SI. Kedua, penindasan. Abdul Muis menguraikan masalah penindasan dengan mengambil contoh tanah air yang disebut mutiara oleh Residen Multatuli. Perumpamaan tersebut bagaikan sebuah rumah yang pemiliknya tidak berkuasa terhadap rumahnya sendiri, tetapi justeru tamu (penjajah) yang lebih berkuasa. Pemiliki rumah hanya mampu menuruti kehendak tamu yang berbuat sewenang-wenang. Ketiga, kerja wajib. Pemerintah telah

<sup>9)</sup>Laporan Ziesel mengenai pemberontakan rakyat Tolitoli pada bulan Juni 1919 dalam (IG) 1921, *op. cit.*, hlm. 368-370.

telah membuat peraturan tentang kerja wajib yang dibebankan kepada rakyat dengan cara paksa. Rakyat dipaksa membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, saluran air, dan sebagainya. Kerja wajib itu lebih banyak mengeksploitasi tenaga kerja para petani untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sementara rakyat harus mengabaikan kepentingannya sendiri terutama dalam pencaharian hidupnya. Selanjutnya Muis mengatakan, bahwa sebaiknya rakyat harus diakui sebagai manusia bebas dan merdeka. Muis menjumpai para pekerja wajib di Tolitoli yang harus meninggalkan tugasnya karena kehabisan bekal makanan, sementara pemerintah kolonial tidak memikirkan penanggulangannya. Keempat, tuntutan SI dalam anggaran dan pajak. Dalam pidatonya mengenai anggaran dan pajak, Muis menunjuk tentang satu Piagam yang telah dibuat yang mengakui bahwa, tidak ada bangsa tertentu di dunia yang berhak merampas hak bangsa lain. Pemerintah kolonial Belanda harus menjadi sasaran tuntutan agar dapat bertanggung jawab dalam kehidupan ekonomi rakyat, bukan sebaliknya, bahwa rakyat dibebani tanggung jawab yang berat dalam hal anggaran dan pajak. Karena itu rakyat harus menguasai ekonomi, sebab ekonomi merupakan kunci kehidupan. Kenyataannya militer terlalu banyak menuntut anggaran negara yaitu hampir 33 %, demikian penetapan pemerintah, sehingga susah diperkirakan dari mana sumbernya. Muis bertanya mengapa pemerintah tidak membiayai pembangunan jalan, membuka perkampungan baru bagi pedesaan, dan mengapa pemerintah juga tidak membangun gedung untuk umum. Kelima, pendidikan. Untuk memajukan nasib rakyat banyak, pendidikan mutlak

diperlukan demikian Abdul Muis menegaskan. Sebenarnya banyak anak-anak usia sekolah yang ditolak masuk sekolah karena fasilitas sekolah tidak tersedia. Oleh karena itu perlu dibuka sekolah-sekolah baru untuk memenuhi tuntutan pembinaan pengembangan pendidikan. Keenam, pandangan SI tentang Tata Hukum. Dalam masalah tata hukum dan pelaksanaannya Abdul Muis secara rinci mengupas mengenai tata hukum dan pelaksanaannya yang buruk. Tata hukum yang buruk itu berlaku di seluruh daerah yang ada di Nusantara tak terkecuali di daerah otonom. Dalam kenyataannya terjadi tindakan sewenang-wenang, kecurangan, dan kecurigaan terhadap anggota SI berupa ancaman sampai dengan penahanan. Kasus demikian terjadi di Tolitoli yang kemudian diajukan penyelesaiannya kepada asisten residen, selanjutnya kepada Residen Manado. Baik asisten residen maupun residen tidak dapat menyelesaikan kasus itu kecuali menyerahkan kepada Gubernur Jenderal. Padahal semua rakyat sanggup menderita demi kebenaran dan kebebasan tidak peduli apapun jalannya. Ada lagi satu kasus seorang desa yang dirampas pohon kelapanya. Saya mengatakan kepada pemerintah, bahwa masalahnya akan diatur oleh raja dan marsaoleh. Selain kasus di Tolitoli, terdapat pula kasus saudara Wijoto yang dihukum di Palu. Wijoto adalah sekreraris SI Palu dihukum karena menghina peradilan. Kemudian dia menyebut seorang haji yang telah meminjamkan uang kepada kepala kampung dan memiliki bon piutang. Ketika haji itu menjadi anggota SI, dia meminta kembali uangnya. Anehnya haji itu kemudian dituduh mencemarkan nama baik kepala kampung dan dianggap bersalah dan karena itu dia dihukum penjara. Ada satu

lagi contoh kasus ketimpangan hukum yaitu yang menimpa saudara Raja Dolo. Raja Dolo dibuang atas tuntutan tiga orang yang dekat dengan pemerintah. Kasus ini akan saya bicarakan dengan pemerintah. Kita harus berani karena benar dan siap dihukum apabila ternyata salah, tetapi tidak sekedar menerima hukuman yang tidak jelas dasarnya, apalagi orang yang tidak salahpun dihukum. Saya akan sampaikan kepada CSI tentang tekanan yang menimpa rakyat kita terutama anggota SI. Ternyata pemerintah tidak bisa berbuat tegas dalam kebenaran. <sup>10)</sup>

Kunjungan wakil ketua CSI, Abdul Muis dengan meninggalkan berbagai kesan dari pidatonya yang telah memukau penduduk Tolitoli, sehingga membangkitkan kesadaran dan semangat baru bari rakyat pada umumnya dan anggota Sarekat Islam khususnya. Kesadaran tersebut selain meningkatkan pengamalan ajaran Islam juga dalam partisipasi politik yaitu kepedulian terhadap nasib masa depan Sarekat Islam dan daerahnya.

Dalam peningkatan pengamalan ajaran Islam tampak pada penunaian shalat lima waktu di rumah, di mesjid, mushalla, dan langgar. Shalat Jum'at bagi kaum pria semakin semarak, demikian juga jumlah penduduk yang merencanakan naik haji semakin meningkat. Dalam wujud sikap dan partisipasi politik

<sup>10)</sup> Demikian itulah pidato propaganda Abdul Muis wakil ketua CSI ketika mengadakan kunjungan di Tolitoli. Pidatonya ibarat minyak yang ditaburkan pada api yang menyala, kemudian meledak, sehingga tidak mampu dibendung oleh kekuatan air pemadam. Bahkan nyala api semangat yang ditaburkan dengan siraman bahasa yang menarik itu membuat rakyat Tolitoli semakin anti pemerintah. Sikap radikal yang ditanamkan oleh pimpinan CSI itu segera meletus setelah mendapatkan komando dari seorang Imam. Pidato dan keterangan tentang kedatangan Abdul Muis dapat diperiksa Koloniaal Literatuur mengenai laporan Ziesel dalam IQ (1921), *ibid.*

terutama bagi para anggota dan pengurus Sarekat Islam lokal, mulai menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan pimpinan tradisional Kerajaan Tolitoli dan pemerintah kolonial. Sikap kritis masyarakat itu terutama berkaitan dengan kerja wajib dan pungutan pajak dan yang sangat ketat tanpa melihat kondisi dan situasi masyarakat pedesaan.<sup>11)</sup>

Pada tahun 1905 Raja Haji Abdul Hamid wafat. Almarhum meninggalkan seorang putera yang bernama Tagelan Haji Muhammad, namun masih amat muda untuk menggantikan kedudukan mendiang ayahnya menjadi raja Tolitoli. Kedudukan raja akhirnya digantikan oleh Haji Ismail adik dari Raja Haji Abdul Hamid sebagai pengganti sementara.

Haji Ismail sebenarnya adalah orang tua yang bijak, namun pada tahun 1914 tidak mampu lagi untuk memimpin tampuk kerajaannya. Yang menarik dicermati dari Haji Ismail adalah, bahwa dia tidak mau mundur apabila yang menggantikannya selain Raja Muda Tagelan,<sup>12)</sup> sedangkan Mogi Haji Ali anaknya Haji Ismail pada saat itu adalah Ketua (Presiden) Sarekat Islam daerah Tolitoli yang amat tertarik untuk menjadi putra mahkota (raja muda) dan pada tahun 1915 memohon pegunduran diri sebagai pegawai yang digaji oleh pemerintah. Ketika itu Haji Ali berusaha tampil sebagai pewaris tahta kerajaan dan

<sup>11)</sup> M. Lubis, *Pemberontakan Tolitoli (Tiga Kaum SI Mati Digantung)*, *op. cit.*, hlm. 16.

<sup>12)</sup> Tentang penggantian tampuk kerajaan itu semakin menarik oleh karena ada upaya luar termasuk anaknya sendiri untuk memaksa Haji Ismail menyerahkan kekuasaannya kepada Haji Ali. Situasi menjelang penggantian raja, lihat IG (1921), *op. cit.*, hlm. 371-372.

menyatakan diri sebagai pengganti ayahnya. Setelah Mogi Haji Ali disetujui oleh kontrolir untuk menjadi raja, maka ia selanjutnya menyetujui dan menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 27 Juli 1918.

Meskipun Mogi telah menandatangani Korte Verklaring, situasi di lingkungan keluarga kerajaan masih belum tenang, karena ada pihak yang tidak setuju terhadap pengangkatan Mogi Haji Ali. Ketidaktenangan tersebut tetap berlangsung sampai dengan tanggal 15 Mei 1919 ketika usul pengesahan Mogi Haji Ali sebagai Raja Tolitoli mendapat persetujuan dari Residen Manado.

Situasi penggantian Raja Tolitoli pasca Haji Ismail mengandung intrik-intrik politik, sebab melibatkan campur tangan pemerintah dalam hal ini Kontrolirlah yang mengajukan calon raja kepada Residen Manado melalui asisten residen untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan sebagai raja yang akan berkuasa. Masalah itu sebelumnya tidak pernah dilakukan, karena penggantian raja sebagai penguasa tradisional yang otonom berjalan sebagaimana aturan yang berlaku sejak masuknya Agama Islam pada paruh kedua abad ke-17. Akan tetapi karena Kerajaan Tolitoli telah mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, maka perubahan itu harus diterima dan menjadi tradisi baru dalam pengangkatan seorang raja.

Satu hal lagi yang membawa perubahan kehidupan sosial politik di Tolitoli sejak awal tahun 1919 atau setelah kunjungan Abdul Muis selaku wakil ketua CSI. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pidato Abdul Muis telah membakar

semangat rakyat Tolitoli untuk melakukan yang terbaik berdasarkan kaidah ajaran Islam yaitu *amar ma'ruf dan nahi mungkar* yang berarti menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan menjauhkan semua dari larangannya. Tugas suci bagi umat Islam adalah mempertahankan yang benar, memperbaiki yang salah, dan menjauhkan diri dari larangan Allah yang sudah pasti dapat membawa manusia kepada kehinaan dan kebinasaan. Implikasi dari rasa keberagamaan yang demikian kuat menyebabkan rakyat tidak dapat menerima begitu saja sesuatu yang dihadapkan kepadanya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan pesan-pesan kebenaran agama yang telah bersemi dalam hati rakyat itu bagaikan bom waktu, suatu saat dapat ditentukan kapan ia meledak untuk menerkam sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Dari sinilah rencana untuk menyusun siasat, taktik, dan pematangan strategi dalam melawan nilai kebatilan yang secara sadar atau tidak ditegakkan oleh pemerintah kolonial. Lagi pula masalah yang terkait dengan kerja sama dengan penguasa tradisional otonom tidak dibiarkan bertahan lama. Imam Haji Hayyun selaku penasehat Sarekat Islam Salumpaga sebagai tokoh masyarakat yang kharismatik merupakan otak penggerak massa rakyat. Rakyat Tolitoli yang telah lama menantikan datangnya pembawa kedamaian di bumi dari seorang yang mempunyai kesucian diri, menyerahkan tumpuan harapannya kepada Imam Haji Hayyun. Imam Haji Hayyun tampaknya sangat tegar menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pemerintah yang menerapkan pungutan pajak dan

kerja wajib.<sup>13)</sup>

Selain Imam Haji Hayyun, ada satu lagi orang yang sangat berpengaruh yaitu Maros. Maros adalah Ketua Ranting Sarekat Islam Salumpaga yang sangat disegani karena kemampuan bicaranya dan keberaniannya membangkitkan semangat rakyat untuk melakukan penolakan terhadap kebijaksanaan pemerintah yang membebani rakyat. Imam Haji Hayyun dan Maros mampu menyalakan api semangat rakyat setempat untuk bertindak dan melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kedamaian, dan ketenangan sebagai dambaan semua. Maros adalah seorang suku Bajo yang kerap dianggap kontroversial, tetapi tetap dicintai rakyat. Keberadaannya di Salumpaga bersama dengan Imam Haji Hayyun sebagai tokoh Sarekat Islam sangat mempengaruhi karakteristik kehidupan penduduk setempat dan sekitarnya. Maros pulalah yang menjadi otak agar rakyat sebagai pekerja wajib berani meninggalkan tugasnya tanpa sepengetahuan kontrolir.<sup>14)</sup>

Pengaruh kuat yang dimiliki oleh Maros, karena setiap tindakannya sangat cerdas dan disenangi oleh rakyat, sehingga Maros beranggapan, bahwa setelah rakyat pekerja wajib pulang dari Labuan Dede Kalangkangan, tempatnya mereka bekerja, segera menjadi kekuatan besar untuk bergabung dengannya sebagai kekuatan Sarekat Islam. Berdasarkan kepada perhitung-

<sup>13)</sup> Mengenai ideologi perang sabil sebagai sumbu gerakan milenari di Jawa, rupanya menunjukkan ciri yang sama dengan gerakan sosial di Tolitoli dan luar Jawa lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang amat baik mengenai gerakan milenari, lihat Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten*. (Jakarta : Pustaka Jaya, 1984), hlm. 19-23.

<sup>14)</sup> Lihat IG (1921), *op. cit.*, hlm. 373.

gan dan pertimbangan di atas, maka rencana pemberontakan segera dimatangkan. Maros bersama Inam Haji Hayyun mempersiapkan pertemuan rahasia untuk segala sesuatu yang dianggap penting, sehingga gerakan dalam bentuk pemberontakan untuk melawan pemerintah segera dimulai. Sehari sebelum berlangsung pertemuan itu para pekerja wajib mendapat instruksi dari Maros sebagai Ketua SI Salumpaga untuk menjadi kekuatan dalam pemberontakan itu.

### C. Penerapan Kerja Wajib

Kerja wajib merupakan salah satu dari 3 unsur utama sistem Tanam Paksa yang dijalankan pemerintah kolonial di daerah pedesaan Jawa. Pertama, heerendiensten merupakan semacam penyediaan tenaga kerja secara paksa.<sup>15)</sup> Sistem ini berakar pada kebiasaan-kebiasaan tradisional sebelum penjajahan, tetapi selama masa pemerintahan Belanda, sistem ini menjadi semacam kewajiban bagi penduduk.<sup>16)</sup> Pada masa sistem Tanam Paksa (1820-1870) terbagi dalam 3 kategori, yaitu heerendiensten, pantien diensten, dan kultuurdiensten. Heerendiensten diterapkan pada berbagai bidang pekerjaan umum seperti pembuatan jalan-jalan baru, membangun gedung pemerintah, fasilitas keamanan, dan lain sebagainya. Pantien

<sup>15)</sup> Djoko Suryo, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900. (Yogyakarta : PAU Studi Sosial UGM, 1989), hlm. 38.

<sup>16)</sup> Ibid.

diensten meliputi pekerjaan di bidang pertanian milik pemimpin desa dan pemimpin pribumi lainnya, sedangkan Kultuurdiensten adalah dalam bidang pembukaan lahan baru pertanian baik sawah maupun kebun. Dari ketiga kategori yang pernah ada pada masa sistem Tanam Paksa di Jawa itu, maka yang diterapkan di luar Jawa khususnya di wilayah Karesidenan Manado adalah haerendiensten (kerja wajib).

Di daerah Tolitoli yang merupakan bagian dari Karesidenan Manado, kerja wajib dilaksanakan di bawah pengawasan seorang kontrolir. Ketika itu kontrolir di Tolitoli adalah J.P. de Kat Angelino yang mulai bertugas di Tolitoli pada bulan Februari 1918. Setelah sekian banyak kampung di Tolitoli melaksanakan kerja wajib, Angelino kemudian menetapkan penduduk kampung Salumpaga untuk membuat dan memperbaiki jalan yang terletak di Labuan Dede Kalangkangan, sebuah kampung yang tidak terlalu jauh dari kota Tolitoli. Jalan yang akan dibuat dan diperbaiki panjangnya sebanyak 3 (tiga) kilometer. Jalan tersebut selain belum tembus, sebahagiannya tertimbun tanah akibat hujan dan banjir beberapa hari sebelumnya. Untuk memperbaiki kembali jalan itu, pemerintah Belanda mewajibkan 50 orang pekerja dari Salumpaga. Dari Salumpaga, para pekerja harus naik perahu selama satu malam (12 Jam), tetapi apabila dengan jalan kaki, maka waktu tempuh selama 2 hari dan 1 malam (36 Jam). Para pekerja wajib sebanyak 50 orang itu melakukan tugas di tengah terik matahari dengan menanggung sendiri bekal makan dan minumannya. Setelah pekerjaan itu berlangsung 6 hari, persediaan bekal makan dan minum telah habis, sementara bulan puasa

segera tiba waktunya. Para pekerja melakukan perundingan, yang hasilnya sepakat untuk mengusulkan kepada mandor pengawas agar menyampaikan kepada kontrolir supaya kerja wajib ditangguhkan dahulu sampai dengan selesainya bulan suci Ramadhan. Usul para pekerja itu disampaikan oleh Mandor kepada kepala distrik Tolitoli Utara. Kepala distrik pada saat itu adalah Hadji Muhammad Saleh Bantilan adik kandung Mogi Haji Ali. Usul para pekerja itu tidak mendapat tanggapan meskipun para pekerja wajib sangat menunggu secepatnya, sedangkan bulan puasa telah tiba waktunya. Dalam kondisi sulit seperti demikian, akhirnya para pekerja berunding sekali lagi dengan melahirkan keputusan segera kembali ke Salumpaga dan langsung berbondong naik perahu pada malam hari itu juga. Setelah tiba di Salumpaga mereka melaporkan permasalahannya kepada kepala kampung Salumpaga Abdul Karim, bahwa mereka harus kembali karena kehabisan bahan makanan dan bulan puasa sudah tiba. Mereka juga akan tetap bersedia melanjutkan kerja wajib setelah usai bulan puasa dengan mempersiapkan tenaga yang lebih prima.

Seperti dapat diduga, bahwa kepulangan mereka dari kerja wajib bukan saja merupakan hasil kesepakatan dari para pekerja itu sendiri dengan alasan kehabisan persediaan makanan dan masuknya bulan puasa, melainkan juga dan inilah yang sangat menarik ditelaah, adalah bangkitnya jiwa keberanian yang disemangati oleh ideologi Sarekat Islam di bawah komando terselubung dari Imam Haji Hayyun dan Maros. Kedua tokoh yang disebutkan itu sebagaimana telah dijelaskan juga sebelumnya,

merupakan tokoh yang amat didengar dan disegani. Hubungan kedua tokoh itu dengan masyarakat, sangat terjalin terutama yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah kolonial dalam masalah kerja wajib dan pajak. Keterjalinan dan keberanian itu sudah barang tentu telah diperkirakan akan mendapat resiko dan akibat tidak baik bagi pemerintah kolonial.

Kepala Kampung Salumpaga telah mendengar laporan dari mereka yang telah pulang dan meninggalkan kewajibannya, langsung ke Tolitoli untuk melaporkan kejadian itu kepada Kepala Distrik Tolitoli Utara, Hadji Muhammad Saleh Bantilan, bahwa rakyat Salumpaga telah melarikan diri dari tugasnya atau melawan pemerintah. Mendengar laporan itu, kepala distrik langsung menghadap Raja Tolitoli Hadji Muhammad Ali Bantilan (Raja Mogi Hadji Ali) untuk menjelaskan duduk persoalan yang terjadi. Mendengar hal itu Raja Tolitoli amat heran dan mengatakan mengapa bisa terjadi? Tidak lama sesudah itu raja pun bergegas untuk menghadap Kontrolir J.P. de Kat Angelino melaporkan hal serupa. Setelah mendapat laporan lengkap dari Raja Tolitoli tanpa menunda waktu sedikitpun langsung mengajak Raja Tolitoli, kepala distrik, Mantri Pajak C. Suatan, 5 orang polisi bersenjata, dan ditambah dengan 2 orang opas, langsung berangkat dengan tiba-tiba dengan menaiki perahu menuju Salumpaga. Mereka bermaksud membereskan persoalan para pekerja wajib yang berani lari dan meninggalkan tugasnya.

Setelah melewati perjalanan satu malam dari Tolitoli, rombongan kontrolir tiba di Salumpaga pagi hari ketika sinar matahari baru beberapa saat menerpa bumi. Kontrolir, Raja

Tolitoli, dan seluruh rombongan turun dari perahu dengan mendapat sambutan dari Kepala Kampung Salumpaga Abdul Karim, langsung menuju tempat pertemuan yang telah disiapkan. Tidak sampai beberapa saat lamanya, kontrolir memerintahkan kepada kepala kampung untuk mengumpulkan semua para pekerja wajib yang melarikan diri. Untuk mempercepat pengumpulan para pekerja, para polisi bersenjata yang turut serta dalam rombongan kontrolir, dikerahkan.<sup>12)</sup>

Setelah semua penduduk sebagai pekerja wajib yang melarikan diri tersebut berkumpul, maka berdirilah Kontrolir J.P. de Kat Angelino menanyakan, apa sebab kalian berani melawan pemerintah dengan cara meninggalkan tugas kewajiban. Salah satu di antara pekerja wajib yang mewakili temannya menjawab, kami kembali karena disuruh oleh ketua SI. Mendengar jawaban demikian, kontrolir marah besar dan selanjutnya mengatakan, ada apa SI turut campur dengan kerja wajib untuk kepentingan rakyat dan pemerintah. Begitu mendengar pernyataan kontrolir dengan nada marah, penduduk yang berkumpul, terdiam dalam suasana hening. Melihat keadaan itu berdirilah Iman Haji Hayyun membela para pekerja wajib kemudian menjawab pertanyaan Kontrolir Angelino dengan mengatakan, Tuan, mereka tidak melawan pemerintah dan tidak pula melarikan diri, melainkan persediaan bekal makanan para pekerja telah habis serta telah tibanya bulan puasa, maka pada saat ini saya mohon kiranya Kontrolir dapat mengabulkan permohonan mereka untuk bekerja kembali setelah berakhir-

<sup>12)</sup> Periksa Bataviaasch Nieuwsblad (BN), 11 Juni 1919.

nya bulan puasa. Saya sendiri sanggup memimpin mereka untuk bekerja kembali apabila bulan puasa telah selesai dengan kondisi fisik dan tenaga yang lebih siap".<sup>13)</sup>

Permohonan itu sama sekali tidak digubris oleh Tuan Kontrolir, justeru rakyat yang dianggap pembangkang itu diperintahkan segera kembali ke Tolitoli meneruskan pekerjaannya sampai selesai. Penduduk yang mendapat tugas sebagai pekerja wajib selanjutnya dikawal oleh polisi bersenjata untuk bersiap diberangkatkan ke Tolitoli untuk meneruskan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan. Ketika para pekerja wajib dikawal dan dipersiapkan rencana keberangkatannya, Kontrolir J. P. de Kat Angelino bersama Raja Tolitoli Mogi Hadji Ali, petugas pajak C. Suatan, dan Opas Samaila berangkat ke kampung Pinjan untuk sesuatu keperluan. Tidak dilaporkan apa tujuan rombongan Kontrolir Angelino ke kampung Pinjan. Perkiraan yang mungkin adalah penagihan pajak, oleh karena salah seorang dari anggota rombongan yang turut serta adalah seorang petugas penagih dan pencatat pajak C. Suatan.

Dalam perjalanan kunjungan kerja di berbagai kampung yang berada di wilayah kekuasaannya, seorang kontrolir Tolitoli selain mengontrol pelaksanaan kerja wajib, juga tidak luput untuk memantau secara langsung pungutan berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada penduduk setempat guna memenuhi kas pemerintah kolonial.<sup>14)</sup>

<sup>13)</sup> Ibid.

<sup>14)</sup> KV (1920), op. cit., hlm. 27.

Dalam suasana yang serba tegang seperti itu akhirnya Imam Haji Hayyun dan Maros sebagai pemuka Sarekat Islam dengan penduduk Salumpaga dan kampung sekitarnya melangsungkan pertemuan untuk mencari jalan keluar yang menimpa para pekerja wajib dan tindakan apa yang paling tepat untuk menyelesaikannya. Pertemuan itu dilangsungkan di rumah Imam Haji Hayyun. Pada momen inilah rencana pemberontakan terhadap Belanda dibulatkan. Dari hasil pertemuan itu dibuatlah satu siasat untuk mengajukan kembali permohonan agar kerja wajib ditangguhkan terlebih dahulu sampai berakhirnya bulan suci Ramadhan. Pengajuan tersebut dilakukan oleh Imam Haji Hayyun ketika kontrolir bersama rombongannya kembali dari Pinjan. Setelah pertemuan selesai dengan kesepakatan untuk meminta penangguhan sanksi bagi para pelanggar yang melarikan diri dari kerja wajib, Imam Haji Hayyun mengingatkan kepada semua penduduk Salumpaga, bahwa apabila permohonan itu tidak dikabulkan, maka pemberontakan berdarah segera dimulai. Ini merupakan prinsip untuk membela kebenaran bagi rakyat dalam menjalankan dan memuliakan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Permohonan penangguhan itu dilatari oleh kesadaran beragama yang sangat mulia. Penduduk yang seluruhnya beragama Islam adalah pantas untuk memberi makna khusus bagi bulan Ramadhan dengan tidak melakukan kegiatan yang berat dan mengisinya dengan amal ibadah Ramadhan lebih banyak.

Berdasarkan kondisi demikian, maka satu hal yang kiranya tidak diwaspadai oleh pemerintah Belanda adalah kesadaran agama dari penduduk yang semakin meningkat setelah datangnya

tokoh Sarekat Islam Abdul Muis di Tolitoli beberapa waktu sebelumnya. Hal itulah yang merupakan penyebab keberanian masyarakat khususnya para pekerja wajib lari meninggalkan tugasnya. Di lain pihak Kontrolir J.P. de Kat Angelino tetap pada prinsipnya untuk memaksa rakyat tetap bekerja meskipun pada bulan Ramadhan. Angelino juga tidak sadar bahwa kerja wajib yang dilaksanakan pada bulan Puasa bertentangan dengan bunyi aturan dalam Pasal 2 ayat 1 Staatsblad Nomor. 7711 mengenai heerendiensten di wilayah Karesidenan Manado pada tanggal 4 Oktober 1912. Staatsblad Pasal 2 ayat 1 itu berbunyi demikian, "pekerjaan pada jalan, jembatan, galian, bendungan, pengairan, got, dan saluran air sebanyak mungkin mungkin dituntut dan dikerjakan pada jangka waktu tertentu dalam setahun, jangan bersamaan dengan saat para pekerja mencurahkan diri pada pertaniannya atau pekerjaan lain sebagai mata pencaharian mereka dan sebanyak mungkin tidak dilakukan pada bulan Puasa untuk orang Islam dan pada hari Minggu atau hari raya Kristen untuk umat Kristen".<sup>15)</sup>

Pada malam hari tanggal 4 Juni 1919, rakyat melaksanakan Shalat Tarwih berjamah di Mesjid Salumpaga. Sementara melaksanakan Shalat Tarwih berjamaah, rakyat yang tengah khsusuk itu tiba-tiba didatangi anggota polisi bersenjata yang langsung memasuki Mesjid dan membubarkan jamaah yang tengah shalat, karena dianggap mengadakan pertemuan untuk melawan

---

<sup>15)</sup> Staatsblad tentang Heerendiensten di Karesidenan Manado dalam Pasal 2 SK 4 Oktober 1912 No. 30 (Pasal 2 ayat 1) hlm. 91.

pemerintah. Para jamaah panik dan ketakutan kemudian membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Mereka merasa heran apa tujuan polisi membubarkan orang Islam yang sedang Shalat Tarwih berjamaah, wallahu 'alam. Dari sinilah kemarahan rakyat penduduk Salumpaga terhadap sikap dan tindakan pemerintah kolonial yang telah dianggap kafir, memuncak. Rasa sentimen keagamaan yang selama ini masih dalam batas-batas kewajaran, kini telah hilang sama sekali, karena orang Islam yang tengah shalat malahan dibubarkan. Padahal dalam ajaran Islam jangankan membubarkan orang yang sedang shalat, bersuara saja ketika orang tengah menunaikan shalat dapat dianggap sebagai pelanggaran. Lebih dari bersuara keras adalah biadab dan tidak dapat ditolerir.

Pada jam 7.00 pagi tanggal 5 Juni 1919, Kontrolir J.P. de Kat Angelino, Raja Tolitoli, dan anggota rombongan lain tiba kembali di Salumpaga setelah perjalanan dari Pinjan. Di sebuah bangunan sekolah sederhana di pinggir jalan yang berfungsi juga sebagai pesanggrahan, kontrolir istirahat dan makan pagi. Sementara para pekerja wajib telah dikumpulkan dan siap diberangkatkan ke Tolitoli untuk menerima hukuman atas pelanggarannya dan sebagian melanjutkan kerja wajib.

Setelah Kontrolir Angelino selesai makan pagi,<sup>16)</sup> menghadaplah Imam Haji Hayyun bersama Otto sambil merendahkan diri untuk meminta yang terakhir kalinya kepada Kontrolir Angelino,

<sup>16)</sup> Kontrolir makan pagi meskipun bulan Puasa, sebab beliau tidak beragama Islam dan tidak memperdulikan orang Islam yang sedang berpuasa di sekitarnya, lihat Soerabajasch Nieuwsblad (SN), tanggal 11 dan 12 Juni 1919.

kiranya hukuman bagi para pekerja wajib yang dituduh melarikan diri dari tugasnya dan lanjutan pelaksanaan kerja wajib bagi rakyat Salumpaga ditangguhkan dahulu selama ibadah Puasa dalam bulan Ramadhan. Sebahagian mereka siap menerima hukuman dan sebahagian yang lainnya siap pula akan bertugas kembali di Tolitoli untuk melanjutkan tugas mereka yang masih tersisa setelah bulan Puasa berakhir. Permohonan itu lagi-lagi tidak mendapat tanggapan dari Tuan Kontrolir, bahkan beliau justeru mengatakan kepada anggota Polisi bersenjata, supaya mereka sekarang juga harus dibawa ke Tolitoli untuk meneruskan kewajibannya. Sementara beberapa orang pelopor pembangkangan harus diberi tugas yang lebih berat sebagai hukuman. Ketika permintaan terakhir rakyat Salunmpaga tetap juga tetap ditolak oleh Kontrolir Angelino, maka Imam Haji Hayyun kemudian berteriak seraya mengucapkan, "Allahu Akbar", Otto langsung menghunuskan kelewangya tepat di bagian kepala Kontrolir J.P. de Kat Angelino kemudian ke bagian lehernya yang diikuti dengan babatan di bagian paha kiri yang menyebabkan kontrolir tersungkur tak sadarkan diri sampai meninggal dunia.<sup>17)</sup> Pada saat yang bersamaan, Hasan menghajar petugas pajak C. Suatan dengan tikaman tepat di bagian jantungnya dan langsung menghembuskan nafasnya yang terakhir tanpa ada perlawanan seperti juga Kontrolir Angelino yang terjebak dalam maut yang mengenaskan. Sementara Raja Muhammad Ali Bantilan (Raja Mogi Hadji Ali) sempat melarikan diri, namun

<sup>17)</sup> Periksa laporan Ziesel dalam IG. (1921), *op. cit.*, hlm. 440-446.

dikejar oleh Kampaeng kemudian ditombak dari belakang yang membuat jiwanya tak tertolong sama sekali. Kepala Distrik Tolitoli Utara Hadji Muhammad Saleh Bantilan lolos dari percobaan maut yang menimpanya karena lari bersembunyi di ke sebuah rumah penduduk, Otobambana. Seorang Opas kerajaan Tolitoli ikut terbunuh dalam peristiwa pemberontakan itu yang dilakukan oleh seorang pekerja wajib. Melihat suasana genting, seorang Opas Wedana lari menuju anggota Polisi bersenjata yang sedang menggiring para pekerja wajib, kemudian berteriak, Kontrolir Angelino telah terbunuh, siapkan pertolongan ! Para polisi bersenjata memerintahkan kepada seluruh pekerja wajib supaya duduk semua, kemudian polisi melakukan tembakan salvo. Akibat letusan tembakan polisi itu, para pekerja wajib merampas senjata para polisi kemudian melepaskan semua ikatan tangan para pekerja dan mengeroyok ke lima orang polisi sampai semuanya tewas tanpa memberi maaf sedikitpun.<sup>18)</sup>

Mayat Kontrolir Angelino dikuburkan di tepi pantai, sedangkan mayat Raja Tolitoli Mogi Hadji Ali Bantilan dan C. Suatan dibawa ke Tolitoli untuk dikuburkan di kampung Nalu. Mayat dari lima orang polisi dikuburkan di Salumpaga tidak jauh dari kuburnya Kontrolir Angelino. Kelima almarhum polisi tersebut adalah kaum pribumi yang dipekerjakan pemerintah Belanda sebagai petugas pengawasan dan keamanan Hindia Belanda

<sup>18)</sup> Tentang jalannya peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli pada bulan Juni 1919 di Salumpaga dapat dilihat dalam catatan wawancara Hasa Tawil dengan bekas pelaku yang masih hidup dan pernah ditawan oleh Belanda di Nusakambangan. Catatan itu dibuat pada tahun 1970 (tidak diterbitkan), *op. cit.*, hlm. 1-4 dan lihat juga *SN* tanggal 11 dan 12 Juni 1919, *ibid.*

Haji Muhammad Saleh Bantilan Kepala Distrik Tolitoli Utara yang lolos dari percobaan maut pada peristiwa pemberontakan berdarah 5 Juni 1919, dua hari setelah peristiwa itu ditemukan oleh para pemberontak kemudian dipaksa supaya mengirim surat kepada Asisten Residen Donggala, Residen Manado, dan Pimpinan CSI. Isinya tentang huru-hara yang terjadi di Salumpaga. Isi surat yang akan dikirim, harus menyebutkan Kontrolir Angelino dan Raja Mogi Hadji Ali dengan tanpa alasan telah mengancam penduduk yang diam dan tenang dengan tembakan dan babatan kelewang karena berani melarikan diri dari kerja wajib dan menolak hukuman kerja paksa sebagai sanksinya, sehingga penduduk terpaksa melakukan pemberontakan untuk membela diri dengan membunuh rombongan kontrolir. Apabila Haji Muhammad Saleh menolak memenuhinya, maka ia tetap akan dibunuh. Perimintaan itupun dipenuhi oleh Muhammad Saleh.<sup>15)</sup>

Sementara Opas Wedana yang juga lolos dari pengejaran para pemberontak, membawa berita ke Tolitoli. Berdasarkan berita dari Opas Wedana tersebut, petugas kehutanan dan juru tulis di Kantor kontrolir Angelino mengirim berita ke Kwandang (Gorontalo) dan Donggala untuk meminta bantuan perlindungan terhadap rumah kontrolir, karena beberapa orang dari pemberontak melakukan penjarahan dan perampokan terhadap toko-toko Cina. Bukti terjadinya perampokan itu ditunjukkan oleh Syahbandar, walaupun tujuan dari pemberontakan tidak demikian,

<sup>15)</sup> Periksa laporan Ziesel tentang Pemberontakan Tolitoli dalam IG (1921), *op. cit.*, hlm. 449, bandingkan juga dengan komentar terhadap laporan Tuan Ziesel tentang masalah yang sama dalam KT (1921). hlm. 494-500.

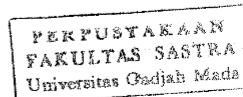
## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

107

kecuali beberapa orang yang tidak tahan diri.<sup>20)</sup> Beberapa orang petugas pemerintah yang berada di rumah kontrolir mengambil tindakan sendiri dengan menyuruh para penjaga sukarelawan untuk melindungi rumah yang menjadi sasaran sebelum datangnya bala bantuan dari Residen Manado.

Berita tentang peristiwa pemberontakan berdarah di Tolitoli pada tanggal 5 Juni 1919 tersiar ke seluruh wilayah Hindia Belanda pada saat itu, bahkan sampai keluar negeri terutama ke negeri Belanda. Oleh karena hubungan transportasi dan komunikasi yang masih kurang baik, maka setelah sembilan hari peristiwa berdarah itu yaitu pada tanggal 14 Juni 1919, barulah Residen Manado, Asisten Residen Donggala, Raja Banawa Lamarau, Raja Muda Tolitoli, dan dengan dua brigade Infanteri tiba di Salumpaga untuk menumpas pemberontakan. Setelah peristiwa pemberontakan pada tanggal 5 Juni 1919, rakyat Salumpaga tetap siaga melanjutkan gerakan perlawanan yang akan muncul sewaktu-waktu dari pihak pemerintah Belanda. Akan tetapi karena pasukan pemerintah lebih memiliki strategi bagus disertai dengan persenjataan moderen lengkap, maka perlawanan rakyat dapat dipatahkan. Sekitar 100 penduduk pria ditangkap dan sejumlah senjata tajam tradisional disita dan dimankan. Dengan penangkapan 100 orang penduduk Salumpaga sebagai pelaku pemberontakan, maka berakhirlah gerakan perlawanan rakyat Tolitoli di Salumpaga. Para pemimpin pemberontak dan anggota

<sup>20)</sup> Ibid., hlm. 500.



yang terlibat ditangkap dan diadili berdasarkan berat ringannya tindakan yang diperbuatnya.<sup>21)</sup>

Selanjutnya Asisten Residen Donggala bertanya kepada para pemberontak rakyat Salumpaga lainnya tentang lokasi kuburan Kontrolir J.P. de Kat Angelino. Salah seorang dari penduduk Salumpaga yang bernama Indala menjawab sambil menunjukkan lokasi kuburan Angelino yang terletak di pinggir pantai. Kepada Indala yang juga sebagai Khatib Salumpaga diperintahkan oleh Asisten Donggala untuk memimpin teman-temannya menggali kembali kuburan Angelino kemudian mayatnya diangkat untuk dikirim ke Batavia dan selanjutnya di berangkatkan ke Negeri Belanda untuk dikuburkan di dekat kuburan keluarganya.<sup>22)</sup>

#### D. Ideologi Pemberontakan

Setiap sifat, karakter, dan ciri dalam sebuah gerakan sosial atau pemberontakan selalu melekat dengan ideologi yang melatarbelakanginya. Rasa ketidak-tenteraman, ketidak-tenangan dan ketidak-adilan yang menimpa sebuah masyarakat seakan-akan hanya berakhir dengan datangnya seorang tokoh yang diyakini memiliki kedigdayaan atau kesatriaan untuk membasmi kebatilan sebagai penghambat kedamaian di bumi. Tokoh yang selanjutnya

<sup>21)</sup> Para pemberontak itu diikat semua tangannya dan dijemur di terik matahari kemudian dikumpul di bawah kolong rumah terutama Haji Hayyun, Kombong, Kampaeng, Otto, dan Hasan Mereka dijaga dengan sangat ketat sampai dibawa ke Makassar untuk diadili. Periksa Hasan Tawil, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>22)</sup> Hasan Tawil, *op. cit.*, hlm. 8.

dianggap sebagai Ratu Adil atau Imam mahdi untuk membawa perdamaian terutama di Jawa pada abad ke-19 sampai dengan paruh pertama Abad ke-20 sebagai bentuk munculnya ide-ide milenari. Pemberontakan rakyat Tolitoli tidak dapat membuktikan gerakan adanya unsur milenaris di dalamnya seperti yang terjadi di Jawa, kecuali bercirikan Perang Sabil. Pada tahap kemudian muncullah istilah-istilah yang mencirikannya seperti, perang sabil dan jihad di jalan Allah yang mulai mewabah di kalangan umat Islam.<sup>23)</sup> Istilah-istilah perang sabil dan jiha, sesungguhnya sudah dikenal oleh masyarakat Islam di Tolitoli. Pengenalan dan pemahaman yang mendalam mengenai jihad fie sabilillah terutama setelah kunjungan Abdul Muis di Tolitoli selaku wakil ketua CSI.

Dengan gambaran akan datangnya perubahan dahsyat yang terjadi dalam masyarakat, bersamaan dengan itu muncul ideologi-ideologi yang dirumuskan oleh tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan menjadi agen terpercaya untuk menjurubicarai setiap kepentingan warga masyarakatnya. Ideologi-ideologi itu amat berpengaruh dalam membentuk cara berpikir masyarakat pendukungnya untuk menentukan arah masa depan yang hendak dihadapi kelak. Akan tetapi dalam realitasnya tidak semua cita-cita yang diimpikan dapat terwujud. Yang jelas, bahwa cita-cita yang berwujud ideologi masyarakat pada gilirannya telah merangsang tanggapan, dukungan, respon, dan keyakinan

---

<sup>23)</sup> Tentang munculnya ide-ide milenari atau ide eskatologis Islam yang memberi harapan akan datangnya Imam Mahdi dapat dipelajari dalam Sartono Kartodirdjo (1984), op. cit., hlm. 232.

pendukungnya, sehingga menjadi bagian dari ideologi yang telah ditanamkan.

Pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919 tidak akan meledak apabila tidak dilatarbelakangi oleh satu ideologi yang kuat. Kekuatan ideologi yang berada di belakangnya merupakan penyebab atau sumber api semangat rakyat untuk bertindak berani menghadapi resiko apapun yang terjadi. Atas nama di jalan Allah dan atas nama keadilan dan kedamaian masa depan, maka pikiran, tenaga, harta benda, dan jiwa rela dipertaruhkan. Sikap dan sifat berani yang kokoh seperti demikian, hanya akan dimiliki oleh orang yang berkeyakinan ideologis dari sekelompok masyarakat dengan ditopang oleh rasa fanatisme agama, suku, dan ras.

Sebagaimana kondisi masyarakat pedesaan yang pada umumnya kaum petani merupakan bagian dari satu tatanan sosial yang lebih luas dan saling berhubungan dalam mengadakan keadaan hidupnya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Demikian pula mereka mengambil bagian di dalam suatu tatanan pengertian-pengertian simbolik, suatu ideologi yang menyangkut kodrat pengalaman manusiawi.<sup>24)</sup> Ideologi seperti itu terdiri atas perbuatan-perbuatan dan gagasan-gagasan, dan upacara-upacara kepercayaan yang memenuhi beberapa fungsi. Perangkat-perangkat perbuatan dan gagasan itu berfungsi untuk mengatasi sesuatu, yaitu membantu seseorang atau kelompok untuk

<sup>24)</sup> Ideologi yang menyemangati gerakan petani di pedesaan dapat diperiksa dalam Eric R. Wolf, Petani Suatu Tinjauan Antropologis (Terj. YIIS) (Jakarta : CV. Rajawali, 1985), hlm. 173-177.

mengatasi kritis kehidupan yang tak dapat dihindari, seperti kegagalan, keadaan sakit, dan kematian. Ideologi dengan demikian memiliki makna moral. Ia menopang cara hidup yang baik dalam suatu masyarakat dan dengan demikian pula dapat menopang ikatan-ikatan sosial yang mempersatukan masyarakat.<sup>25)</sup>

Ikatan-ikatan sosial yang mempersatukan masyarakat secara ideologis sangat susah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar yang bagaimanapun modernnya secara realitas, justru kekuatan modern dari luar yang cenderung mau mencampuri, bahkan ingin menyingkirkannya akan menjadi lawan yang selalu di benci. Apabila kekuatan-kekuatan baru tersebut tidak mampu beradaptasi dengan mereka, maka kehadirannya tetap ditolak. Dalam kenyataannya, semakin kuat desakan dan pengaruh dari luar yang berkeinginan mengubah tatanan masyarakat seperti itu, semakin kuat pula mereka menunjukkan identitas perlawanan yang didemonstrasikannya. Sebagai puncak dari penunjukkan identitas itu adalah pemberontakan. Pemberontakan apapun alasannya niscaya akan membawa korban pada berbagai pihak, pihak, baik para pelaku pemberontakan maupun yang menjadi sasaran pemberontakan itu sendiri. Meskipun akibat yang akan terjadi dalam sebuah pemberontakan telah dapat diketahui sebelumnya, namun hal itu tidak menjadi halangan untuk membatalkan gerakan pemberontakan, sebab para pelaku telah dijiwai oleh satu ideologi yang amat kuat sebagai pembangkit semangat juang.

---

<sup>25)</sup>Eric R. Wolf, *ibid.*, hlm. 174.

Gerakan-gerakan sosial dari bentuk yang sederhana sampai kepada yang sangat besar kerap kali berpusat pada mitos tentang suatu tatanan sosial yang lebih adil dan lebih merata dibandingkan dengan tatanan sosial yang kondisinya bersifat hirarkis. Mitos-mitos seperti itu dapat saja memandang jauh ke belakang untuk suatu kelahiran kembali satu keadaan yang adil dan berdasarkan kesesuaian dengan zaman lampau, atau masa depan menuju format atau tatanan baru yang didambakan.<sup>26)</sup>

Harapan-harapan itu bersifat milenaristis dan mesianistis. Baik milenarsime maupun mesianisme merupakan manifestasi religius sekelompok masyarakat kepada harapan universal yang secara laten hadir pula dalam kebudayaan-kebudayaan kita di berbagai wilayah Indonesia terutama dalam tradisi Jawa. Harapan-harapan itu muncul dengan kuatnya pada masa kritis yang dialami oleh rakyat petani dengan penuh kebingungan dan perasaan gelisah, oleh karena kehilangan arah.<sup>27)</sup>

Dalam kenyataannya, meskipun kecenderungan pada harapan milenaristis dan mesianistik ada di kalangan petani, tetapi kasus Tolitoli tidak dapat dibuktikan. Hal itu berdasarkan bahwa Imam Haji Hayyun sebagai pemimpin pemberontak tidak dianggap sebagai Imam Mahdi oleh rakyat Tolitoli. Imam Haji Hayyun lebih dipandang sebagai tokoh kharismatik yang mampu

<sup>26)</sup> Gambaran tentang gerakan sosial yang dimainkan oleh para petani dengan latar belakang ideologi untuk mengubah masa depan, dapat diperiksa Eric R. Wolf, *ibid.*, hlm. 190. Bandingkan pula dengan Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 232-235.

<sup>27)</sup> Sartono Kartodirdjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 158.

menyatukan hati rakyat untuk mengikuti jejak perjuangannya. Masyarakat petani sangat memerlukan sandaran ideologis kepada seorang tokoh kharismatik seperti Haji Hayyun. Kebutuhan terhadap ideologi bagi masyarakat petani muncul terutama dalam situasi yang berubah serba cepat, sehingga diharapkan dapat memulihkan keamanan sosial.

Ideologi perang sabil tidak saja berarti berjihad fisik dalam berperang melawan musuh, melainkan juga dalam arti mengekang diri dari tindakan maksiat sebagai larangan Allah dan secara konsekuen tetap setia melaksanakan perintah ibadah yang diwahyukan oleh Allah SWT. kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Apabila jiwa-jiwa tawakkal seperti itu telah tumbuh bersemi di dalam jiwa masyarakat, maka tawaran terhadap keindahan dunia tidak lagi dapat menggiurkan. Jasad kasar yang tampak kelihatan secara fisik merupakan pinjaman sementara. Pada suatu saat nanti pinjaman itu mau tidak mau harus dikembalikan kepada yang punya sebagai penguasa sekalian alam ini. KepadaNya kita menyembah dan kepadaNya pula kita mintai pertolongan.<sup>20)</sup>

Pernyataan yang diambil dari ayat Al-Quran Surat Al-Fatihah di atas menjadi benteng pertahanan teramat kokoh bagi rakyat Salumpaga di bawah bendera Sarekat Islam untuk membuat perencanaan dan siasat dalam melibas penindasan yang dialami oleh rakyat baik dalam bentuk pungutan pajak maupun

<sup>20)</sup>Penyerahan diri secara total disebut *Islam Kaffah* dan perasaan bulat hanya kepada Allah tempat menyembah dan tempat meminta pertolongan merupakan sikap orang yang berjiwa taqwa seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 4

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

114

dalam penerapan kerja wajib. Sementara penindasan itu dilakukan oleh pemerintah kolonial yang beragama kafir.<sup>29)</sup> Dalam prinsip Islam bahwa memerangi orang kafir dzimmi merupakan  Jihad fie sabilillah.

Masyarakat Salumpaga dan sekitarnya selalu mendapat dorongan sebagai kaum muslimin untuk berperang melawan orang kafir yang menindas dan memerangi orang muslim. Hal itu merupakan perintah yang harus ditegakkan, sebab orang kafir seperti itu kalau dibiarkan maka mereka akan semakin menindas dan mempermainkan umat Islam kapan dan di mana saja. Oleh karena itu adalah pada tempatnya apabila umat Islam harus menjadi pelopor untuk memberantas kebatilan yang pertama dengan tangannya, apabila tidak mampu maka dengan kata-kata, dan apabila dengan kata-kata belum mampu maka yang terakhir adalah dengan berdoa' dalam hati, namun yang terakhir inilah sebagai gambaran iman seseorang yang paling lemah di sisi Allah.<sup>30)</sup>

Motivasi yang dipancarkan oleh ayat Al-Quran dan Hadits Rasulullah di atas sangat besar pengaruhnya terhadap gerakan pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919. Dasar prinsip yang melatarbelakangi rakyat setempat adalah, bahwa kematian yang disebabkan oleh  Jihad di jalan Allah berarti mati  syahid.

<sup>29)</sup> Ada dua kategori orang kafir menurut ajaran Islam, *pertama* orang yang beragama non-muslim yang dapat hidup berdampingan dengan umat muslim dan tidak mengganggu, sedangkan *kedua*, disebut Dzimmi, artinya beragama non-muslim dan suka mengusik, bahkan menindas orang muslim. Mereka inilah yang halal darahnya untuk diperangi.

<sup>30)</sup> Periksa Hadits Rasulullah SAW. sebagai sumber hukum syar'i kedua bagi umat Islam setelah Kitab Suci Al-Quran.

Suatu kematian yang balasannya masuk surga tanpa melewati pemeriksaan. Berangkat dari keyakinan ideologis seperti itu, niscaya jiwa-jiwa para pemberontak tidak akan dapat dipadamkan oleh kekuatan senjata fisik. Sebelum jiwa mereka habis, selama itu kesetiaan kepada cita-cita perjuangan tetap berkobar. Di sinilah peran para alim-ulama menjadi sangat menentukan dengan jalan menginjeksi keyakinan kepada masyarakat pengikut untuk melakukan perang jihad melawan penguasa kafir sebagai penindas rakyat yang kapanpun tidak ingin melihat bangkitnya kehidupan keislaman. Tindakan pengorbanan paling luhur yang selalu ditiupkan untuk mewujudkan kekuatan Islam adalah menegakkan kalimat Allah dengan konsisten menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, dan berhaji bagi yang mampu. Setiap orang yang sengaja menghalangi pelaksanaan dan menegakkan ajaran keislaman dalam bentuk apapun harus dianggap sebagai tindakan kaum kafir, bahkan dapat diperangi. Keberanian yang muncul dalam menegakkan kebenaran merupakan pahlawan yang harus mendapat kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Apabila dicermati mengenai keterangan ayat A-Quran, maka tindakan perlawanan yang dilakukan sebagai usaha untuk melindungi penindasan dan penganiayaan terhadap penduduk muslim merupakan tindakan suci yang dijamin oleh Allah SWT. Dalam menjalankan perintah perang terhadap kebatilan umat Islam hendaknya harus selalu bersatu padu baik secara internal maupun secara eksternal, sebab yang demikian, Allah akan menolong perjuangan umat yang terancam aniaya. Tanpa persatuan niscaya perjuangan tidak akan sampai pada tempat tujuan.

Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103 dikemukakan tentang pentingnya persatuan. Persatuan mengandung arti yang sangat dalam untuk menegakkan perjuangan, sebab bagaimanapun tingginya nilai perjuangan yang ingin ditegakkan tanpa didasari oleh jiwa persatuan dan persaudaraan, maka hasil yang akan dicapai tidak akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam melangkah kaki kepada perjuangan yang luhur dan untuk menjauhkan diri dari nilai-nilai kebatilan, manusia senantiasa mengharapkan rahmat dan barkah dari Allah Rabbul Alamien, oleh karena betatapun manusia yakin terhadap kekuatan kemanusiaan yang ada atau kekuatan yang dimilikinya niscaya masih sangat memerlukan petunjuk dan inayah dari Allah SWT.<sup>31)</sup>

Jiwa persatuan juga dapat mengatasi kesulitan yang lebih besar terhadap serangan musuh dan berpasangan dengan itu adalah tidak terjadinya perpecahan dan sikap bercerai-berai yang dapat menghancurkan kekuatan persatuan umat. Adalah benar apabila dikatakan, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat menghancurkan kebenaran yang tidak terorganisir. Oleh karena demikian, maka kebenaran harus diorganisasi dan dipertahankan jauh lebih hebat dibandingkan kekuatan kebatilan, sebab kebatilan yang terorganisir selalu berusaha secara nyata maupun secara tersembunyi untuk menindas dan mengalahkan kebenaran.

---

<sup>31)</sup> Periksa Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103.

Dalam upaya memobilisasi gerakan pemberontakan, selain ideologi yang ditanamkan oleh para pemimpin pemberontakan, yang tidak kalah pentingnya adalah semangat persatuan yang kokoh. Jiwa persatuan itu mencakup kesamaan pendapat dan keteguhan prinsip untuk menghadapi ancaman yang tengah dihadapi. Makin besar kekuatan ancaman, makin kokoh pula persatuan dan keteguhan yang diperlukan.

Kedatangan Abdul Muis sebagai wakil ketua Central Sarekat Islam (CSI) di Tolitoli kemudian melakukan pidato pada tanggal 18 Mei 1919, telah membakar semangat massa rakyat Tolitoli untuk bersatu pada dan berpegang teguh dalam agama Allah. Muncul pula jiwa berani karena benar dan takut karena salah.<sup>32)</sup> Semangat atas dasar keagamaan yang ditekankan oleh Abdul Muis menjadi pegangan kuat bagi para pengurus dan anggota Sarekat Islam di Tolitoli untuk menegakkan kiprah perjuangan syiar Islam. Doktrin itu selanjutnya ditanamkan kepada para anggota dan simpatisan Sarekat Islam agar memiliki jiwa militan dalam mempertahankan kebenaran agama Islam.

Kobaran semangat anggota SI karena pidato Abdul Muis, tidak begitu berkembang di Kota Tolitoli karena kondisi tidak memungkinkan, akan tetapi kobaran tersebut justru menguat di Salumpaga. Ketua SI Salumpaga Maros dan Imam Haji Hayyun dengan bebas menyalakan terus semangat rakyat untuk mendukung perjuangan SI terutama dalam menghadapi penindasan kolonial.

Perlu kiranya ditegaskan, bahwa Sarekat Islam lokal di

---

<sup>32)</sup> Lihat M. Lubis (1989), *op. cit.*, hlm. 14.

Tolitoli maupun yang ada seluruh di wilayah Nusantara, bahkan Central Sarekat Islam tidak pernah melakukan pemberontakan secara langsung terhadap pemerintah Belanda, akan tetapi selalu berada di belakang dengan menanamkan ideologi perjuangan untuk menegakkan pemerintah di bawah kekuasaan kaum pribumi sendiri.<sup>39</sup> Dalam bidang ekonomi, Sarekat Islam ingin supaya kaum pribumi dapat bersaing bahkan dapat mematahkan dominasi orang-orang Cina yang mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial. Hal itu terutama ditujukan kepada para pedagang Islam yang selain diharapkan mampu bersaing dalam bidang ekonomi, melainkan juga dengan kemampuan ekonomi yang baik itu dapat mendanai perjuangan dan syiar Islam yang berpenduduk mayoritas di negeri ini. Dalam konteks seperti itu dapat dipahami bahwa Sarekat Islam dengan kehadiran tokohnya, jelas berada di belakang pemberontakan rakyat Tolitoli 1919.

Pada prinsipnya latar belakang kehidupan keagamaan yang kuat dapat mempertebal semangat pemberontakan rakyat terutama petani. Peranan Sarekat Islam dalam meningkatkan kehidupan keagamaan di Tolitoli pada tahun 1916-1920 dapat dikatakan tidak ada duanya, sebab belum ada organisasi Islam lain yang memasuki wilayah Tolitoli, sehingga masalah keagamaan, sosial, ekonomi atau perdagangan bersumber dari pengaruh dan peran Sarekat Islam setempat. Konsep ideologi keislaman dengan latar belakang Sarekat Islam merupakan pendorong utama meletusnya pemberontakan rakyat di Tolitoli pada tahun 1919.

<sup>39</sup>Periksa Ziesel dalam IG.1921, *op. cit.*, hlm. 446-448.

Unsur lain seperti pengaruh budaya seperti mistik, kekuatan-kekuatan magis, dan unsur pesaingan dalam perebutan kekuasaan pada tingkat elit (kerajaan) Tolitoli juga merupakan pemacu tambahan dalam memperkuat gelora api pemberontakan yang sudah barang tentu dilatarbelakangi oleh cita-cita untuk mengalahkan penindasan pemerintah kolonial.

#### E. Kepemimpinan

Peranan pemimpin dalam merencanakan dan mengorganisasi sebuah pemberontakan rakyat sangat dominan. Untuk membangun jiwa masyarakat petani yang pada dasarnya tidak banyak mengerti apa tujuan pemberontakan melawan pemerintah Belanda, maka peranan para pemimpin sangat penting. Bagi masyarakat petani Tolitoli yang fanatik kepada agama Islam, maka ulama, imam, dan para hujai merupakan pemimpin yang sangat berpengaruh. Berdasarkan prinsip dan keyakinan tersebut, para ulama, imam, dan hujai seakan-akan selalu terjaga dari cacat-cela yang tampak di tengah masyarakat. Meskipun mereka adalah manusia biasa seperti masyarakat pada umumnya, namun oleh karena kepercayaan yang tinggi di pundaknya, merekapun selalu menjadi contoh dan panutan yang baik.

Di Tolitoli pada masa itu, ulama adalah sekaligus sebagai umara, oleh karena selain sebagai pemimpin spiritual atau keagamaan, mereka juga adalah pemimpin masyarakat yang dipercaya secara formal mengatur dan melaksanakan tugas kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sesuai dengan

otoritas yang dimiliki oleh para pemimpin itu, loyalitas rakyat tidak dapat diragukan, sehingga dengan mudah dapat memobilisasi rakyat pengikutnya untuk tujuan-tujuan yang diinginkan. Masyarakat pengikut mempunyai komitmen total terhadap sang pemimpin, sehingga solidaritas kelompok pun tidak diragukan.<sup>34</sup> Dari solidaritas kelompok yang kuat itu persatuan dalam masyarakat sulit untuk dirongrong oleh kekuatan yang datang dari luar. Para ulama, imam, dan para hujai diyakini sebagai pewaris nabi untuk menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar disampaikan dalam setiap ceramah dan khutbah, tak luput untuk menyelipkan pesan-pesan yang mengajak umat Islam untuk memperkuat barisan gerakan pemberontakan. Mengetahui bahwa pemberontakan melawan kaum kafir merupakan jihad *fi sabilillah* sebagaimana yang telah ditanamkan oleh para pemimpin Sarekat Islam, maka masyarakat tidak gentar maju di medan pertempuran dan dalam diri mereka juga semakin radikal terhadap pencapaian masyarakat masa depan yang didambakan.

Sarekat Islam umumnya dianggap sebagai gerakan massa pertama di Indonesia, oleh karena itu para pemimpin yang menakhodai Sarekat Islam merupakan bagian dari elit Indonesia yang berpengaruh pada zamannya. Masalah-masalah mereka dan masalah-masalah organisasinya memperjelas perkembangan elit Indonesia pada permulaan abad kedua puluh.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Sartono Kartodirdjo (1984), *op. cit.*, hlm. 156.

<sup>35</sup>Mengenai pertumbuhan Sarekat Islam dan peran para elitnya yang sangat berpengaruh di Indonesia antara 1914-1920 lihat studinya Robert van Niel, *op. cit.*, hlm. 120-131.

Personifikasi kepemimpinan tokoh Sarekat Islam yang diperankan oleh Hadji Raden Umar Said Cokroaminoto sangat berpengaruh dalam membangkitkan kebesaran organisasi yang dipimpinnya. Dengan kemampuan ia berbicara yang menarik dan bersemangat, para anggota dan simpatisan semakin yakin untuk bergabung dengan Sarekat Islam sebagai penghantar ke suatu masa depan yang adil dan cerah. Ketokohan Cokroaminoto selalu dipandang sebagai perantara yang mampu menyuarakan setiap kesusahan-kesusahan yang nyata maupun yang dibayangkan. Ia juga telah dipandang oleh banyak kalangan sebagai suatu inkarnasi kebaikan dan kebahagiaan masa depan.<sup>36</sup>

Personifikasi ketokohan ketua CSI. Cokroaminoto sekaligus menjadi contoh dalam kepemimpinan Sarekat Islam lokal di seluruh Indonesia umumnya dan Tolitoli khususnya. Hal demikian menunjukkan rasa hormat dan simpati yang amat tinggi dari masyarakat terhadap kepemimpinan pengurus Sarekat Islam lokal. Contoh kepemimpinan Imam Haji Hayyun dan Maros sebagai penasehat dan pengurus Sarekat Islam Salumpaga di Tolitoli merupakan figur yang amat disegani dan dihormati oleh masyarakat Tolitoli. Otoritas kepemimpinannya bersumber pada kewibawaan sebagai kepribadian yang terbina sejak usia muda seperti ketua CSI Cokroaminoto. Kehidupan keagamaan yang kuat sangat mewarnai kehidupan kesehariannya.

Menurut Max Weber ada tiga legitimasi kepemimpinan yang utama. Pertama, kewibawaan hari kemarin yang kekal yaitu adat

---

<sup>36</sup>Robert van Niel, *ibid.*, hlm. 131.

istiadat yang disucikan melalui pengakuan kuno yang tidak bisa digambarkan dengan orientasi kebiasaan untuk melakukan penyesuaian diri. Tipe pertama di atas disebut dominasi tradisional. Kedua, kewibawaan dengan keanggunan pribadi yang luar biasa, dan ketaatan yang mutlak serta kepercayaan terhadap wahyu, kepahlawanan, atau kualitas lainnya dari kepemimpinan individual. Tipe seperti ini dikenal dengan dominasi kharismatik. Ketiga, ialah ketaatan dan kepercayaan terhadap validitas undang-undang dan kompetisi fungsional yang dilandasi oleh peraturan-peraturan yang dibuat secara rasional.<sup>37)</sup>

Dari ketiga tipe kepemimpinan berdasarkan teori Weber itu maka tipe yang dimiliki oleh para pemimpin Sarekat Islam adalah tipe kedua yaitu tipe kepemimpinan kharismatik. Tipe ini menunjukkan seseorang memiliki wibawa pribadi yang luar biasa terhadap masyarakatnya. Segala tindakan dan kebijakannya selalu merujuk kepada wahyu Al-Quran yang dikemas dalam penampilan diri yang sesuai dengan jiwa Al-Quran itu sendiri. Pada tingkat elit lokal, hal itu juga menjadi pola yang dikembangkan untuk membentuk dan mengembangkan kepemimpinan yang disenangi bahkan dipuja oleh masyarakat pendukungnya.

Ketika organisasi-organisasi Islam lain belum masuk di Tolitoli, bahkan di Sulawesi Tengah, Sarekat Islam telah berkiprah lebih jauh ke dalam kehidupan masyarakat Islam setempat dengan berbagai alternatif yang ditawarkannya. Para elit sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab ini sebelumnya

<sup>37)</sup> Max Weber dalam studinya Michael Rush & Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik. Terjemahan Kartini Kartono (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hlm. 9.

menjadi idola dan panutan bagi seluruh masyarakat baik yang dekat maupun yang mengenal dari jauh. Sebagai elit strategis pada zamannya, para pemimin Sarekat Islam dengan begitu mudah dapat memasukkan ide-ide *ijihad fie sabilillah* kepada masyarakat pengikutnya. Untuk mencapai tujuan masa depan yang dicita-citakan itu masyarakat dengan sendirinya siap berkorban untuk menghadapi perjuangan berdasar pada sebuah keyakinan, bahwa sesuatu yang dicita-citakan pasti terwujud apabila diupayakan dengan sungguh-sungguh dan atas petolongan Allah.

Di bawah pimpinan ulama dan imam, pemberontakan bukanlah sekedar menyabung nyawa dalam membela negeri, melainkan juga sebagai tindakan yang secara spritual amat bermakna. Maka perangpun disakralkan, dipersuci. Kalau telah begini, mati tidaklah berakhirnya kehidupan tertapi bermulanya kehidupan yang semurninya dan seabadinya yang menjanjikan kebahagiaan tanpa henti.<sup>90)</sup>

Pola yang digunakan untuk membangkitkan kesadaran berbangsa dan bermasyarakat serta menjadikan Islam sebagai simbol nasional tidak saja ditumbuh-kembangkan di Jawa, tetapi juga di seluruh wilayah nusantara. Kasus Tolitoli merupakan sebuah contoh bagaimana rakyat setempat dibangkitkan kesadarannya kepada cita-cita untuk turut membangun bangsa dan masyarakat berdasarkan ideologi Islam.

Upaya-upaya yang dilakukan di tingkat lokal pada prinsip-

<sup>90)</sup> Untuk memperbandingkan dengan perang rakyat yang terlama dalam sejarah Indonesia atau yang disebut juga dengan perang di Jalan Allah, periksa studi yang dilakukan T. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah* (Jakarta : Sinar Harapan, 1987), hlm. 5-10.

nya merupakan cermin kepemimpinan kharismatik dari pimpinan puncak Central Sarekat Islam Cokroaminoto yang kemudian diteruskan dan dijadikan tradisi atau warisan bagi para pemimpin Sarekat Islam lokal Tolitoli. Para pemimpin Sarekat Islam lokal setelah mendapatkan inspirasi dari pimpinan puncak CSI segera menyebarkan ideologisasi itu kepada masyarakat melalui media pertemuan dalam institusi keagamaan, seperti Shalat Jum'at, hari-hari besar keislaman, pengajian akbar, dan sebagainya. Bahkan di bawah pimpinan ulama dan para imam, ideologisasi pemberontakan ditanamkan. Dalam proses ideologisasi perang atau pemberontakan yang dirintis di saat yang keras dan ketika kepastian hidup dunia merupakan ilusi, tradisi baru dari makna khas keislaman dibina pula.<sup>39)</sup>

Kepemimpinan dan kepribadian tokoh utama CSI tak pelak lagi telah menjadi pola dalam kepemimpinan dan kepribadian para tokoh Sarekat Islam lokal di Tolitoli. Masyarakat pun dibina dan diarahkan menurut dan sesuai dengan pola pembinaan dan pengarahan dari CSI. Itulah sebabnya maka kepemimpinan kharismatik yang terutama dimiliki oleh Cokroaminoto dan Abdul Huis, juga pendorong bagi kepemimpinan Sarekat Islam lokal. Anggota Sarekat Islam dan masyarakat Tolitoli pada umumnya sangat teringat dengan patronize yang dipelihara dan dikembangkan di dalam organisasi Sarekat Islam.

---

<sup>39)</sup> Tentang ikhtiar para ulama sebagai pemuka dalam Perang Aceh, periksa T. Ibrahim Alfian (1987), *ibid.*, hlm. 10.

## BAB V

### PENUMPASAN PEMBERONTAKAN DAN AKIBAT-AKIBATNYA

Setelah peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli tersebar luas di seluruh wilayah Hindia Belanda, baik melalui berita telegram, maupun yang dimuat oleh surat-surat kabar yang terbit pada saat itu, maka dimulailah kewaspadaan rakyat Salumpaga dan sekitarnya. Kewaspadaan tersebut sangat bersalasan, oleh karena pemerintah kolonial telah siap menumpas gerakan pemberontakan tersebut. Sebagai tindakan siaga terhadap pembalasan pemerintah kolonial, para pemberontak memobilisasi kekuatan rakyat Salumpaga dan rakyat dari kampung-kampung yang berada di wilayah Tolitoli Utara. Kesiagaan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan kekuatan rakyat supaya bersiap menghadapi kemungkinan penyerangan penumpasan dari pihak tentara Belanda.<sup>1)</sup>

Iman Haji Hayyun memimpin para anggotanya untuk menghimpun kekuatan baik yang berasal dari kampung Salumpaga, maupun dari kampung-kampung di sekitarnya, yaitu dari kampung Galumpang, Kapas, Lingadan, Santigi, dan Laulalang.<sup>2)</sup> Penghimpunan jumlah kekuatan anggota yang lebih banyak tersebut dilakukan sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan menghadapi serangan pasukan Belanda. Kaum pemberontak yang dihimpun,

<sup>1)</sup> Surat Kabar Pangkal Kemadjoean (PK), 15 Juli 1919.

<sup>2)</sup> Tjoek Soedarmadji (1983), hlm., 79.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

126

semuanya dilengkapi dengan senjata tradisional sebagai tanda keberanian menghadapi serbuan pasukan pemerintah kolonial.

Peristiwa pemberontakan yang berlangsung di Salumpaga, sebuah kampung di Tolitoli pada tahun 1919 telah menimbulkan berbagai akibat pada berbagai pihak. Berbagai pihak tersebut meliputi, para pemimpin pemberontakan, masyarakat pengikut, kehidupan politik di Tolitoli, dan sikap serta kebijakan politik pemerintah kolonial terhadap seluruh wilayah Afdeling Sulawesi Tengah.

Setelah Marsaoleh (kepala distrik) Tolitoli Utara Haji Muhammad Saleh yang lolos dari percobaan maut ketika terjadinya pemberontakan berdarah tersebut, langsung kembali ke Tolitoli. Setelah Haji Muhammad Saleh sampai di Tolitoli menjelaskan masalahnya, Raja Muda Tolitoli Tagelan berangkat ke Donggala untuk melapor dan meminta bantuan kepada Asisten Residen Donggala dan Residen Manado. Asisten Residen Donggala setelah mendapat bala bantuan Karesidenan Manado kemudian dengan secepatnya mengutus pasukan militer bersama Raja Bawana Lamarauna dengan petunjuk jalan Raja Muda Tolitoli segera menuju Tolitoli dengan kapal Janzen. Setelah singgah beberapa saat di Tolitoli, perjalanan diteruskan menuju Salumpaga sebagai upaya memberantas gerakan pemberontakan di pusat kejadiannya. Meskipun aksi perlawanan rakyat terus dilakukan, namun dalam waktu singkat dapat dipatahkan oleh pasukan pemerintah dan para pemberontak dapat ditangkap dan kemudian dapat diadili sesuai dengan beratnya perbuatan mereka masing-

masing.<sup>3)</sup>

Pemberantasan pemberontakan Tolitoli dimulai dengan kedatangan 2 infanteri serdadu Belanda pada tanggal 13 Juni 1919 yang diturunkan dari sebuah kapal pada jam 05.00 pagi. Pada saat itu para pemberontak setelah melakukan shalat subuh, siap untuk melakukan perlawanan dengan berbagai macam senjata tradisional. Para pemberontak yang berasal dari Salumpaga, Galumpang, Kapas, Lingadan, Santigi, dan Laulalang tengah bersiaga menghadapi pasukan Belanda di pinggir pantai. Sementara kaum wanita dan anak-anak disingkirkan ke tempat-tempat yang cukup jauh yaitu di atas gunung di sebelah utara Salumpaga. Dari jarak yang masih jauh, sebagian penduduk Salumpaga mengira bahwa kapal Janzen adalah kapal dagang yang bermaksud mengangkut rotan yang ada di Salumpaga dan bukan membawa serdadu atau pasukan tentara Belanda. Namun setelah yang turun merupakan 2 infanteri serdadu Belanda barulah para pemberontak yakin bahwa saat-saat yang diperkirakan sebelumnya, menjadi kenyataan.<sup>4)</sup>

Tiba-tiba turun mendahului 2 infanteri serdadu Belanda adalah Raja Muda Tolitoli Tagelan Muhammad. Begitu menyaksikan Raja Muda Tolitoli yang turun dari kapal, para penduduk merasa heran dan tidak bereaksi sama sekali. Setelah mendekat dengan penduduk Salumpaga yang tengah bersiaga menghadapi Belanda itu, Raja Muda Tolitoli Tagelan meminta kepada

---

<sup>3)</sup> Surat Kabar *De Locomotief*, 10 Juni 1919.

<sup>4)</sup> *Soerabajasch Handelsblad* (SH), 20 Juni 1919.

seluruh penduduk untuk menanggalkan senjata mereka masing-masing kemudian duduk dengan tenang untuk mengadakan perundingan. Ketika penduduk sedang duduk tenang, Raja Muda mengibarkan bendera putih, dan seketika itu pula para serdadu Belanda langsung mengepung penduduk sebagai pelaku pemberontak, sehingga tidak dapat melakukan apa-apa. Para pemimpin pemberontakan seperti Imam Haji Hayyun, Maros, Kampaeng, Otto, Kombong, dan Hasan langsung ditangkap dan diikat tangannya. Sementara seluruh anggota pengikut digiring ke gedung sekolah untuk diinterogasi satu persatu. Setelah para pemberontak dikumpulkan digedung sekolah, datanglah Asisten Residen Donggala dan Raja Banawa Lamarauna untuk menanyakan dan melacak latar belakang terjadinya peristiwa pemberontakan rakyat pada bulan Juni 1919.<sup>5)</sup>

Untuk mengusut dan melacak peristiwa itu Asisten Residen Donggala menanyakan kepada para pelaku pemberontakan, siapa otak pembunuhan terhadap Kontrolir J.P. de Kat Angelino dan para pegawai pemerintah serta di mana mayat mereka dikuburkan. Mereka menjawab, bahwa pimpinan kami adalah Imam Haji Hayyun dan Otto adalah pembunuh Tuan Kontrolir J.P. de Kat Angelino, sedangkan yang memimpin dan menentukan pelaksanaan penguburannya adalah Indala seorang khatib Salumpaga yang turut serta sebagai anggota dalam pemberontakan. Indala pulalah yang mengetahui dan dapat menunjukkan lokasi penguburan Kontrolir

---

<sup>5)</sup> Hasan Tawil, *op. cit.*, hlm. 7-8.

Angelino, 5 orang polisi, dan 2 pegawai pegawai pajak.<sup>6)</sup> Sementara Raja Mogi Haji Ali dan seorang Opas dikuburkan di Nalu. Mendengar jawaban demikian, Asisten Residen Donggala langsung memerintahkan Khatib Indala untuk menunjuk yang ikut menguburkan Kontrolir Angelino dan lain-lain, dan memimpin temannya itu untuk menggali kembali mayat Kontrolir Angelino. Setelah digali, mayat itu diperiksa untuk mengetahui pada bagian mana kerusakan utama penyebab kematiannya setelah itu dikuburkan kembali di tempat yang lebih baik. Akan tetapi seminggu sesudah itu datanglah saudara dari almarhum Kontrolir Angelino menugaskan kembali warga Salumpaga untuk menggali mayat tersebut untuk dibawa ke Batavia kemudian diteruskan ke negeri Belanda dan dikuburkan di sana.<sup>7)</sup> Pada bekas tempat kuburan J.P. de Kat Angelino itulah sekarang telah dibangun sebuah tugu *tanda peringatan* atas meninggalnya seorang kontrolir yang sedang menjalankan tugas. Bangunan setinggi 4 meter dan lebar 1 meter tegak berdiri tepat di atas kuburan J.P. de Kat Angelino. Pembangunan tugu sebagai tanda peringatan itu dilakukan setelah 6 bulan meninggalnya almarhum Angelino.<sup>8)</sup> Tugu peringatan itu sangat monumental bagi rakyat Sulawesi Tengah sebagai bukti sejarah untuk mengenang gerakan pemberontakan sebagai bentuk perjuangan rakyat

---

<sup>6)</sup> SH, 1919, *op. cit.*

<sup>7)</sup> Pangkal Kemadisoan (PK) 15 Juni 1919, *op. cit.*

<sup>8)</sup> *Ibid.*

Indonesia. Tugu peringatan tersebut juga sangat berguna sebagai bukti sejarah bagi para peneliti khususnya generasi muda dan mahasiswa di Daerah Sulawesi Tengah (lihat lampiran).

Selain tugu peringatan wafatnya Kontrolir J.P. de Kat Angelino, ada satu lagi bangunan semacam satu kuburan yang dibangun bersamaan dengan tugu peringatan tersebut, namun bentuknya lebih sederhana dan layaknya seperti kuburan satu orang saja. Padahal di situ ditulis nama lima orang anggota polisi bersenjata Belanda. Untuk keterangan nama kelima anggota polisi yang dikuburkan di Salumpaga itu dapat dilihat dalam lampiran tesis ini.

Tulisan atau prasasti yang tertera pada dinding kuburan itu merupakan bukti yang amat berguna untuk meningkatkan patriotisme generasi muda bangsa Indonesia. Sudah barang tentu sebagai bahan perbandingan, bahwa nenek moyang kita dahulu telah mampu melakukan yang terbaik untuk bangsanya.

#### A. Kaum Pemberontak diganjar Hukuman

Setelah pemerintah Belanda mampu melakukan pemberantasan terhadap rencana kelanjutan pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 maka terdapat beberapa akibat yang diderita oleh rakyat Tolitoli terutama para pelaku pemberontakan berupa kerja paksa, hukuman penjara, dan hukuman mati melalui tiang gantungan.

Para pemberontak yang terutama terdiri dari bekas pekerja wajib yang melarikan diri itu dihukum dengan kerja paksa pada bulan Puasa yaitu membuat jembatan sepanjang 400 meter, tinggi

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

131

4 meter, dan lebar 4 meter yang terletak pinggir pantai kampung Malosong.<sup>9)</sup> Para pekerja paksa harus membawa makanan sendiri selama kerja paksa berlangsung. Tindakan balasan dari pemerintah itu sangat memberatkan rakyat, apalagi dalam bulan Puasa. Setelah bulan Puasa berakhir pekerjaan tersebut dilanjutkan hingga selesai dan dikerjakan dalam waktu lebih kurang 3 bulan.<sup>10)</sup> Setelah hukuman kerja paksa dengan membuat jembatan di Malosong selesai, 29 orang terdakwa itu dibawa ke Makassar untuk ditahan dan diadili sesuai ketentuan hukum.

Setelah melalui proses penyidikan sesuai prosedur hukum yang ditegakkan oleh pemerintah kolonial mulai dari tahun 1919 sampai dengan tahun 1921, maka tersangka utama pelaku pemberontakan disidangkan oleh Landraad Makassar. Hasil keputusan sidang berakhir pada tahun 1921. Dari 29 orang tersangka utama pelaku pemberontakan, 25 orang di antaranya diputuskan hukuman penjara, sementara 4 orang lainnya diputuskan hukuman mati melalui tiang gantungan.

Untuk memudahkan perincian jumlah terhukum penjara akibat peristiwa pemberontak Tolitoli 1919, di bawah ini disusun berdasarkan nomor urut, nama, umur, pekerjaan, dan hukuman yang diterima oleh masing-masing terdakwa pelaku pemberontakan sebagaimana yang tertera dalam tabel pada halaman berikut.

---

<sup>9)</sup>Periksa Hasan Tawil, *op. cit.*, hlm. 8.

<sup>10)</sup>  
*Ibid.*

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

132

Tabel 3 : Daftar Keputusan Hakim Landraad Makassar 1921  
Tentang Hukuman Penjara bagi Para Pemberontak

No	N a m a	U m u r	Pekerjaan	Hukuman
1	Kampaeng	49 Tahun	Petani	20 tahun
2	Maros	45 Tahun	Pedagang	20 "
3	Murid	50 Tahun	Petani	20 "
4	Abdul Muthalib	52 Tahun	Petani	9 "
5	Abdul Karim	54 Tahun	Kep.Kampung /Petani	9 "
6	Jali	32 Tahun	Petani	15 "
7	Yube	35 Tahun	Petani	8 "
8	Suaebun	37 Tahun	Petani	5 "
9	Lanjogau	43 Tahun	Petani	7 "
10	Lagesa	44 Tahun	Petani	5 "
11	Halika	50 Tahun	Petani	4 "
12	Indala	49 Tahun	Petani	9 "
13	Lamesang	45 Tahun	Petani	2 "
14	Intio	31 Tahun	Petani	6 "
15	Lamara	35 Tahun	Petani	5 "
16	Kansi	38 Tahun	Petani	7 "
17	Sikuru	47 Tahun	Petani	8 "
18	Rabil	50 Tahun	Petani	9 "
19	Tanaa'	42 Tahun	Petani	7 "
20	D u n	25 Tahun	Petani	6 "
21	Labatju	32 Tahun	Petnai	6 "
22	Hamesa	45 Tahun	Petani	5 "
23	Lahuseng	44 Tahun	Petani	5 "
24	Halal	41 Tahun	Petani	5 "
25	Haji Hayyun	60 Tahun	Petani/Imam	Seumur hidup.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

133

Selain dijatuhi hukuman penjara, Landraad Makassar pada tahun 1921 juga memutus dan menetapkan hukuman mati di Tiang Gantungan kepada masing-masing :

1. Kombong (43 Tahun)
2. Otto (45 Tahun)
3. Hasan (40 Tahun)
4. Zakariah ( 47 Tahun) <sup>11)</sup>

Keempat orang itu adalah anggota SI Tolitoli dan dinyatakan bersalah dan terbukti dengan sah serta bertanggung jawab atas terbunuhnya Kontrolir Angelino, Raja Mogi Haji Ali, lima orang polisi, Jaksa Singko, petugas penagih pajak Suatan, dan Opas Samaila dalam peristiwa pemberontakan 5 Juni 1919.

Keputusan Landraad Makassar itu kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal D. Fock pada tahun 1922. Keputusan hukuman gantung bagi Kombong, Otto, dan Hasan dieksekusi pada tanggal 27 September 1922 di Rumah Tahanan Menado, sementara Zakariah terlebih dahulu dilakukan sebelumnya di Rumah Tahanan Makassar pada akhir tahun 1921. <sup>12)</sup>

Setelah para pelaku utama pemberontakan mendapat sanksi hukuman yang selanjutnya dieksekusi berdasarkan ketetapan Landraad Makasaar, maka berakhirilah semua rangkaian pemberontakan rakyat Tolitoli terhadap penetrasi pemerintah kolonial di wilayah Tolitoli. Kegiatan organisasi Sarekat Islam yang

---

<sup>11)</sup> Laporan Ziesel dalam IG (1921), *op. cit.* Lihat juga Surat Kabar *Diawa Tengah*, 29 Desember 1919, hlm. 1.

<sup>12)</sup> M. Lubis (1969), *op. cit.*, hlm. 5.

dianggap sebagai penyebab meletusnya pemberontakan rakyat Tolitoli kemudian di larang dan dibekukan di seluruh wilayah Sulawesi Utara dan Tengah.

#### D. Penggantian Pimpinan di Tolitoli

##### 1. Pengangkatan Kontrolir Baru

Setelah terjadinya pemberontakan berdarah di Tolitoli pada bulan Juni 1919 yang turut menewaskan Kontrolir Johannes Petrus de Kat Angelino, kepemimpinan pemerintah kolonial di Tolitoli menjadi kosong. Untuk mengisi dan melanjutkan kepemimpinan yang ada, dilakukan penggantian dan pengangkatan seorang kontrolir baru. Kontrolir baru tersebut adalah Hoerklotz. Kontrolir Hoerklotz diangkat pada bulan September 1919 sesuai dengan laporan Residen Manado, Logeman pada bulan September 1919.<sup>13)</sup>

Selama kepemimpinan Kontrolir Hoerkloz, pelaksanaan kerja wajib tidak dijalankan untuk menghindari kemungkinan terulangnya peristiwa tragis yang turut menewaskan Kontrolir J.P. de Kat Angelino. Akan tetapi pengawasan terhadap aktivitas kehidupan sosial politik semakin diperketat sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan di wilayah Karesidenan Manado.<sup>14)</sup>

---

<sup>13)</sup> Besluit nomor 63 (1919), *op. cit.*

<sup>14)</sup> Memori van Overgave (MVO) Residen Logeman tahun 1919 dan MVO 1922.

Setelah pemberontakan rakyat Tolitoli dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial, situasi dan kebijakan politik pemerintah kolonial di Tolitoli dan seluruh wilayah Sulawesi Utara dan Tengah mengalami perubahan. Pejabat-pejabat tradisional yang dianggap terlibat secara langsung atau tak langsung dalam peristiwa pemberontakan pada bulan Juni 1919 dipecat atau disingkirkan dari posisi tradisional yang mereka tempati sebelumnya. Sebahagian dinyatakan terlibat dan sebahagian yang lain ikut menghasut rakyat supaya turut dalam pemberontakan berdarah pada bulan Juni 1919.

## 2. Pengangkatan Raja Tolitoli

Sebagaimana diketahui, bahwa pemberontakan rakyat Tolitoli berlangsung selama 8 hari, yaitu dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 13 Juni 1919. Pemberontakan tersebut berakhir setelah ditumpas pemerintah pada tanggal 14 Juni 1919. Selama pemberontakan berlangsung, keadaan pemerintahan kolonial dan pemerintahan tradisional Tolitoli berada dalam keadaan fakum disebabkan tewasnya Kontrolir Angelino dan Raja Tolitoli Mogi Haji Ali.

Perubahan kebijakan politik di Tolitoli dimulai dengan dikeluarkannya Besluit permohonan Residen Manado kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 14 Agustus 1919 nomor 366 dan surat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri 2 Desember 1919 nomor 1419/Btg. Berdasarkan kedua surat di atas, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan Besluit nomor 63 yang me-

netapkan 2 isi keputusan. Pertama, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 1919 pasal 2 dari Besluit tanggal 7 Mei 1919 nomor 46 ditarik dan menetapkan, bahwa pemerintahan atas Daerah Tolitoli untuk sementara dijalankan oleh dewan bangsawan. Kedua, memberi wewenang kepada Residen Menado untuk mengeluarkan Plakat Pendek kemudian melantik dan menyumpah Yale Haji Muhammad Saleh sebagai Raja Tolitoli menggantikan almarhum Mogi Haji Ali yang tewas dalam peristiwa pemberontakan 5 Juni 1919.<sup>15)</sup> Dalam Besluit tersebut juga ditegaskan mengenai Surat Keputusan Pemerintah tanggal 7 Mei nomor 46, bahwa sejak tanggal 25 Januari 1918 pemerintahan atas Daerah Tolitoli Afdeling Sulawesi Tengah untuk sementara waktu dilaksanakan oleh dewan bangsawan yang terdiri atas orang-orang yang diangkat oleh Residen Menado.

Dalam Besluit nomor 27 tanggal 25 Januari 1918, telah ditunjuk anggota dewan bangsawan sebagai berikut : pertama, Mogi Haji Ali, putera tertua dari Haji Ismail, penguasa terakhir daerah Tolitoli, kedua, I. Boeseona, bekas Jogugu Tolitoli, dan ketiga, Mohammad Siradjoeddin, bekas Syahbandar ToliTolitoli.

Kedua orang yang disebutkan terakhir itu merupakan anggota kehormatan sesuai bunyi laporan rahasia dari kontrolir Tolitolinomor 16 pada tanggal 1 Juni 1919. Dalam isi laporan rahasia kontrolir menyebutkan, bahwa I. Boesoena dan Muhammad Siradjoeddin tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai isi

---

<sup>15)</sup> Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 63 tanggal 13 Desember 1919, koleksi ANRI nomor 2951/19.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

137

Besluit nomor 27 pada tanggal 25 Januari 1918. Ketidakmampuan keduanya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan administrasi pemerintahan, padahal mereka tetap mendapat gaji dari pemerintah. Menurut Kontrolir J.P. de Kat Angelino, bahwa Mogi Haji sangat tepat untuk menjadi Raja Tolitoli menggantikan ayahnya Haji Ismail, karena dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas. Pendapat Kontrolir Angelino tersebut bertentangan dengan pikiran Haji Ismail ayah kandung Mogi Haji Ali. Haji Ismail dan sebahagian besar keluarga kerajaan justeru menghendaki Tagelan Muhammad untuk diangkat menjadi raja. Sementara Tegelan sendiri tidak terlalu berambisi untuk menduduki jabatan sebagai Raja Tolitoli.

Akhirnya Angelino tetap pada prinsipnya untuk menunjuk Mogi Haji Ali yang dianggap rajin dan terampil melaksanakan tugas sebagai raja. Mogi Haji Ali ketika itu juga adalah ketua SI Daerah Tolitoli yang terlebih dahulu menyatakan diri sebagai putra mahkota sekaligus sebagai calon pengganti ayahnya. Gambaran situasi di sekitar Kerajaan Tolitoli menunjukkan ketegangan akibat terpilihnya Mogi Haji Ali yang justeru tidak diinginkan oleh sebahagian besar dari keluarga kerajaan.

Setelah Mogi Haji Ali meninggal dunia dalam peristiwa pemberontakan 5 Juni 1919, maka orang yang terpilih dan mendapat kepercayaan untuk menggantikannya sebagai raja adalah Muhammad Saleh Bantilan. Muhammad Saleh adalah anggota rombongan yang lolos dalam percobaan pembunuhan kaum pemberontak. Setelah selamat, Muhammad Saleh terpilih menjadi

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

138

raja. Sementara Tagelan sebagai raja muda untuk kedua kalinya tidak terpilih menjadi Raja Tolitoli menggantikan Mogi Haji Ali.

Dengan pengangkatan Yale Haji Muhammad Saleh sebagai Raja Tolitoli, situasi yang tidak tenteram dapat dipulihkan kembali seperti sebelumnya. Pada masa awal kepemimpinan Yale, pelaksanaan kerja wajib tidak dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk mewaspadaai terjadinya kembali pemberontakan rakyat. Pengawasan terhadap wilayah Tolitoli untuk sementara, langsung di bawah Asisten Residen Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Donggala. Pengawasan yang ketat atas wilayah Tolitoli juga berkenaan dengan masih tetap adanya organisasi Sarekat Islam yang dituduh sebagai penyebab terjadinya pemberontakan rakyat Tolitoli. Sebagai pelaksanaan pengawasan yang ketat selanjutnya pemerintah kolonial Belanda membubarkan organisasi Sarekat Islam di wilayah Tolitoli.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

## BAB VI KESIMPULAN

Di dalam bab-bab terdahulu telah diungkapkan tentang latar belakang dan tahap-tahap terjadinya pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919 dan akibat-akibatnya di kemudian hari. Ungkapan penjelasan itu menunjukkan bahwa, ditilik dari satu gerakan sosial, pemberontakan rakyat Tolitoli disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu saling berhubungan dan akhirnya mendukung ke arah terjadinya peristiwa pemberontakan sebagai puncak dari gejala yang bersumber dari berbagai faktor tersebut. Pemberontakan berakar pada perubahan dan perkembangan institusi sosial, politik, agama, dan ekonomi. Tidak dapat dikatakan, bahwa ada satu faktor yang lebih dominan sebagai sumber menentukan terjadinya pemberontakan dibandingkan dengan faktor lainnya, melainkan berbagai ragam faktor itu justru saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Pemberontakan rakyat Tolitoli pada masa pemerintahan kolonial terjadi ketika masyarakat sedang dihadapkan dengan berbagai perubahan. Ragam pembaharuan sebagai jiwa perubahan itu pada awalnya dikembangkan dalam kehidupan masyarakat yang masih tradisional, namun mau tidak mau pembaharuan itu telah dengan pelan-pelan dapat mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat kepada satu perubahan. Meskipun pada awalnya masyarakat menolak semua bentuk pembaharuan yang ditawarkan dengan alasan dapat merusak tatanan masyarakat yang telah berada dalam satu tradisi turun temurun, akan tetapi hal itu

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

140

tidak dapat bertahan lama. Tindakan penolakan terhadap upaya pembaharuan yang bertentangan dengan adat-istiadat, agama, dan sosial itulah yang menyebabkan terjadinya gerakan protes yang bertujuan mempertahankan tatanan masyarakat yang telah ada.

Pemberontakan rakyat Tolitoli merupakan gerakan radikal akibat kemarahan yang memuncak dari penduduk yang ingin merasa bebas dan merdeka dari tindakan biadab pemerintah kolonial yang selalu ingin menindas rakyat pribumi serta selalu berusaha mencari keuntungan dan tanpa mengindahkan nilai moral dan kemanusiaan yang telah terpelihara dalam masyarakat.

Apabila pada masa kekuasaan kerajaan Tolitoli, penduduk diwajibkan kerja bakti, pembayaran pajak, dan upeti sebagai tanda pengabdian dan rasa tunduk kepada raja, maka pada masa kolonial wajib kerja bakti diganti dengan kerja wajib dengan cara paksa dan pungutan pajak juga dilaksanakan dengan lebih ketat dan tanpa ada keringanan. Pada masa kekuasaan kerajaan rakyat sudah barang tentu tidak dapat menikmati kehidupan yang layak, oleh karena selain berusaha bekerja di sawah dan di kebun untuk memenuhi kebutuhan primer, tetapi juga diharuskan memenuhi kewajiban sebagai rakyat biasa yang berada di bawah kekuasaan raja. Ketika masa kolonial masuk dan berkuasa di di wilayah Tolitoli, aturan berikut kewajiban penduduk yang telah ditetapkan oleh raja diubah dan dimodernisasi sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial untuk dan atas nama kepentingan rakyat. Akan tetapi perubahan dari kekuasaan tradisional Kerajaan Tolitoli menjadi sistem kekuasaan modern

pemerintahan Eropa dalam hal ini pemerintah Belanda, tidak menjadikan perubahan penderitaan rakyat pedesaan dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Bahkan justru dengan berubahnya sistem wajib kerja bakti dan pembayaran pajak menjadi heerendiensten dan belasting sesuai konsep pemerintah Belanda, penderitaan rakyat akibat penindasan dan pemaksaan dalam berbagai kewajiban semakin kompleks.

Masuknya jaringan perubahan yang semula diharapkan dapat mengubah kemiskinan akibat keterbelakangan di wilayah pedesaan menjadikan kemampuan beradaptasi dengan perubahan tersebut, namun apa yang diharapkan ternyata justru melestarikan penderitaan yang telah ada menjadi bentuk penindasan dan pemiskinan yang terstruktur dan terencana. Selain itu respon masyarakat terhadap perubahan itu sudah barang tentu sesuai dan berdasarkan struktur, aspirasi, sikap, dan simbol tradisi yang telah terpelihara sejak masyarakat Tolitoli mulai mendiami dan hidup di daerahnya. Seperti juga masyarakat lain pada umumnya akan menolak semua sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan kultur dan kepribadian yang ada sebelumnya, meskipun arus modernisasi sebagai pendatang akhirnya yang keluar menjadi pemenang. Akan tetapi janji perubahan itu tidak dapat memberikan nilai tambah dan keuntungan atau bahkan merugikan, maka masyarakat yang sebelumnya memiliki kepribadian penurut dan selalu menerima apa adanya akan berubah menjadi sebuah kekuatan penggerak untuk melakukan pemberontakan.

Apabila dilihat dari perubahan beban petani dari

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

142

kewajiban mengabdikan kepada Raja Tolitoli selanjutnya kewajiban mengerahkan tenaga kerja untuk pemerintah kolonial, keduanya tidaklah berbeda kecuali simbol dan cara. Akan tetapi yang berbeda adalah kepada siapa kewajiban dan pengabdian itu ditujukan. Oleh karena itu perbedaan agama, suku, etnis, sosial, budaya, dan politik menjadi sumbu kebencian menuju tindakan protes petani terhadap penetrasi kolonial di Tolitoli.

Untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919, peristiwa itu selain ditempatkan dalam konteks sosial, politik, ekonomi, agama, dan budaya, maka faktor kondisional yang melatarbelakanginya juga merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya.

Dalam bidang politik terjadi berbagai perubahan seperti masuknya sistem pemerintahan modern yang bercorak liberalistik yang tentu saja masih sangat asing bagi masyarakat Tolitoli. Keterasingan itu disebabkan oleh karena belum terjadinya kontak atau hubungan keluar dengan budaya lain yang telah lebih maju dan telah mengenal terlebih dahulu unsur liberal. Sementara intervensi asing terhadap pengaturan dan perubahan kekuasaan tradisional pada pemerintahan kerajaan Tolitoli juga merupakan unsur lain yang sebahagian besar belum mampu diterima masyarakat. Dalam hal ini penggantian Raja Tolitoli yang sebelumnya berjalan sesuai dengan ketentuan tradisional kemudian mengalami perubahan dengan keharusan mendapat persetujuan pemerintah kolonial Belanda.

Dalam bidang ekonomi terjadi pula berbagai perubahan penting dengan masuknya anasir-anasir ekonomi modern yang menyingkirkan sistem ekonomi masyarakat pedesaan yang berdasarkan dan bercirikan ekonomi agraris. Munculnya peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk membayar berbagai macam pajak, penetapan kerja wajib yang sangat memberatkan masyarakat. Penerapan kerja wajib kerap kali bertentangan dengan peraturan kerja wajib yang telah ditetapkan sendiri oleh pemerintah kolonial menyebabkan timbulnya tindakan protes dan selanjutnya merupakan pemicu bagi munculnya gerakan sosial dalam bentuk pemberontakan rakyat. Pelaksanaan kerja wajib sebagai biang utama gerakan pemberontakan rakyat Tolitoli di samping memberatkan penduduk secara fisik, juga tidak dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat anggota penduduk untuk memusatkan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan pokok hidup dalam bidang pertanian umumnya. Hal itu berarti pemerintah secara sadar atau tidak, telah merestui penduduk berada dalam keadaan kemiskinan, kekurangan pangan, dan keterbatasan pada kebutuhan lainnya.

Di bidang agama sangat disadari bahwa pemerintah kolonial Belanda sebagai "kafir" mengalami kesulitan berhadapan atau hidup berdampingan dengan penduduk yang beragama Islam. Perbedaan itu mempersulit jalannya komunikasi dan informasi yang diperlukan sehari-hari. Seperti telah dapat diketahui, bahwa perbedaan agama menyebabkan perbedaan prinsip, tujuan, dan karakteristik. Dari perbedaan itu makin lama semakin sulit disembunyikan, bahkan tidak jarang terjadi tindakan diskrimi-

nasi dan gangguan terhadap kegiatan keagamaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi, tetapi setelah masuknya imperisisme dan kolonialisme Belanda hal itu menjadi sering terjadi. Munculnya kejadian seperti itu justru menjadi permasalahan yang sulit ditemukan jalan keluarnya, sebab masing-masing pihak saling mempertahankan diri dan menganggap dirinya yang lebih benar.

Di bidang budaya atau adat-istiadat telah terjadi asimilasi dan akulturasi budaya karena telah terbukanya pintu masuk dan keluar terhadap komunikasi dan informasi dari luar dan dari dalam. Setiap perubahan sudah pasti menimbulkan benturan baik yang keras maupun yang lemah. Benturan itu memberikan implikasi terhadap perubahan pola budaya yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal adat-istiadat misalnya masyarakat Tolitoli yang sekian lama hidup dan berkembang biak dengan adat-istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka setelah masuk budaya asing pada akhirnya harus menerima kenyataan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan keadaan dan zaman yang sedang berjalan. Dalam proses penyesuaian diri itulah terjadi goncangan yang mengakibatkan disintegrasi antara unsur tradisi dengan unsur asing yang lebih modern. Dengan demikian masyarakat Tolitoli menjadi terasing dari kampung halamannya sendiri oleh karena derasnya pengaruh luar yang masuk. Pengaruh luar dengan demikian membuat masyarakat merasa terisolasi karena mereka tidak mempunyai kebebasan lagi untuk melaksanakan dan mempertahankan warisan budayanya. Untuk melaksanakan tradisi sebagai warisan budaya yang mereka miliki selalu mendapat halangan yang merintang,

sehingga hak-hak politik dan kedudukan sosial menjadi hilang dan tidak bisa dipertahankan. Akibatnya muncul kekecewaan di kalangan masyarakat yang masih ingin pada warisan budayanya.

Faktor kondisional yang berhubungan dengan munculnya pihak lain selain pihak masyarakat setempat dan pemerintah kolonial sebagai pembawa perubahan merupakan penyebab munculnya situasi politik tertentu yang dapat pula membawa perubahan politik di tengah masyarakat.

Perubahan deras dan sangat cepat yang ditawarkan serta direncanakan dengan tujuan mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan politis dan ekonomis bagi pihak pemerintah kolonial sudah barang tentu menimbulkan berbagai implikasi yang diakibatkannya. Perubahan itu membawa destabilitas bagi masyarakat, sebab mereka belum mampu menerima secara bulat pembaharuan, lagi pula tujuan pembaharuan terutama berdasarkan dan diperuntukkan kepada pihak pemerintah kolonial sebagai pembawa pembaharuan baik secara eonomis maupun secara politis.

Salah satu pendorong utama gerakan pemberontakan rakyat Tolitoli adalah ideologi perang sabil yang ditiupkan terutama oleh para pemuka Islam dari organisasi Sarekat Islam kepada masyarakat. Sarekat Islam merupakan organisasi modern pribumi yang menunjukkan keberpihakan kepada kaum bangsanya. Pemberontakan rakyat Tolitoli pada bulan Juni 1919 dapat meletus oleh karena sikap radikalisme yang ditanamkan oleh Sarekat Islam. Perlawanan tentu saja dapat dilakukan dengan cara apapun berdasarkan kemampuan jiwa dan raga perorangan dan kelompok

yang terpadu dalam kebersamaan yang kokoh. Kekuatan ayat Al-Quran menjadi senjata semangat para pemimpin untuk mendorong masyarakat pengikut supaya merasa wajib turut dalam gerakan pemberontakan.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberi petunjuk, bahwa seorang muslim yang melakukan jihad di jalan Allah tidak perlu gentar menghadapi musuh atau orang-orang kafir, sekalipun kekuatan dan jumlah orang yang menjadi musuh lebih banyak. Walaupun jumlah musuh yang dihadapi amat kuat, tetapi dengan kesabaran, keteguhan, dan keberanian atas nama Allah, rakyat selalu yakin akan datangnya pertolongan dan perlindungan Allah, Tuhan semesta Alam.

Ideologi Perang Sabil yang melatarbelakangi gerakan pemberontakan rakyat Tolitoli yang meletus pada tahun 1919 merupakan gerakan yang bersumber dari prinsip jihad di jalan Allah. Apabila prinsip itu telah tumbuh dalam jiwa masyarakat secara kolektif, maka korban kematianpun sebagai akibatnya tidak dapat dijadikan alasan untuk mundur, sebab kematian bukan berarti berakhirnya kehidupan, tetapi sebagai awal dimulainya kehidupan hakiki yang abadi.

Berdasarkan prinsip jihad tersebut, para pemberontak ketika ditangkap dan diadili untuk selanjutnya sebahagian dipenjarakan dan 4 orang di antaranya dihukum gantung, menerima kenyataan itu sebagai suatu pilihan. Hukuman itu dilakukan setelah gerakan pemberontakan rakyat dapat ditumpas oleh rezim pemerintah kolonial.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip

- Laporan Umum Residen Celebes en Onderhorigheden Tahun 1860 dalam Bundel Makassar koleksi Arsip Nasional RI (ANRI) nomor 1/8.
- Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 27 pada tanggal 27 November 1914 yang menetapkan tentang kekuatan Armada Laut di Tolitoli dan sekitarnya. Besluit tersebut dikeluarkan di Buitenzorg tahun 1914, koleksi ANRI nomor 2367/14.
- Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 30 pada tanggal 12 Maret 1919 yang ditetapkan di Buitenzorg mengenai pengawasan terhadap keamanan di Tolitoli dan sekitarnya, koleksi ANRI nomor 6342/19.
- Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 63 yang dikeluarkan di Batavia pada tanggal 13 Desember 1919 yang berisi pengangkatan Yale Muhammad Saleh sebagai Raja Tolitoli pengganti Raja Haji Ali yang tewas dalam peristiwa pemberontakan Tolitoli 1919, koleksi ANRI nomor 2951/19.
- Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 8 yang ditetapkan di Cipanas pada tanggal 8 Oktober 1920 mengenai peta dan catatan wilayah Tolitoli, koleksi ANRI nomor 1489/26.
- Rapport Asisten-Residen van Donggala, 5 Desember 1919, koleksi ANRI nomor 1025/12.
- Rapport De Controleur van Tolitoli, 6 Mei 1919, koleksi ANRI nomor 152 / Geheim Onderwerp : SI Tolitoli.
- Rapport De Mantri Politie, 20 Juni 1919, koleksi ANRI nomor 127/12.

Sumber Resmi Tercetak

- Kolonial Verslag yang diterbitkan tahun 1920, 1921, dan 1922.
- Staatsblad van Nederland-Indië nomor 504 yang berisi Peraturan Pelaksanaan Kerja Wajib di Wilayah Karesidenan Manado yang dikeluarkan pada tahun 1912. X

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

148

Staatsblad van Nederland-Indie nomor 7711 yang berisi Perbaikan dan penyempurnaan Kerja Wajib di Wilayah Kareidenan Manado yang dikeluarkan pada tahun 1912.

Majalah dan Surat Kabar

De Indische Gids yang terbit pada tahun 1919, 1920, dan 1921.

Koloniaal Tijdschrift Tahun 1919, 1920, 1921 yang memuat tentang laporan Tuan Ziesel terhadap peristiwa pemberontakan rakyat Tolitoli pada tahun 1919.

Tijdschrift voor Indische Taal, Land, en Volkenkunde uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang diterbitkan pada tahun 1912.

Tijdschrift van de Vereeniging van Gediplomeerde Gezaghebbers nomor 13 dan nomor 14.

Bataviaasch Handelsblad, tanggal 11, 12, 14, 20, dan Juni 1919.

De Locomotief, yang terbit pada tanggal 10 dan 13 Juni 1919.

Diawa Tengah, yang terbit pada tanggal 29 Desember 1919.

Pangkal Kemadjoean, tanggal 15 Juni dan tanggal 15 Juli 1919.

Soerabajasch Handelsbad yang terbit pada tanggal 20 Juli 1919.

Soerabajasch Niewsblad, yang terbit pada tanggal 11 Juni 1919.

Warta Hindia, yang terbit pada tanggal 18 Juni 1919.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

149

Buku dan Artikel

- AbdulRahman Haji Abdullah, Pengantar Ilmu Sejarah. Kuala Lumpur & Pulau Pinang, Penerbit Bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia dan Pusat Pengajian Luar Kampus Universiti Sains Malaysia Minden, 1994.
- Adas, Michael, Ratu Adil Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa (Diterjemahkan oleh M.Tohir Effendi). Jakarta : CV. Rajawali, 1988.
- A. Hasjmy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. Bandung : Pt.Almaarif, 1989.
- Al-Khudhairi, Zaenab, Filsafat Sejarah Ibn Khaldun (terj.). Bandung : Penerbit Pustaka, 1987.
- A. Muin Umar, Historiografi Islam. Jakarta : Rajawali Pers, 1988.
- Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 1992
- Ankersmit, F.R., Refleksi Tentang Sejarah, (terj.). Jakarta : Gramedia, 1987.
- Anton M. Moeliono et. al., Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Arsip Nasional RI., Sarekat Islam Lokal. Jakarta : Penerbit Sumber-sumber Sejarah, 1975.
- Aron, Raymon, Introduction to the Philosophy of History. Boston : Beacon Press, 1962.
- Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Jakarta : Pustaka Jaya, 1985.
- Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta : LP3ES, 1985.
- Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Barnes, Harry Elmer, A History of Historical Writing. New York : Dover Publications Inc, 1962.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

150

- Benda, Harry J., Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang (Terjemahan Daniel Dhakidae). Jakarta : Pustaka Jaya, 1980.
- Bendix, Reinhard, Max Weber An Intellectual Portrait. New York: Ancor Book Doubleday and Company Inc., 1962.
- Bogdan, R. dan S.J. Taylor, Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif. (terj.), Surabaya : Usaha Nasional, 1982
- Burger, D.H., Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia I. Disadur dan disesuaikan dengan pandangan Nasional oleh Prajudi Atmosudirdjo. Jakarta : Pradnjaparamita, 1962.
- Burke, Peter, History and Social Theory. Cambridge : Polity Press, 1992.
- Claessen, H.J.M., Politieke Antropologie, Een Terreiverkenning (terj.). Jakarta : Erlangga, 1967.
- Coolhaas, W. P., A Critical Survey of Studies on Dutch Colonial History. Leiden : KITLV., 1980.
- Covhran, Thomas C., The Social Sciences Study. New York, 1954.
- Darsiti Soeratman, Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939. Yogyakarta : Taman Siswa, 1989.
- Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta : LP3ES, 1980.
- Djoko Suryo, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900. Yogyakarta :Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989.
- \_\_\_\_\_, Respon Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi : Suatu Refleksi (Makalah), Yogyakarta : P3PK UGM, 1988.
- Fassuer, Cornelis, Kultuurstelsel en Koloniale Baten. Leiden : Universitaire Pers, 1975.
- Fredirick, W.H. & Soeri Soeroto, Pemahaman Sejarah Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta :LP3ES, 1982.
- Gamst, Fredirick C., Peasants in Complex Society. New York : Basic Anhtropology Units, 1974.
- Gardiner, Juliet, What Is History To Day ? London : Macmillan, 1989.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

151

- Garraghan, Gilbert J., A Guide to Historical Method. New York: Fordham University of Chicago Press, 1957.
- Gay, Peter and Wexler, Victor G., Historians at Work, Vol. I. New York : Harper & Row Publishers, 1972
- \_\_\_\_\_, Historians at Work, Vol. II. New York : Harper & Row Publishers, 1972.
- Geertz, Clifford, Involusi Pertanian (terj.). Jakarta : Bhratara, 1983.
- Gotschalk, Louis, Mengerti Sejarah (diterjemahkan oleh Nograho Notosusanto). Jakarta : UI Press, 1983.
- Gorys Keraf, Komposisi. Ende Flores : Nusa Indah, 1989.
- Harto Juwono, "Perkembangan Pendidikan Barat di Karesidenan Kedua dan Dampaknya Bagi Penduduk Tahun 1900-1927. Skripsi S1 pada Fakultas Sastra UNDIP, tidak diterbitkan, Semarang, 1993.
- Harvey, Sillars Barbara, Permesta Pemberontakan Setengah Hati. Jakarta : Garfitipers, 1989.
- Ibn Khaldun, Muqaddimah. (Diterjemahkan oleh Penerbit Pustaka Firdaus). Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986.
- Ide Anak Agung Gde Agung, Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985.
- Juraid (Editor), Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah. Palu : Bappeda Tingkat I Sul-Teng, 1981.
- Kahin, George Mc Turnan, Nasionalism and Revolution in Indonesia. Ithaca : Cornell University Press, 1952.
- Keller, Suzanna, Penguasa dan Kelompok Elite Peranan Elite Perentu Dalam Masyarakat. Diterjemahkan oleh Zahara D. Noer. Jakarta : Rajawali, 1984.
- Korver, A.P.E., Sarekat Islam 1912-1918. Amsterdam : Historisch Seminarium van de Universiteit, 1982.
- Korten, D.C. & Sjahrir, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. Yogyakarta :Tiara Wacana, 1994.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

152

- \_\_\_\_\_, Demokrasi & Budaya Birokrasi. Yogyakarta : Bentang, 1994.
- \_\_\_\_\_, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi. A.E. Priyono (ed.). Bandung : Penerbit Mizan, 1991.
- \_\_\_\_\_, Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta : Bentang, 1995.
- \_\_\_\_\_, Radikalisasi Petani. Yogyakarta : Bentang, 1994.
- \_\_\_\_\_, dalam Surat Kabar Kompas. Jakarta : 7 Juni 1995.
- Lukman, "Sejarah Perlawanan Rakyat Salumpaga Terhadap Belanda" Skripsi S1 pada PKIP Universitas Tadulako, tidak diterbitkan, Palu, 1991.
- Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah 1510-1700. Ujung Pandang : Bhakti Baru Berita Utama 1982.
- \_\_\_\_\_, Latua Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985.
- \_\_\_\_\_, Sejarah Kebudayaan To Kaili. Palu : Tadulako University Press, 1979.
- Migdal, Joels S., Peasants, Politics, and Revolutions Pressures Toward Political and Social Change in The Third World. Princenton : Princenton University Press, 1974.
- Meyerhoff, Hans, The Philosophy of History in Our Time. New York : Doubleday Anchor Books & Company Inc., 1959.
- Milles, Matthew B., Qualitatif Data Analysis A Sourcebook of New Methods. California : Sage Publications Ltd., 1986.
- M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut. Jakarta : Rajawali Pers, 1993.
- Nagazumi, Akira, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia (terj.). Jakarta : Grafitipers, 1989.
- Niel, Robert van, The Emergence of The Modern Indonesian Elite The Haque : Van Hoeve, 1960.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

153

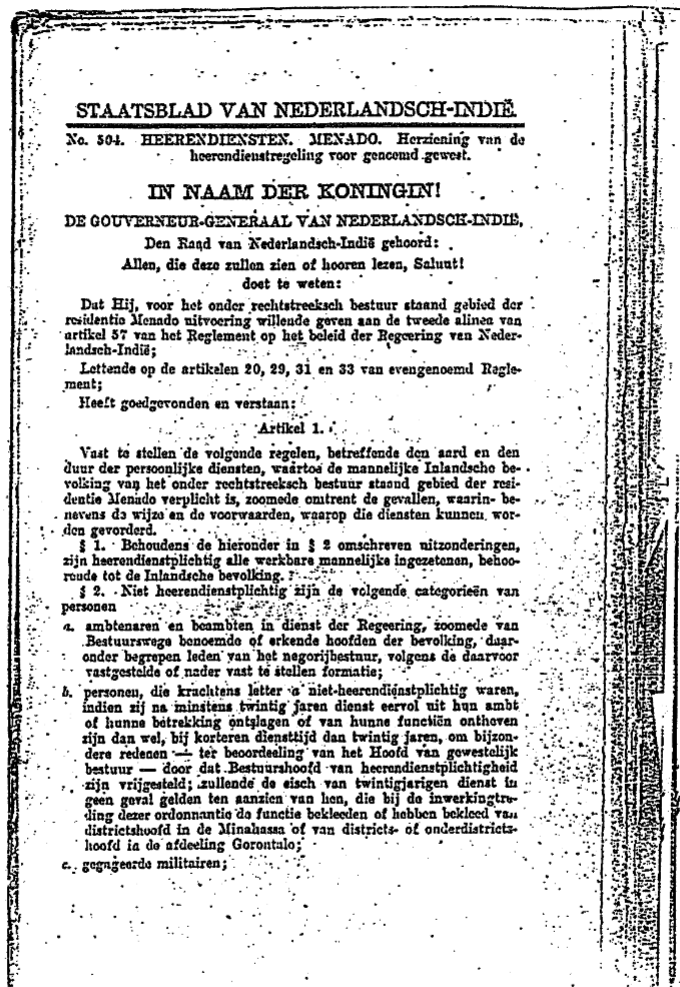
- Nurhayati Nainggolan et.al., Sejarah Daerah Sulawesi Tengah. Jakarta : 1984.
- \_\_\_\_\_, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Tengah. Jakarta : IDKD Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Olsen, Marvin E. The Proseses of Sosial Organization. New Delhi : Oxford Publishing Co., 1975.
- Onghokham, Rakyat dan Negara. Jakarta : Sinar Harapan, 1983.
- Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia. London : Macmillan Education Ltd., 1981.
- Roxborough, Ian, Terori-Teori Keterbelakangan (terj.) Jakarta : LP3ES, 1986.
- Ropke, Jochen, Kebebasan Yang Terhambat Perkembangan Ekonomi dan Prilaku Kegiatan Usaha di Indonesia (terj.). Jakarta : Gramedia, 1988.
- Rush, Michael, et al. An Introduction to Political Sociologi (terj.), Jakarta : CV. Rajawali Pers, 1990.
- Sartono Kartodirdjo, "Arti dan Fungsi Pengetahuan Sejarah dan Peranan Dokumentasi di Dalamnya" dalam Arsip dan Sejarah. Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia, 1980.
- \_\_\_\_\_, Elite Dalam Perspektif Sejarah Jakarta : LP3ES, 1981.
- \_\_\_\_\_, Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990.
- \_\_\_\_\_, Modern Indonesia Tradition & Transformation. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991.
- \_\_\_\_\_, et.al., Pedesaan 1989 Masalah dan Komoditi Perkebunan. Yogyakarta : P3PK UGM., 1989.
- \_\_\_\_\_, Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia (terj.). Jakarta : Pustaka Jaya, 1984.
- \_\_\_\_\_, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.

- \_\_\_\_\_, Pengantar Sejarah Indonesia Baru :  
Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta : Gramedia  
Pustaka Utama, 1992.
- \_\_\_\_\_, Protest Movements in Rural Java A Study  
of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early  
Twentieth Centuries. Singapore, Kualalumpur,  
Jakarta : Oxford University Press/PT. Indira, 1973.
- \_\_\_\_\_, Ratu Adil. Yogyakarta : Sinar Harapan,  
1984.
- Scheltema, A.M.P.A., Bagi Hasil di Hindia Belanda (terj.).  
Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Scott, James C., Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsisi-  
tensi di Asia Tenggara (terj.). Jakarta : LP3ES,  
1981.
- \_\_\_\_\_, "Patron-Client : Politics and : Political  
Political Science Review, Vol. 66, 1972.
- Shanin, Teodor, Peasants in Peasants Societes. New York :  
Penguin Books, 1976.
- Smelser, Neil J., Theory of Collective Behavior. Toronto :  
The Macmillian Company, 1971.
- Soemasaid Moertono, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa  
pada Masa Lampau. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,  
1985.
- Soedjatmoko et.al.(Ed.), Historiografi Indonesia Sebuah  
Pengantar, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Suhartono, Apanage dan Bekel Perubahan Sosial di Pedesaan  
1830-1920, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991.
- Sundhaussen, Ulf, Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju  
Dwi Fungsi ABRI (terj.). Jakarta : LP3ES, 1986.
- Taufik Abdullah, Kemelut Dalam Sejarah. Jakarta : LP3ES,  
1979.
- \_\_\_\_\_, Pengalaman, Kesadaran, dan Sejarah (Pidato  
Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Sastra UGM)  
Yogyakarta : 1995.
- \_\_\_\_\_, Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta :  
Gadjah Mada Univeristy Press, 1979.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

155

- \_\_\_\_\_, Sejarawan dan Kesadaran Sejarah. Jakarta : Leknas LIPI, 1974.
- Taufik Abdullah dan Abdurrachman Suryomihardjo (ed.), Ilmu Sejarah dan Historiografi. Jakarta : Gramedia, 1985.
- Tjoek Soedarmadji, Mengenal Buol Tolitoli. (Tolitoli : Pemda Tingkat II Buol Tolitoli, 1983).
- T. Ibrahim Alfian et al. (ed.) Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1992.
- T. Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- \_\_\_\_\_, "Dimensi Agama dan Reaksi Dunia Melayu Terhadap Penetrasi Barat di Abad XVII dan XIX Khususnya di Riau, Malaka, Palembang, dan Aceh", dalam Humaniora no. 1. Yogyakarta : Fakultas Sastar Universitas Gadjah Mada, 1989.
- \_\_\_\_\_, "Dimensi Ideologi Dalam Perjuangan Melawan Kolonialisme: Sebuah Catatan Singkat", Pemikiran Biografi dan Kesiarahan, II. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1982/1983.
- \_\_\_\_\_, "Tentang Metodologi Sejarah", dalam T. Ibrahim Alfian et. al., (eds.), Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1988.
- Uka Tjandrasasmita (ed.), Sejarah Nasional Indonesia Jilid III. Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1984.
- Umar Kayam, Transformasi Budaya Kita. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada), Yogyakarta : 1989.
- Wertheim, W.F., Indonesian Society in Transition. Bandung : Sumur Bandung, 1956.



PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS SASRA  
Universitas Gadjah Mada

N° 504

- d. personen, gerechtigd tot het dragen van eene Nederlandsche ridderorde of van eenig van Gouvernementswege uitgereikt eeresteeken;
- e. geestelijken en voorgangers in den godsdienst (goeroe djamaat), koesters van kerken op de standplaatsen van predikanten, hulp-predikors en Roomsche-Katholieke geestelijken en andere door het Hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen plaatsen, allen voor erkend door het Bestuur;
- f. leerling-onderwijzers en, voor zooveel betreft het rechtstreeks bestuurd gebied der afdeling Gorontalo, leerling-schrijvers, allen voor zoover erkend door het Bestuur;
- g. onderwijzers en hulponderwijzers, werkzaam aan de door het Bestuur erkende bijzondere scholen en dit, wat het getal der vrijstellingen aangaat, op den voet als aangegeven in artikel 14 van het Reglement, vastgesteld bij artikel 3 van het besluit van 5 Juni 1893 IF 23 (Staatsblad IF 128), zooals dit artikel 14 gewijzigd is bij het besluit van 3 Juli 1893 IF 19 (Staatsblad IF 206), kweekelingen aan de te Tomohon govestigde bijzondere school voor de opleiding van Inlandsche hoofdten en andere aanzienlijke Inlanders te Tondano, alsmede personen, die worden opgeleid tot Inlandsch godsdienstleeraren op den voet der bepalingen in de ordonnantie van 10 September 1870 (Staatsblad IF 125), zooals deze sedert is gewijzigd en aangevuld;
- h. zij, die op den voet van artikel 1 der ordonnantie van 8 December 1889 (Staatsblad IF 255), zooals dit artikel gewijzigd is bij de ordonnantie van 10 Juni 1891 (Staatsblad IF 147), als Inlandsch burger zijn ingeschreven;
- i. Inlanders uit de Minahassa, die vóór de inwerkingtreding dezer ordonnantie dienst hebben genomen, bij een korps gewapende politiebedienden buiten de Minahassa, en na afloop van hun dienstverband aldaar zijn teruggekeerd, met dien verstande dat een dienstverband bij een zoodanig korps buiten de Minahassa en in de residentie Manado slechts in aanmerking komt indien zes jaren onafgebroken is gediend;
- j. Inlanders, afkomstig uit eenig ander gedeelte van den Nederlandsch-Indischen archipel dan de Minahassa, die zich in de Minahassa metterwoon vestigen, en Inlanders, afkomstig uit eenig ander gedeelte van den Nederlandsch-Indischen archipel, dan het rechtstreeks bestuurd gebied der afdeling Gorontalo, die zich in dat gebied metterwoon vestigen, allen gedurende de eerste zes maanden hunner vestiging;
- k. Inlanders, die op den voet van de voor de residentie Manado geldende zoogenaamde koelie-ordonnantie met het Gouvernement of met particuliere ondernemers een koeliecontract hebben gesloten, en wel voor den duur van dat contract;
- l. bij de politie geregistreerde huisbedienden, zoodra andere niet

reeds krachtens 5 vrijgestelde personen, bij ondernemers van landbouw, handel of nijverheid in vasten dienst en op gronden of in woningen hunner werkgevers gevestigd;

an. personen, voor zoover niet reeds krachtens a, b, c, d, e en f vrijgesteld, aan wie met inachtname zooveel mogelijk van bestaande gebruiken, uit hoofde van den aard hunner betrekking of met het oog op hunne afkomst door het Hoofd van gewestelijk bestuur van heereendienstplichtigheid vrijstelling wordt verleend; zullende bij de beoordeeling daarvan rekening worden gehouden met reeds verkregen rechten.

§ 3. Behoudens het bepaalde bij het volgend lid en wanneer zulks bij rampen van hoogerhand dan wel tot afwending van algemeen gevaar tijdelijk noodig mocht zijn -- in welke laatste gevallen desvereecht over alle werkbare mannen kan worden beschikt, -- worden onder geen naam of voorwendsel van de heereendienstplichtigen andere diensten gevorderd, dan die benoodigd voor:

- a. het herstellen en onderhouden van groote transport- en binnenwegen en van in die wegen gelegen bruggen en duikers;
- b. het aanleggen, herstellen en onderhouden van dammen, waterwerken, dijken en waterleidingen ten dienste van de landbouw der Inlandsche bevolking, voor zoover de zorg voor die werken niet aan de betrokken Inlandsche gemeenten behoort te worden overgelaten;
- c. het bezetten van wachthuizen en het doen van nachtelijke rondes;
- d. het overbrengen van dienstbrieven buiten den postdienst, zoodaande het begeleiden van gevangenen en verdachten, alle welke diensten slechts dan gevorderd worden, indien tegen de vastgestelde of nader vast te stellen tarieven geene vrije koelies te bekomen zijn;
- e. het vervoeren van personen en troepen op marsch en van hunne goederen op den voet, aangegeven in de ordonnantie van 3 Mei 1875 (Staatsblad N° 110), indien tegen de vastgestelde of nader vast te stellen tarieven geene vrije koelies te bekomen zijn;
- f. het vervoeren van Gouvernementsgelden en goederen, zoodaande van in dienst zijnde Inlandsche hoofden en ambtenaren en van hunne goederen, voor zoover geen transportmiddelen van Gouvernementswege worden verstrekt, indien tegen de vastgestelde of nader vast te stellen tarieven geene vrije koelies te bekomen zijn, met dien verstande dat deze diensten alleen gevorderd mogen worden in het rechtstreeks bestuur gebied der afdeling Gorontalo.

Waar bij het uitvoeren van civiele of militaire landwerken, die in vrijen arbeid behooren te worden verricht, op behoorlijke voorwaarden geen of niet in voldoende aantal vrije werklieden te verkrijgen zijn, kan, voor zooveel de koeliediensten betreft, van heereendienstplichtigen worden gebruik gemaakt, doch alleen na verkregen machtiging van den Gouverneur-Generaal, tegen zoodanig

N° 504

loon als, rekening houdende met de plaatselijke koelieeloonen, in elk geval zal bepaald worden.

§ 4. Ongerekend de diensten, bedoeld in het eerste lid, sub d, e en f en in het tweede lid van § 3 hiervoren en behalve wanneer bij rampen van hooger hand dan wel tot afwending van algemeen gevaar overschrijding tijdelijk noodig mocht zijn, bedraagt het maximum der in één jaar te vorderen heerdiensten 32 (twee en dertig) dagen arbeid per heerdienstplichtige.

De duur van één dag arbeid, voor de onder § 3 bedoelde diensten gevorderd, bedraagt ten hoogste twaalf uren, daaronder begrepen de tijd, noodig voor het afleggen van den afstand tusschen de woonplaats van den dienstplichtige en het werk, waarvoor hij is opgeroepen, heen en terug, benevens de noodige rusttijd.

Het verrichten van een dag arbeid van den vollen bij de vorige alinea omschreven duur wordt als een dagdienst aangeduid.

§ 5. De heerdiensten worden zooveel mogelijk over de negorijen gelijkmatig verdeeld en binnen het district beperkt.

Waar echter het belang van nabij de grens gelegen negorijen of het algemeen belang van de Inlandsche bevolking medebracht, dat de heerdienstplichtigen in een ander dan in het eigen district worden te werk gesteld, mag van dien regel worden afgeweken.

Elke negorij wordt, naar gelang van het aantal dagdiensten, waarover aldaar tot het doen van heerdiensten mag worden beschikt, belast met een werktaak (quantum arbeid), voor zooveel mogelijk beperkt tot een minimum aantal soorten van diensten en plaatsen van tewerkstelling.

§ 6. De verdeling der aan de negorijen opgelegde werktaken wordt, onder toezicht van het Bestuur, aan haar zelve overgelaten.

§ 7. De verdeling der diensten tusschen de verschillende negorijen geschiedt met inachtneming van den kortst mogelijken afstand tusschen de woonplaatsen der dienstplichtigen en de plaatsen, waar zij worden te werk gesteld.

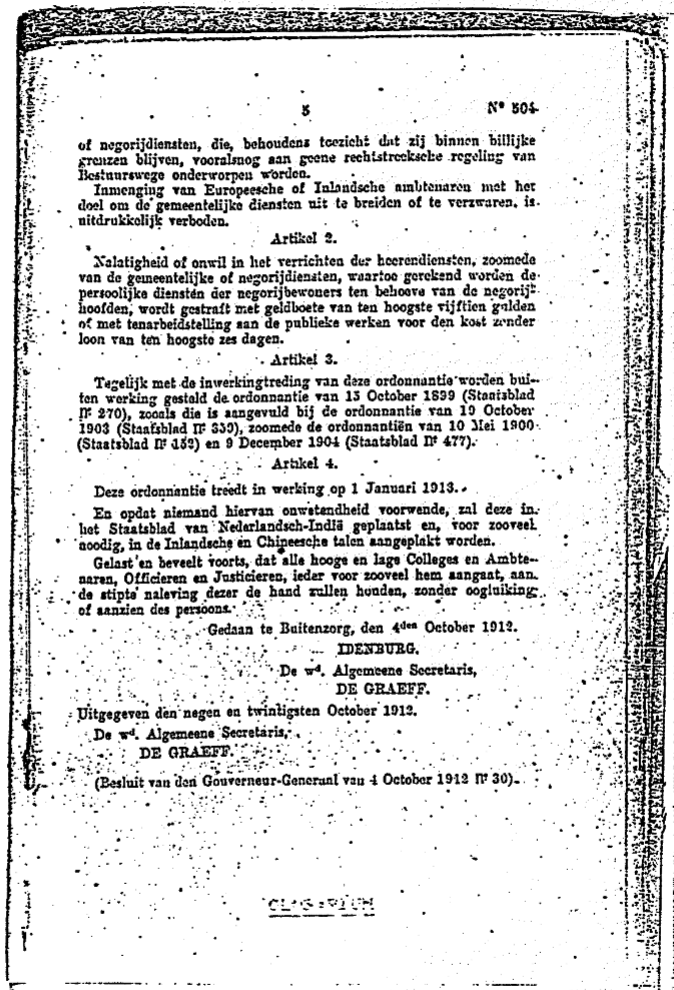
Voor tewerkstelling bij de diensten bedoeld bij § 3, sub a, b en c, op een afstand van meer dan 8 (acht) paal, wordt in elk bijzonder geval de machtiging van het Hoofd van gewestelijk bestuur vereischt.

§ 8. De heerdiensten worden, voor zooveel niet anders is of wordt bepaald, zonder loon of tegemoetkoming verricht.

§ 9. De Inlandsche bevolking is niet verplicht tot eenige levering, betaald of onbetaald, van materialen of andere goederen, welke haar bijzonder of gemeentelijk eigendom zijn.

Elke vordering van dien aard is onvoorwaardelijk verboden, behoudens het voorkomende in artikel 67 der bepalingen, regelende de ont-eigening ten algemeenen nutte (Staatsblad 1864 IF 6), en in de ordonnantie van 3 Mei 1875 (Staatsblad IF 110), zooals deze sedert is of zal worden gewijzigd.

§ 10. Het bovenstaande is niet van toepassing op de gemeentelijke



Terjemahan :

LEMBARAN NEGARA HINDIA BELANDA

No. 504 KERJA WAJIB. MENADO. Perubahan Peraturan Kerja Wajib Untuk Wilayah Menado.

ATAS NAMA RATU  
Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Mendengar Nasehat Dewan Hindia :  
Semua yang membaca atau mengetahui keputusan ini, Salut !  
Harap menyebarkan :

Bahwa Beliau, akan menyampaikan uraian bagi wilayah Karesidenan Menado yang berada di bawah kekuasaan langsung tentang pelaksanaan alinea kedua pasal 57 Peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ;

Memperhatikan pasal 20, 29, 31, dan 33 dari praturan di atas ;  
Menerima dan menyetujui :

Pasal 1

Menetapkan peraturan berikut ini, mengenai jenis dan lana kerja wajib individu, di mana penduduk pria pribumi dari wilayah Karesidenan Menado di bawah pemerintahan langsung diwajibkan, serta mengenai peristiwa, juga cara dan persyaratan agar kewajiban ini dapat dilaksanakan.

1. Dengan kekecualian yang tertulis pada nomor 2, kewajiban kerja dibebankan pada semua orang pria yang sehat yang termasuk penduduk Hindia Belanda.
2. Yang tidak terkena kewajiban kerja adalah kelompok orang sebagai berikut :
  - a. para pegawai dan pejabat yang berdinan pada pemerintah, serta para kepala penduduk yang diangkat dan diakui pemerintah, termasuk para anggota pemerintahan negori, menurut susunan yang ditetapkan diwaktu kemudian ;
  - b. orang-orang yang berdasar huruf a tidak terkena wajib kerja apabila setelah minimal 20 tahun bekerja mengundurkan diri dari jabatan atau pekerjaannya atau berhenti dari fungsinya kecuali dalam masa dinas kurang dari 20 tahun dibebaskan oleh kepala pemerintahan lokal dari kewajiban kerja (dengan melihat kepala pemerintahan wilayah); kecuali ketentuan 20 tahun kerja tidak berlaku berkaitan dengan mereka yang dengan dimulainya peraturan ini menempati jabatan atau mendapatkan jabatan dari kepala distrik di Minahasa atau onderdistrik di afdeling Gorontalo;
  - c. anggota militer yang bertugas;
  - d. orang-orang yang dianggap berwenang menerima bintang

- jasa kehormatan dari pemerintah Hindia Belanda atau berjasa bagi negara;
- e. kaum ulama dan jemaat agama (guru jemaat), koster gereja di kantor pendeta, pendeta pembantu dan inam Katolik serta orang lain di tempat-tempat yang ditunjuk oleh kepala pemerintahan yang hanya diakui oleh pemerintah;
  - f. para guru yang berada di wilayah yang diperintah secara langsung pada afdeling Gorontalo, juru tulis sekolah yang telah diakui oleh pemerintah;
  - g. para guru dan guru bantu yang bekerja di sekolah swasta yang diakui oleh pemerintah, termasuk orang yang dibebaskan atas dasar apa yang disampaikan dalam pasal 14 peraturan yang ditetapkan pada pasal 3 keputusan 5 Juni 1893 no. 23 (Stbl. No. 128) yang diubah dengan keputusan 3 Juli 1898 no. 19 (Stbl. No. 206) para guru di sekolah swasta yang dibuka di Tomohon untuk mencetak para guru pribumi, para siswa sekolah anak-anak kepala adat pribumi dan bangsawan pribumi lain di Tondano, serta orang-orang yang dididik menjadi guru agama pribumi atas dasar ketentuan dalam peraturan 10 September 1870 (Stbl. No. 123) yang akan diubah dan dilengkapi kemudian;
  - h. mereka yang atas dasar pasal 1 peraturan 8 Desember 1889 (Stbl. No. 255) yang diubah dengan peraturan 10 Juni 1891 (Stbl. No. 147) tertulis sebagai warga pribumi;
  - i. orang-orang pribumi di Minahasa yang telah berdinasi sebelum diberlakukannya peraturan ini dalam korps kepolisian bersenjata di luar Minahasa dan setelah selesai masa kerjanya kembali ke sana, dengan pengertian bahwa kontrak kerja dalam korps di Minahasa ini dan di Karesidenan Manado hanya dipertimbangkan apabila berlangsung 6 tahun tanpa berhenti;
  - j. orang pribumi yang berasal dari bagian lain dari kepulauan Hindia kecuali Minahasa, yang tinggal di Minahasa, dan orang pribumi yang berasal dari kepulauan lain kepulauan Hindia, kecuali daerah afdeling Gorontalo, yang diperintah secara langsung yang tinggal di wilayah itu, hanya selama enam bulan pertama masa tinggalnya;
  - k. orang pribumi yang atas dasar peraturan kuli yang berlaku untuk Karesidenan Manado membuat kontrak kerja dengan pemerintah atau perusahaan swasta, dan selama masa kontrak itu;
  - l. para pembantu rumah tangga pada kepolisian, serta orang lain yang dibebaskan bukan atas dasar nomor k, bekerja pada perusahaan perkebunan, perdagangan, atau industri dan tinggal di tanah atau rumah majikannya;
  - m. orang-orang, sejauh tidak dibebaskan atas dasar a, c, h, i, k, dan l, di mana dengan memperhatikan kebiasaan yang ada diberi kebebasan dari jabatannya atau dengan memperhatikan asal-usulnya oleh kepala pemerintahan wilayah dibebaskan dari kerja wajib; dengan mengingat hak-hak yang telah diterimanya;

3. Kecuali itu ketentuan dalam baris berikutnya menurut ketentuan di atas dianggap perlu untuk mengalihkan ancaman umum sementara (yang jika dituntut bisa diterapkan atas semua orang pria sehat) tidak atas nama atau alasan dari para wajib kerja untuk melakukan pekerjaan lain kecuali yang diperlukan untuk :
- a. memperbaiki dan merawat jalan raya dan jalan pedalaman serta parit dan jembatan yang terletak di jalan ini;
  - b. pembuatan, perbaikan, dan perawatan bendungan, proyek air, galian, dan saluran air demi kepentingan pertanian penduduk pribumi, sejauh perhatian bagi proyek ini tidak diserahkan pada masyarakat pribumi yang terkait;
  - c. menepati rumah jaga dan melakukan ronda malam;
  - d. membawa surat dinas di luar dinas pos, serta tahanan atau terdakwa, semua pekerjaan yang hanya dituntut apabila tidak kuli bebas dengan upah yang ditetapkan;
  - e. mengangkut orang dan pasukan yang bergerak dan barang-barang atas dasar apa yang tercantum dalam peraturan 3 Mei 1875 (Stbl. No. 110), apabila tidak ada kuli bebas dengan tarif yang ditetapkan;
  - f. mengangkut uang dan barang pemerintah, serta para kepala dan pejabat pribumi yang melakukan perjalanan dinas beserta barangnya, sejauh tidak ada sarana angkutan dari pihak pemerintah, apabila tidak ada kuli bebas dengan tarif yang ditetapkan dengan pengertian bahwa dinas ini semua harus dikerjakan di daerah afdeling Gorontalo yang diperintah langsung. Apabila dalam pelaksanaan proyek negara umum atau militer, yang termasuk dilakukan dalam kerja bebas atas persyaratan menadai tidak didapatkan tenaga bebas yang mencukupi, sejauh menyangkut kerja kuli, bisa dimanfaatkan para wajib kerja, tapi hanya setelah menerima izin dari Gubernur Jenderal, dengan upah yang ditetapkan dalam setiap peristiwa, dengan memperhitungkan upah kuli lokal;
4. Tanpa memperhitungkan kerja yang dimaksud dalam ayat pertama sub d, e, f, dan dalam ayat kedua baris 3 tentang ini dan kecuali itu diperlukan menurut pendapat dari atas untuk menghindari bahaya umum, maksimum kerja wajib yang dituntut dalam 1 tahun berjumlah 32 hari kerja tiap orang. Lama kerja sehari, untuk kerja yang dimaksud pada baris 3, berjumlah paling banyak 12 jam, termasuk masa yang diperlukan untuk menempuh jarak antara rumah pekerja dan tempat kerja yang memangilnya pulang dan pergi, juga waktu istirahat yang diperlukan. Pelaksanaan sehari kerja dengan lama yang tertulis pada alinea di atas ditunjuk sebagai sehari kerja wajib.

5. Kerja wajib itu sedapat mungkin dibagi rata di seluruh negori dan terbatas pada distrik itu. Akan tetapi apabila kepentingan negori yang terletak di dekat perbatasan atau kepentingan umum penduduk pribumi ini terlibat, sehingga pekerja wajib harus bekerja di daerah lain, maka perturan ini bisa dilanggar. Setiap negori sesuai dengan jumlah hari kerja, yang termasuk diperlukan untuk melakukan kerja wajib di sana, dibebani dengan tugas kerja (jumlah kerja), sedapat mungkin terbatas pada jenis kerja minimum dan tempat kerja.
6. Pembagian tugas kerja yang dibebankan pada negori diserahkan kepada negori itu di bawah pengawasan pemerintah.
7. Pembagian kerja di antara berbagai negori dilakukan dengan mengingat batas jarak yang sedekat mungkin antara rumah pekerja dan tempat kerja mereka. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud pada ayat sub a, b, dan c, pada jarak lebih dari 8 paal di setiap kasus, izin kepala pemerintahan setempat diperlukan.
8. Kerja wajib, sejauh tidak berbeda atau ditetapkan, dilakukan tanpa upah atau ganti rugi.
9. Penduduk pribumi tidak diwajibkan menyerahkan bahan atau barang-barang lain, dibayar atau tidak, yang menjadi miliknya atau milik bersama. Setiap tuntutan ini dilarang tanpa syarat, kecuali yang muncul pada pasal 67 peraturan yang mengatur penyitaan sarana umum (Stbl. 1864 No. 6) dan dalam peraturan 3 Mei 1875 (Stbl. No. 110) yang akan diubah.
10. Hal di atas tidak berlaku bagi kerja negori atau komunal yang kecuali pengawasan yang tetap ada dalam batas-batas wajar, terutama tidak terikat pada ketentuan langsung dari pihak pemerintah. Campur tangan para pejabat Eropa atau pribumi dengan tujuan untuk meluaskan atau menambah kerja komunal dilarang dengan tegas.

#### Pasal 2

Kelalaian atau keengganan untuk melaksanakan kerja wajib serta tugas komunal atau negori, di mana termasuk kerja pribadi dari penduduk negori demi kepentingan para kepala negori, akan dihukum dengan denda uang paling tinggi f 15 atau dengan kerja paksa pada pekerjaan negara tanpa upah paling lama 6 hari.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

165

**Pasal 3**

Bersamaan dengan mulai berlakunya peraturan ini, peraturan 15 Oktober 1899 (Stbl. No. 152) dicabut, yang dilengkapi dengan peraturan tanggal 19 Oktober 1903 (Stbl. No. 359) serta peraturan tanggal 10 Mei 1900 (Stbl. No. 152) dan 9 Desember 1904 (Stbl. No. 477).

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1913.

Dan agar tidak ada orang yang pura-pura tidak tahu, peraturan ini akan dicantumkan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda dan jika perlu diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan Cina. Selanjutnya dianjurkan dan diperintahkan agar semua lembaga dan pejabat tinggi dan rendah, perwira dan hakin, setiap orang yang terkait harus mematuhi ketentuan ini tanpa peduli siapa-pun orangnya.

Dibuat di Buitenzorg 4 Oktober 1912

Idenburg  
Sekretaris Umum  
De Graeff

Dikeluarkan 29 Oktober 1912  
Sekretaris Umum  
De Graeff

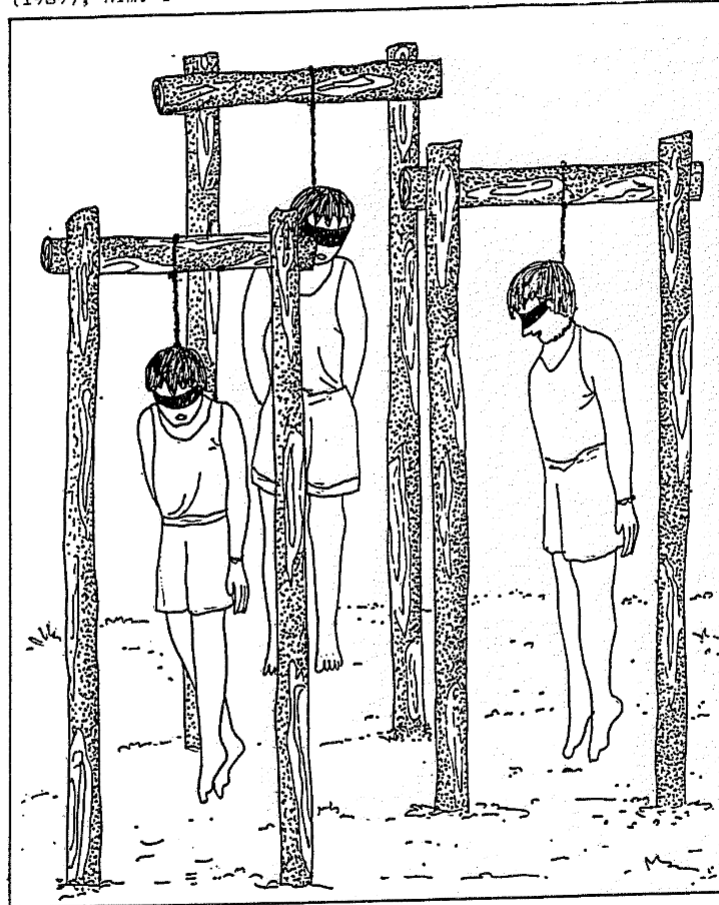
S.K. Gubernur Jenderal 4 Oktober 1912  
Nomor 30.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

166

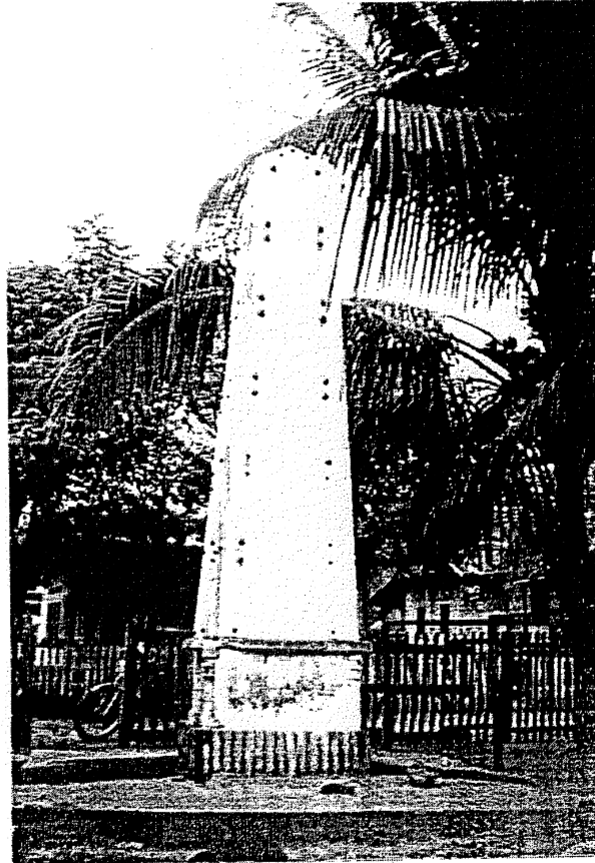
## Lampiran 2 :

Gambar tiga orang anggota pelaku utama pemberontakan Tolitoli yang tengah menjalani hukuman gantung di Rumah Tahanan Manado pada tanggal 27 September 1922. Gambar direproduksi kembali berdasarkan gambar rekaan M. Lubis (1969), hlm. 5



Lampiran 3 :

Gambar Tugu Tanda Peringatan wafatnya Kontrofir Angelino yang terletak di kampung Salumpaga.

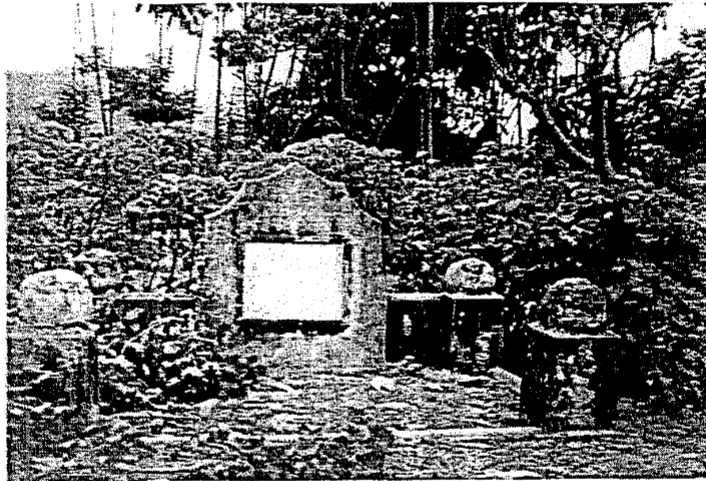


Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

168

Lampiran 4 :

Gambar kuburan lima orang polisi bersenjata yang tewas dalam pemberontakan 5 Juni 1919.

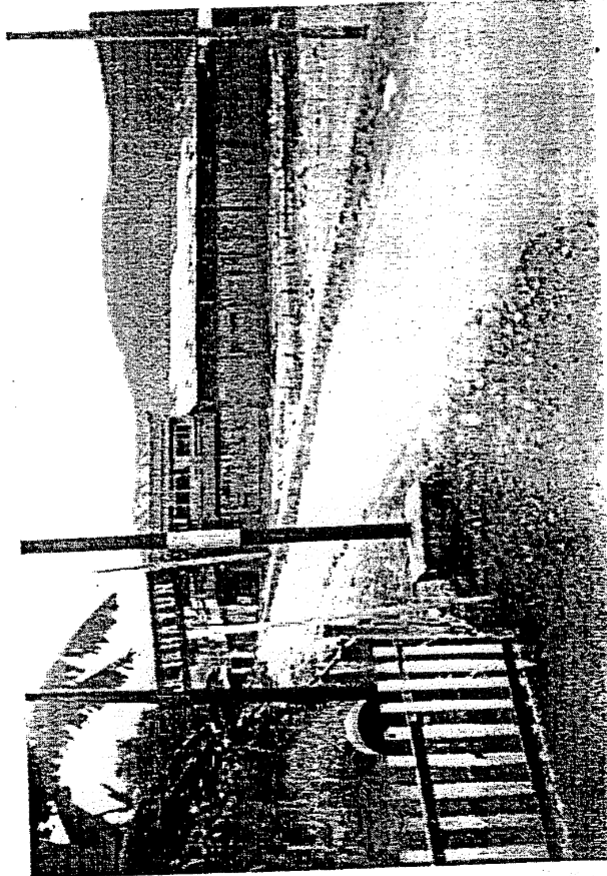


## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

169

## Lampiran 5 :

Gambar lokasi jalan di Kalangkangan Labuan Dede sebagai tempat pelaksanaan kerja wajib bagi penduduk Salumpaga pada tahun 1919.



**Lampiran 6 :**

Gambar Tajung Batu yang merupakan lokasi pelaksanaan hukuman kerja paksa bagi sebagian pekerja wajib yang membangkang.





## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

GLOSARIUM

Anak Kupuno	= penanggung jawab kebersihan.
Jogugu	= petugas penghubung raja dengan pihak luar dan menjalankan kekuasaan raja apabila raja berhalangan.
Kafir	= orang yang mengingkari keimanan terhadap Islam.
Kafir Dzimmy	= orang yang mengingkari keimanan terhadap Agama Islam dan selalu mengusik atau ingin menindas umat Islam.
Kalangan	= lembaga kerajaan atau kesultanan yang digunakan sebelum masuknya Islam di Tolitoli.
Kapitan Laut	= pengawas keamanan di kawasan laut.
Kapten Raja	= pengawal raja.
Lila	= upacara adat pada saat seorang perempuan memasuki usia remaja.
Mayor	= petugas pemerintahan yang mengurus masyarakat kecil atau bawah.
Mardika	= istilah khusus untuk raja di kampung Dampal.

## Pemberontakan rakyat Tolitoli 1919 / Juraid -S2.SEJ

173

Olongian	= raja (pimpinan suku) dari kelompok masyarakat tertentu di Tolitoli yang berada di Laisi, Malomba, Salomara, dan Tinabogan.
Raja Muda	= merupakan wakil raja atau setara dengan perdana menteri.
Syahbandar	= pengatur administrasi pelabuhan
Sulea	= pelayan raja.
Todaka	= pengganti hakim.